

## PARTISIPASI PEREMPUAN

DALAM PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF  
ERA NEW NORMAL LIFE MELALUI MODEL  
BAITUL MAL WA TAMWIL DI KOTA PALEMBANG



Memaknai partisipasi perempuan merupakan dalam berbagai kajian memiliki nilai bahwa setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, dalam perspektif tersebut tidak menjelaskan diskriminasi gender, tapi lebih pada penegasan atas upaya bersama dalam meningkatkan produktifitas perempuan terutama di bidang ekonomi mikro sebagaimana dalam buku ini. Hadimnya Baitul Maal Wa Tamwil dalam lingkup partisipasi perempuan dan pengembangan usaha produktif mereka menjadi bagian penting dan berguna untuk membangun model BMT era Pandemic Covid-19 yang memberikan Langkah untuk membangun sinergistas peningkatan usaha mikro yang dilakukan oleh kaum perempuan.

Ada dua model rekomendasi dari hasil penelitian yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan usaha produktif yang dilakukan kaum perempuan yaitu Pertama, *model religiusitas produktifitas* yang dibangun atas nilai nilai keseimbangan antara agama, social dan keuntungan usaha, sebab Ruhnya BMT di Indonesia adalah koperasi, dengan spirit kesejahteraan komunal yang dikenal dengan *taawun*; Kedua, *model integrasi stakeholder* dimana adanya satu kebersamaan yang menghadirkan stakeholder Integras Peran Stakeholder Yang Menjadi Mitra BMT (Pemerintah, Asosiasi BMT, Dunia Usaha Mikro kaum perempuan) untuk membangun keseimbangan bisnis dan social. Model kedua ini untuk menegaskan bahwa jika tidak terjadi keseimbangan maka BMT BMT mengalami under liquiditas era Pandemic COVID-19 (New Normal) dan akhirnya mempengaruhi kinerja bisnis BMT sendiri.

Penelitian Oleh Heri Junaidi, Rika Lidyah dan Ria Agustina Tohawi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan dukungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 berjudul Partisipasi Perempuan dalam Pengembangan Usaha Produktif Era New Normal Life Melalui Model Baitul Mal Wa Tamwil di Kota Palembang.

**RAFAH**press



DAFTAR ISI  
MATERI KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR LAMPIRAN  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISI  
MATERI KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR LAMPIRAN  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR

Dr. Heri Junaidi, MA  
Dr. Rika Lidyah, SE, Msi. AK.A  
Ria Agustina Tohawi, Lc. MA. PhD

# PARTISIPASI PEREMPUAN

DALAM PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF  
ERA NEW NORMAL LIFE MELALUI MODEL  
BAITUL MAL WA TAMWIL DI KOTA PALEMBANG



**RAFAH**

**PARTISIPASI PEREMPUAN  
DALAM PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF  
*ERA NEW NORMAL LIFE* MELALUI MODEL *BAITUL  
MAL WA TAMWIL* DI KOTA PALEMBANG**

**Dr. Heri Junaidi. MA  
Dr. Rika Lidyah, SE. Msi. AK.CA  
Ria Agustina Tohawi, Lc. MA. PhD**

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan  
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

**Ketentuan Pidana**

**Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

**Partisipasi Perempuan dalam Pengembangan Usaha  
Produktif Era New Normal Life Melalui Model Baitul Mal  
Wa Tamwil di Kota Palembang**

---

Penulis : Dr. Heri Junaidi, MA  
Dr. Rika Lidyah, SE, MSi, AK.CA  
Ria Agustina Tohawi, Lc. MA, PhD

Layout : Yuni Aprilia

Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

**Rafah Press** bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang  
Anggota IKAPI (No. Anggota 004/SMS/2003)

Dicetak oleh:

CV. Amanah  
Jl. Mayor Mahidin No. 142  
Telp/Fax : 366 625  
Palembang – Indonesia 30126  
E-mail :noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Oktober 2021

15,5 x 23 cm  
xii, 177 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis  
All right reserved

ISBN : 978-623-250-298-7

## ABSTRAK

Penelitian ini membantah pandangan bahwa gerakan usaha mikro produktif perempuan tidak mampu berkembang dan bekerjasama dengan Lembaga usaha mikro Syari'ah karena ketidak mampuan mereka mengembangkan manajemen rumah menjadi manajemen sederhana yang dapat dievaluasi, serta lemahnya pengetahuan perempuan dalam mengelola usaha, serta sikap perempuan yang membangun usaha sebagai "pekerjaan sampingan". Rumusan Masalah Penelitian ini 1) Bagaimana Partisipasi Perempuan Dalam Pengembangan Usaha Produktif *Era New Normal Life* di kota Palembang?; 2) Bagaimana *Baitul Mal Wa Tamwil* Di Palembang membangun Sinergi dalam pemberdayaan perempuan pada usaha produktif?

Teori Dalam studi ini menggunakan 2 teori utama yaitu teori Efisiensi berkeadilan Sri Edi Swasono yang berangkat dari keyakinannya atas Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan hukum sistem ekonomi di Indonesia; dan teori maqashid Syari'ah. Metodologi yang digunakan kualitatif dengan metode pengambilan data adalah wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Partisipasi Perempuan Dalam Pengembangan Usaha Produktif *Era New Normal Life* di kota Palembang memiliki berbagai pandangan yang secara khusus bahwa perempuan memiliki kualitas dalam upaya meningkatkan partisipasi mereka, walaupun berbagai persoalan terutama era pandemic COVID-19 yang dikenal kemudian dengan istilah new normal life menggayuti kaum perempuan.

Gerakan dari semua sector memperlihatkan kualitas dan upaya maksimal perempuan dalam mengembalikan kehidupan domestic namun sisi lain upaya kreatifitas perempuan untuk menguatkan ekonomi keluarga dengan merubah pola menuju ke usaha rumahan ataupun usaha yang tidak melanggar aturan protocol Kesehatan. Sinergisitas dengan BMT sebagai Lembaga ekonomi micro Syari'ah

menjadi bagian tidak bisa diabaikan. Penguatan model seperti religiusitas produktif dan orientasi stakeholder menjadi bagian penting dalam “memperbaiki” kebersamaan dengan usaha uisahawa perempuan terutama di kota Palembang

**Kata Kunci :** Partisipasi Perempuan, Usaha Produktif, Model BMT

## ABSTRACT

This study refutes the view that the women's productive micro-enterprise movement is unable to develop and cooperate with Shari'ah microenterprise institutions because of their inability to develop home management into simple management that can be evaluated, as well as the weak knowledge of women in managing businesses, as well as the attitude of women who build businesses. as a "side job". The formulation of the research problem 1) How is the participation of women in the development of productive businesses in the New Normal Life era in the city of Palembang?; 2) How does Baitul Mal Wa Tamwil in Palembang build synergy in empowering women in productive businesses?

Theory This study uses 2 main theories, namely the theory of justice efficiency, Sri Edi Swasono, which departs from his belief in Article 33 of the 1945 Constitution as the legal basis for the economic system in Indonesia; and the Maqashid Shari'ah theory. The methodology used qualitatively with the data collection method is interviews. The results of the study conclude that Women's Participation in Productive Business Development in the New Normal Life Era in the city of Palembang has various views, specifically that women have quality in an effort to increase their participation, despite various problems, especially the COVID-19 pandemic era which was known later as the new normal life. attract women.

Movements from all sectors show the quality and maximum efforts of women in restoring domestic life, but on the other hand, women's creative efforts to strengthen the family economy by changing patterns towards home-based businesses or businesses that do not violate the rules of the Health protocol. Synergy with BMT as an economic institution such as Syari'ah is a part that cannot be ignored. Strengthening models such as productive religiosity and

stakeholder orientation is an important part in "repairing" togetherness with women's business ventures, especially in the city of Palembang.

**Key Word :** Women's Participation, Productive Enterprises, BMT Model

## نبذة مختصرة

تدحض هذه الدراسة الرأي القائل بأن حركة المشاريع الصغرى المنتجة للمرأة غير قادرة على التطور والتعاون مع مؤسسات المشاريع الصغرى الشرعية بسبب عدم قدرتها على تطوير إدارة المنزل إلى إدارة بسيطة يمكن تقييمها ، فضلاً عن ضعف معرفة المرأة في إدارة الأعمال التجارية ، وكذلك موقف النساء اللاتي يبنن الأعمال التجارية. باعتبارها "وظيفة جانبية". صياغة مشكلة البحث (١) كيف هي مشاركة المرأة في تطوير الأعمال الإنتاجية في عصر الحياة الطبيعية الجديدة في مدينة باليمبانج؟ (٢) كيف تقوم بيت مال وتمويل في باليمبانج ببناء التآزر في تمكين المرأة في الأعمال الإنتاجية؟

النظرية تستخدم هذه الدراسة نظريتين رئيسيتين ، وهما نظرية كفاءة العدالة ، سري إيدي سواسونو ، والتي تحيد عن إيمانه بالمادة ٣٣ من دستور عام ١٩٤٥ كأساس قانوني للنظام الاقتصادي في إندونيسيا ؛ ونظرية المقاصد الشرعية. المنهجية المستخدمة نوعياً مع طريقة جمع البيانات هي المقابلات. خلصت نتائج الدراسة إلى أن مشاركة المرأة في تطوير الأعمال الإنتاجية في عصر الحياة الطبيعية الجديدة في مدينة باليمبانج لها وجهات نظر مختلفة ، وتحديداً أن المرأة تتمتع بالجودة في محاولة لزيادة مشاركتها ، على الرغم من المشاكل المختلفة ، وخاصة فيروس كورونا المستجد (COVID-19). عصر الوباء الذي عرف فيما بعد بالحياة الطبيعية الجديدة .. تجذب النساء.

تظهر التحركات من جميع القطاعات الجودة والجهود القصوى التي تبذلها المرأة في استعادة الحياة المنزلية ، ولكن من ناحية أخرى ، الجهود الإبداعية للمرأة لتعزيز اقتصاد الأسرة من خلال تغيير الأنماط نحو الأعمال المنزلية أو الأعمال التجارية التي لا تنتهك قواعد الصحة بروتوكول. التآزر مع BMT كمؤسسة اقتصادية مثل Syari'ah جزء لا يمكن تجاهله. تعزيز النماذج مثل التدين المنتج وتوجيه أصحاب المصلحة هو جزء مهم في "إصلاح" التعاون مع المشاريع التجارية النسائية ، وخاصة في مدينة باليمبانج.

**الكلمة المفتاحية:** مشاركة المرأة ، المشاريع الإنتاجية ، نموذج BMT



## PENGANTAR PENULIS

Dengan rahmat dan Inayah Allah Swt penelitian Partisipasi Perempuan Dalam Pengembangan Usaha Produktif *Era New Normal Life* Melalui Model *Baitul Mal Wa Tamwil* Di Kota Palembang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw. Penelitian ini merupakan penggalian mendalam atas otonomisasi perempuan di ranah publik dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha mikro dan sinergitas dalam model salah satu lembaga mikro syari'ah yang dikenal dengan Baitul Maal wa al-Tamwil.

Studi ini lebih ditegaskan pada hasil wawancara mendalam, sehingga alur pendalaman materi pun mengikuti aktifitas yang muncul dalam studi ini. Sehingga model yang terbangun menjadi sebuah temuan dasar untuk pengembangan ke-BMT an era new normal (pandemic COVID-19). Seiring dengan selesainya penelitian diucapkan penghargaan dan terima kasih kepada mereka yang banyak sekali memberi bantuan yang amat berharga dari banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih dan sembah sujud serta doa yang tiada henti disampaikan kepada keluarga besar masing masing tim peneliti. Terima kasih juga kepada tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang yang dipimpin Oleh Prof. Dr. Paishol Burlian, M.Hum. beserta Kepala Penelitian dan penerbitan, Dr. Al-Hefni, M.PdI yang telah memberikan kesempatan menjadi salah satu penerima dana hibah penelitian tahun 2021. Kepada Dr. Darwis Harapan, M.Si reviewer sejak uji proposal, *work in progress* sampai review penilaian keluaran penelitian ini.

Terima kasih Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang di limpahkan ke dalam RKA K/L Lembaga LP2M UIN Raden Fatah atas biaya penelitian hingga selesai. Kepada Rektor UIN Raden Fatah, Prof. Nyayu Khodijah, M.Si, Wakil Rektor I, Dr, Muhammad Adil, MA, dan Wakil Rektor II, Dr. Abdul Hadi, M.Ag atas kemudahan berbagai administrasi hingga penelitian ini dapat selesai dengan maksimal.

Terima kasih juga diucapkan kepada Dekky Anwar, SE. M.Si. PhD atas berbagai dialog selama perjalanan Palembang-Solo membahas substansi kajian BMT, Responden Penelitian dari para Penggiat Gender di Sumatera Selatan, Pengurus BMT di kota Palembang dan para usahawan Perempuan. berbagai respon dan informasi menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Terucap terima kasih kepada segenap tim kerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah. Kepada Chici Rima Putri Pratama yang intens mengedit tulisan, mengejar para Responden penelitian, serta membantu berbagai administrasi penelitian ini. Kesemuanya diucapkan terima kasih, semoga menjadi bagian amal jariah dalam dunia akademik ini

Pada akhirnya, kajian ekonomi gender ini masih memiliki berbagai nilai perdebatan, dan karenanya menjadi sebuah studi yang menarik dan terus untuk dapat dikaji secara ilmiah, untuk itu sumbang saran, ajakan dialog dan diskusi, akan diterima dengan hati lapang. Di atas semua itu, kami semua yang bertanggung jawab atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian ini.

Palembang, 2021

Heri Junaidi, Rika  
Lidyah, Ria Agustina

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGANTAR PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	16
D. Literatur Review .....	17
E. Landasan Teori .....	23
F. Metodologi Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sumber Data.....	30
3. Lokasi Penelitian.....	30
4. Responden dan Teknik Sampling .....	31
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
6. Teknik Analisis Data.....	32
G. Sistematika Pembahasan.....	33
<b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>35</b>
A. Pengertian .....	35
1. Partisipasi Perempuan.....	35
2. Pengembangan Usaha Produk.....	40
3. Era New Normal Life.....	44
4. Model <i>Baitul Mal Wa Tamwi</i> .....	47
B. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan .....	59
C. Perempuan dan Pengembangan Usaha Produktif ..	75

<b>BAB III PEREMPUAN, USAHA PRODUKTIF DAN BAITUL MAL WA TAMWIL DI KOTA PALEMBANG.....</b>	<b>85</b>
A. Palembang: Sketsa Sejarah Dan Perkembangan....	85
B. Peta Usaha Produktif di Kota Palembang Masa Pandemi Covid.....	92
C. Partisipasi Perempuan Kota Palembang Pada Usaha Produktif .....	97
D. Gerakan Baitul Mal Wa Tamwil Untuk Pengembangan Usaha Perempuan Palembang .....	111
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>127</b>
A. Partisipasi Perempuan Dalam Pengembangan Usaha Produktif <i>Era New Normal Life</i> di kota Palembang.....	127
B. Sinergitas Antara Perempuan Palembang dan Baitul Mal Wa Tamwil Untuk Usaha Produktif di Palembang .....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>160</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>173</b>
<b>INDEKS.....</b>	<b>175</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membantah pandangan bahwa gerakan usaha mikro produktif perempuan tidak mampu berkembang dan bekerjasama dengan Lembaga usaha mikro Syari'ah karena ketidak mampuan mereka mengembangkan manajemen rumah menjadi manajemen sederhana yang dapat dievaluasi, serta lemahnya pengetahuan perempuan dalam mengelola usaha, serta sikap perempuan yang membangun usaha sebagai “pekerjaan sampingan”<sup>1</sup>. Penelaahan atas hal tersebut diawali dengan menganalisis dan menemukan dari upaya promosi kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan sebagai salah satu tujuan pembangunan milenium yang digariskan dalam Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi oleh para pemimpin dari 189 negara pada KTT Milenium pada bulan September 2000.

Upaya menganalisis pemberdayaan perempuan pada usaha produktif dengan mendayagunakan lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, yang dikenal dengan *Baitul Mal Wa Tamwil* di wilayah kota Palembang yang dikenal dengan miniatur Indonesia<sup>2</sup>. Hasil studi ini menjadi bagian penting temuan

---

<sup>1</sup> Lihat hasil studi Heri Junaidi, *Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Pesisir Laut Sungsang, Kabupaten Banyu Asin II Sumatera Selatan*, Palembang: Rafah Press, 2019; sebagai perbandingan lihat juga “ *Jorge López, Alicia Ramírez, Pilar Casado*, “Modelling Entrepreneurial Attitudes in Women Entrepreneurs with Bayesian Networks”, *Journal Psychology*, Vol.3 No.3, March 20, 2012; Rizki Kusumadewi Saputri, Fathul Himam, “Mindset Wanita Pengusaha Sukses”. <https://journal.ugm.ac.id>, Published 8 August 2015.

<sup>2</sup>Palembang adalah ibukota propinsi Sumatera Selatan yang mempunyai penduduk dari berbagai suku, etnis, dan agama di seluruh kawasan Sumatera Selatan. Yang terbagi dalam masyarakat majemuk dan

untuk menjadikan muara baru lembaga keuangan mikro bersinergi dengan pemberdayaan perempuan pada usaha produktif di *era new normal life*<sup>3</sup>, dan juga memberikan argumen yang kuat untuk menantang persepsi sosial tradisional mengenai peran perempuan dan lembaga Micro finance Syari'ah.

Berbagai studi menyimpulkan pergeseran pemikiran dan gerakan pengarusutamaan gender di negara negara muslim semakin menunjukkan perkembangan. Didasarkan pada penelitian sejarah sejarah abad ke-7 terdapat dinamika gender dimana para perempuan Muslimah selalu memainkan peran aktif dalam menegosiasikan status dan hak-hak mereka

---

masyarakat di diami oleh mayoritas suku, etnis, atau agama tertentu. Hasil studi menyebut Palembang sebagai miniatur bangsa Indonesia. Dari data terakhir didapatkan bahwa di Palembang telah berdiam ragam suku dan etnis, dengan agama yang dianutnya Adalah Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. lihat misalnya Supriyanto, et el, *Indonesia Lintasan Sejarah Budaya Sumatera Selatan*, Palembang: Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tk-I Sumatera Selatan-UNSRI, tt, h. 1

<sup>3</sup> Era New Normal Life sejak berkembangnya wabah covid 19 yang pada level internasional yang dikeluarkan oleh John Hopkins Coronavirus Resource Center menunjukkan, sudah 1.854.464 orang positif, meninggal 114.331, dan sembuh 435.074 (13/4). Melihat jumlah individu yang terdampak, tak salah Covid-19 sudah menjadi pandemi, Sejak pemerintah Republik Indonesia mengumumkan secara resmi kasus positif Covid-19 pada 2 Maret 2020 yang terkonfirmasi telah menyebar ke 32 provinsi di seluruh Indonesia. Data terkini telah terkonfirmasi 4.557 positif, 399 meninggal, dan 380 sembuh. Dampak pada level *grass root*, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan 64 juta unit UMKM menyerap 117 juta tenaga kerja atau setara 94 persen dari total tenaga kerja (BPS, 2018), dampak juga sampai institusi keuangan mikro (syariah) terdiri atas institusi yang berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Koperasi/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS). Lalu, institusi keuangan mikro syariah (IKMS) Baitul Maal wat Tamwil atau BMT yang berada di bawah pengawasan OJK dengan jumlah yang sangat signifikan sekitar 5.500. Bagus Aryo, "Dampak Covid-19 Bagi BMT", Media Republika, 15 April 2020

ketika menghadapi kekuatan-kekuatan patriarkal yang akan membatasi hak-hak mereka serta mendistorsi visi egalitarian Islam<sup>4</sup>. Berbagai bukti memperlihatkan hal tersebut. Ibn Sa'd menyatakan bahwa Rasulullah Saw memiliki 529 sahabat perempuan, diantara mereka merupakan para perawi hadits<sup>5</sup>. Abou El-Fadl juga menyatakan bahwa perempuan telah berperan dalam pengembangan hukum Islam awal, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perawi dan pembuat hukum. Menurut para sarjana tersebut, masa awal Islam memiliki standar sebagai sebuah memori kolektif bagi Muslim untuk beragumen mengenai visi egalitarian Islam<sup>6</sup>.

Dalam perkembangannya, Rohil Zilfa mislanya, dalam jurnalnya menunjukkan bahwa mulanya di beberapa negara muslim masih terjadi domestifikasi dan subordinasi perempuan melalui interpretasi agama yang selektif dan tradisional, terjadi perkembangan dan pergeseran dalam keterlibatan perempuan di bidang pendidikan melalui pengarusutamaan gender oleh pemerintah masing masing dalam mengembangkan sumber daya manusia. Hadirnya regulasi yang ditetapkan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam masalah ketidaksetaraan gender dan upaya

---

<sup>4</sup>Lebih luas lihat Leila Ahmad, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, New Haven and London: Yale University Press, 1992, h. 63.

<sup>5</sup>Khaled Abou El-Fadl, "Legal and Jurisprudential Literature: 9<sup>th</sup> to 15<sup>th</sup> Century", dalam Suad Joseph (ed.), *Encyclopedia of Women in Islamic Cultures*, Leiden; Boston, Mass.: Brill, 2003-2007, Vol. 1, h.38.

<sup>6</sup>Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women*, Oxford: Oneworld, 2001, h. 75; Sebagai perbandingan lihat juga Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Mary Jo Lakeland (trans.), Oxford: Basil Blackwell, 1991, h. 11-12.



membangun kesetaraan dan keadilan proporsional sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia<sup>7</sup>.

Studi antropolog Nurul Ilmi Idris menilai pada 1970 an antropologi wanita subyeknya adalah perempuan, berkembang pada tahun selanjutnya dengan subyeknya perempuan dan laki-laki dan hubungan perempuan dan laki-laki, serta bagaimana konstruksi dari kategori keduanya<sup>8</sup>, ia juga menilai dari berbagai pemikiran seperti Pine<sup>9</sup>, Lamphere<sup>10</sup>, McGee dan Warm. p<sup>11</sup> yang menilai pergeseran dan perkembangan tidak semata pada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tapi juga pada perbedaan yang terjadi di antara perempuan sendiri. Asumsi yang dibangun bahwa perempuan merupakan kelompok yang homogen karena mereka bersama-sama memiliki posisi subordinat di bawah laki-laki<sup>12</sup>.

Pergeseran terjadi juga pada berkeadilan dan kultur ramah perempuan. Pada awalnya mengkaji ranah kehidupan keluarga, rumah tangga dengan berbagai persoalan berbasis patriarkhi (Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perkawinan,

---

<sup>7</sup>Rohil Zilfa, “Studi Komparatif Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan Islam di Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, dan Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 5(2), Vol. 5 No. 2 (2017), <https://doi.org/10.15642/jpai.2017.5.2.264-287>

<sup>8</sup>Nurul Ilmi Idris, “Antropologi Feminis: Etnografi, Relasi Gender dan Relativisme Budaya di Indonesia”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Volume, 30. Nomor 3, 2006, h. 272

<sup>9</sup>Lihat Pine, F. “Gender”, dalam A. Barnard dan J. Spencer (peny.) *Encyclopedia of Social and Cul- tural Anthropology*. New York: Routledge. 1996 ., h. . 157–210

<sup>10</sup>Lamphere, L. “Gender,” dalam D. Levinson dan M. Ember (peny.) *Encyclopedia of Cultural An- thropology* Vol. 2. New York: Henry Holt and Co. 1996, h. 488–493.

<sup>11</sup> McGee, R.J. dan R.L. Warm, *Anthropological Theory: An Introductory History*. London: Mayfield Publishing Com- pany. 1996

<sup>12</sup> Nurul Ilmi Idris, “Antropologi Feminis: Etnografi, Relasi Gender dan Relativisme Budaya di Indonesia”, h. 273

perceraian, anak)<sup>13</sup> hingga reinterpretasi dan aktualisasi pesan kitab suci<sup>14</sup>. Gerakan reformulasi berwawasan gender<sup>15</sup>, Kepemimpinan, domestifikasi dan peran ganda<sup>16</sup>, hak hak reproduksi perempuan dan determinisme biologis sebagai faktor dominan dalam menentukan peran ranah domestik dan publik<sup>17</sup> hingga berbagai hukum Islam atas gender<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup>Sebagai contoh lihat pandangan Fatima Mernisi., *Beyond The Veil, Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria dan Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*, Surabaya: al-Fikr, 1997. Masyarakat tradisional di Indonesia sampai sekarang masih sangat erat memegang tradisi bahwa laki-laki adalah pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai pengasuh (*nurturer*). Konotasi asimetris tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menganut sistem budaya patriarki. Budaya ini oleh Marla Mies dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan kaum laki-laki pada tempat yang lebih tinggi dan mendominasi daripada kaum perempuan.lebi luas atas hal tersebut lihat Marla Mies, *Patriarchy And Accumulation On a World Scale: Women In The International Division Of Labour*, Avon: The Bath Press, 1986, h. 37.

<sup>14</sup>Lihat misalnya A. Dwiyanto, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996; Abdul Djamil, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Semarang: PSJ Walisongo dan Gama Media, 2002.

<sup>15</sup> Lihat misalnya Nasaruddin Umar, "Reformulasi Tafsir Berwawasan Gender", dalam Nasaruddin Umar, et el, *Membangun Kultur Ramah Perempuan: Reinterpretasi dan Aktualisasi Pesan Kitab Suci*, Jakarta: Restu Ilahi, 2004, h. 26-49; Alimin Mesra, "Menyoal Citra Buruk Perempuan: Reinterpretasi Peran Hawa dan Zulaikha", Dalam Nasaruddin Umar, et el, *Membangun Kultur Ramah Perempuan: Reinterpretasi dan Aktualisasi Pesan Kitab Suci*, h. 50-86 sebagai perbandingan lihat Riffat Hassan," Teologi Perempuan Dalam Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 4/1991

<sup>16</sup>Lihat seperti Muhammad Taufiq Hidayat, "Integrasi atau Marginalisasi Perempuan Dalam Pembangunan", dalam Nasaruddin Umar, et el, *Membangun Kultur Ramah Perempuan: Reinterpretasi dan Aktualisasi Pesan Kitab Suci*, h. 256-301; lihat juga Ara, Faisar Ananda, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004

<sup>17</sup> Lebih luas lihat Asghar Ali Engineer., *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Jogjakarta: Benteng, 1990; Mansour Fakih, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam Tim

Gerakan kemitrasejajaran dalam dunia pendidikan juga menjadi kajian pada era 1990 an mengalami pergeseran terutama dalam kajian pendekatan menuju pembangunan. Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) dalam salah satu pernyataan atau kesepakatannya menegaskan bahwa *pendidikan perempuan* merupakan instrumen yang paling berkuasa untuk melakukan perubahan jika tujuannya adalah meraih kualitas bangsa yang baik. *The Beijing Declaration and Platform for Action, 1996 (Gender Education and Development, International Centre of the ILO)* menyatakan bahwa pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia dan merupakan alat penting bagi pencapaian kesetaraan, perkembangan, dan kedamaian.

Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan, baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada akhirnya akan mempermudah terjadinya kesetaraan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki dewasa. Upaya menguatkan perempuan dalam pendidikan seiring dengan pendekatan *Women in Development (WID)*<sup>19</sup>, *Women and Development (WAD)*<sup>20</sup> dan *Gender and*

---

Risalah Gusti (peny), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

<sup>18</sup> Seperti kajian Nasaruddin Umar, “Vasektomi Menurut Kacamata Islam: Prinsip Maslahat Dalam Pelaksanaan Hak Hak Reproduksi”, Dalam Nasaruddin Umar, et el, *Membangun Kultur Ramah Perempuan: Reinterpretasi dan Aktualisasi Pesan Kitab Suci*, h. 119; Lihat juga Nasaruddin Umar, “Aborsi Dalam Pandangan Agama Agama Samawii”, Dalam Nasaruddin Umar, et el, *Membangun Kultur Ramah Perempuan: Reinterpretasi dan Aktualisasi Pesan Kitab Suci*

<sup>19</sup>*Women in Development (WID)* didasarkan pada teori modernisasi dan feminis liberal yang bertujuan untuk mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan. Dalam pendekatan WID lebih menekankan posisi produktif dalam tenaga kerja perempuan dengan dua sasaran yaitu pentingnya prinsip egalitarian dan menitikberatkan pada

*Development* (GAD)<sup>21</sup> semuanya berdasarkan pada upaya menjadi perempuan dapat hadir di sektor pembangunan dengan konstruksi pengarusutamaan gender<sup>22</sup>.

Pergeseran tersebut terlihat dari berbagai kajian isu *doing gender* dalam penguatan perekonomian keluarga tidak menjadi persoalan. Persoalan utama adalah bagaimana fondasi ekonomi keluarga dapat terjamin “sehat”. Disamping itu stratifikasi dalam rumah tangga walau dalam kesimpulan

---

pengadaan program yang dapat mengurangi atau menghapuskan diskriminasi yang dialami oleh para perempuan di sektor produksi.

<sup>20</sup> *Women and Development* (WAD) adalah pandangan *Neo-Marxist* berpijak pada asumsi bahwa perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam pembangunan. WAD mengadvokasikan bahwa baik wanita bekerja yang dibayar ataupun tidak dibayar sama pentingnya dalam pembangunan..

<sup>21</sup> *Gender And Development* (GAD) memandang pentingnya partisipasi negara dalam menunjang emansipasi perempuan dan negara memiliki tugas untuk menyediakan jasa sosial yang selama ini disediakan oleh perempuan secara individual seperti peralatan anak dan kesehatan, berpijak pada analisis kelas, ras, gender, dan pembangunan,

<sup>22</sup>Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, *Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di 9 Sektor Pembangunan*, Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006, h. 105. Istilah Pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming* adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan, dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. ujian pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Lebih jelas lihat UU No. 7 Tahun 1984 dan Permendagri No. 67 TAHUN 2011. Lihat juga Strategi Pengarusutamaan, Gender – Jakarta: ILO Jakarta 2003-2005;

nampak “mengangkat” salah satu jenis kelamin namun tetap memiliki api dalam sekam yang pada akhirnya terkristal dalam bentuk pemberontak akibat budaya relasi kuasa dalam rumah tangga.

Penegasan asumsi dari beberapa kesimpulan dalam pembahasan mengenai ekonomi dan ketahanan keluarga yang telah meminggirkan persoalan gender dinilai awal dari ekspektasi atas konsep dasar bahwa bangunan rumah tangga tidak terlepas dari pembagian peran struktur anggotanya merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi sebagai isu gender tidak lagi menjadi persoalan<sup>23</sup>. Kesimpulan atas hal tersebut dari sisi penerimaan umum yang muncul dalam implementasi kehidupan rumah tangga di mana laki-laki dan perempuan menghabiskan banyak waktu secara tak tergabungkan, namun memelihara wacana ketidakmandirian perempuan secara ekonomi dalam spirit bersama melalui kuasa perempuan dalam ranah domestik.

Kesimpulan yang dimaksud seperti adanya teori Denys Lombard<sup>24</sup> dan Clifford Geertz<sup>25</sup> seperti dikutip dari

---

<sup>23</sup> CIDA pada tahun 1997 menyimpulkan Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumber daya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk perbedaan tersebut antara lain pada (1) akses terhadap sumber produktif, seperti tanah, modal, hak kepemilikan, kredit, serta pendidikan dan pelatihan, (2) kontrol terhadap penggunaan tenaga kerja keluarga, (3) pembagian kerja yang tidak seimbang akibat adanya beban kerja reproduktif yang diemban perempuan, (4) perbedaan konsumsi makanan, obat-obatan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, (5) dan perbedaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Lihat “Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan”, Jurnal Analisis Sosial, Vol.8, No. 2 Oktober 2003, hal. v

<sup>24</sup>Lihat Denys Lombard, *Nusa Jawa : Silang Budaya : Kajian Sejarah Terpadu*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000; sebagai perbandingan lihat juga Christina S Handayani; Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, Yogyakarta : LKiS : Distribusi, LKiS Pelangi Aksara, 2004

Heri Junaidi yang menyebut adanya dominasi kuasa perempuan dalam keluarga masyarakat Jawa. Studi Denys Lombard yang menyebutkan bahwa para perempuan di Indonesia memegang peranan penting yang sangat menonjol dan berkedudukan jauh lebih tinggi dari pada perempuan pada masyarakat Asia lainnya, kekuasaan mereka, sekalipun dari belakang layar, tapi ampuh dan bersumber pokok pada perkumpulan mereka<sup>26</sup>. Brenner menganalisis konstruksi rumah tangga masyarakat Solo di Jawa Tengah mempunyai kekuasaan tersendiri, karena laki-laki menugaskan mereka untuk mengurus pembelanjaan dan uang kontan dari pemasukan<sup>27</sup>.

Kajian dan pengembangan teori pemberdayaan perempuan sebagai jawaban bagaimana fondasi ekonomi keluarga dapat terjamin “sehat” di era *new normal life* menjadi kajian yang menjadi perhatian. Upaya tersebut tidak lepas dari pengembangan langkah kaum perempuan kontemporer seperti hasil studi Irzum Farihah yang menyimpulkan bahwa kaum perempuan kontemporer telah mempunyai kemandirian di bidang ekonomi, Mereka yang mempunyai penghasilan sendiri, di satu sisi dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan memperoleh penghasilan sendiri, sehingga perempuan dapat memenuhi kebutuhannya, dan sekaligus

---

<sup>25</sup>Clifford Geertz, *Local knowledge: Further Essays In Interpretive Anthropology*, USA: Basic Books, 2008.

<sup>26</sup>Heri Junaidi, *Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga pada Masyarakat Pesisir Laut Sungsang Kabupaten Banyu Asin II*, Palembang, LP2M, 2017, h.2

<sup>27</sup>Suzanne April Brenner, *The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java*, USA: Princeton University Press, 1998. Sebagai perbandingan Shatifan, N. Gender Needs in Indonesia, , Laporan Identifikasi Proyek AusAID, Canberra, 2001.

dapat menyumbangkan pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga<sup>28</sup>. Perubahan tersebut seiring dengan terbukanya konstruksi Partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan aktifitas ekonomi keluarga, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi<sup>29</sup>.

Pada masyarakat di berbagai strata baik di kota dan di desa desa-desa yang melakukan berbagai klasifikasi pekerjaan model baru ini tidak mengubah secara total keputusan-keputusan keuangan. Dua penelitian yang berbeda,

---

<sup>28</sup> Irzum Farihah, “ Etos Kerja Dan Kuasa Perempuan Dalam Keluarga: Studi Kasus Keluarga Nelayan, Di Brondong, Lamongan, Jawa Timur”, *Jurnal Palastran* Vol. 8, no. 1, Juni 2015, hal. 145

<sup>29</sup> Janet Carsten, *Money and Morality of Change*, Australia: Cambridge University, 1989, hal. 131. Sebagai perbandingan Hasil penelitian tahun 1995 an menunjukkan bahwa kaum perempuan yang jumlahnya separuh populasi dunia ternyata hanya memiliki seperseribu jumlah kekayaan dunia dan hanya menerima 10 persen dari total gaji dunia. Demikian pula kemiskinan dunia semakin meningkat di kalangan perempuan (*the feminisation of poverty*) dimana data UNDP 1995 menunjukkan dari 1 milyar penduduk miskin, 70 persennya merupakan perempuan. Dalam hal ekonomi, negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim memiliki tingkat partisipasi ekonomi perempuan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara non Muslim dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama. Pada tahun 1995 tingkat partisipasi kerja perempuan di negara mayoritas Muslim sebesar 21.7 persen dibandingkan rata-rata 38.1 persen di negara-negara berkembang. Sementara itu tingkat kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. fakta memperlihatkan bahwa setiap tahun ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, perempuan dan gadis dijual seluruh dunia sebagai budak dan pekerja seks. Lihat beberapa hasil studi seperti Peggy Antobus, *The Global Women's Movement: Origins, Issues, and Strategies*, London: Zed Books, 2004, h. 10; UNDP, *Human Development Report 1995*, (New York and Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 20; K. Weeks, (1988), ‘The Demography of Islamic Nations’, dalam *Population Bulletin*, 43 (4), December, 1988, h. 5-54 dan UNDP, *Human Development Report: Cultural Liberty in Today's Diverse World*, New York: UNDP, 2004;<sup>4</sup> World Bank, *World Bank World Tables*, Oxford: Oxford University Press, 1999, h. 15-16.

Viktor. T. King menilai kontrol suami terhadap uang bukan tanda penaklukkan perempuan, melainkan lebih kepada sesuatu yang sifat perannya agak berbeda. Sementara Rudie juga menyebutkan peranan ini sebagai etos “duosentrik” yakni pemisahan peranan tertentu dalam pernikahan, yang ‘terpisah namun saling bekerja sama’. Namun Rudie berpendapat bahwa ‘duosentris’ dari rumah tangga Melayu berlanjut, di beberapa kasus otonomi keuangan perempuan telah berkurang, ekspektasi mereka mengenai pemisahan dan kerjasama secara sejajar dari suami mereka telah mengalami perubahan<sup>30</sup>.

Dalam perkembangan kekinian, angka perempuan pekerja di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesempatan belajar bagi perempuan, keberhasilan program keluarga berencana, banyaknya tempat penitipan anak dan kemajuan teknologi yang memungkinkan perempuan dapat menyelesaikan masalah keluarga dan masalah kerja sekaligus. Dampak penting lain yang disimpulkan bahwa peningkatan partisipasi kerja perempuan juga mempengaruhi konstelasi pasar kerja satu sisi dan satu sisi lain menumbuhkembangkan pergeseran relasi kuasa dalam rumah tangga<sup>31</sup>.

Loekman Soetrisno menyatakan bagi perempuan Indonesia di daerah tertinggal dan tingkat ekonomi rendah peran ganda bukanlah sesuatu hal yang baru namun sudah menjadi sebuah *struktur given* yang telah ditanamkan oleh

---

<sup>30</sup>Ingrid Rudie, *Visible Women in East Coast Malay Society*, Oslo: Scandinavian University Press, 1994. Hal. 15

<sup>31</sup>Antho Mudzhakar, et,el, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. 2001,hal. 189; lihat juga Masika, R & Joekes, S. *Employment and Sustainable Livelihoods: A Gender Perspective*, Laporan No 3, Swedish International Development Cooperation Agency,tt



para orang tua mereka sejak mereka masih berusia muda. Perempuan muda tersebut tidak bisa melakukan aktifitas bermain bebas seperti layaknya remaja lainnya karena terbebani kewajiban bekerja untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Karenanya dalam beberapa temuan perempuan keluarga miskin tidak terlalu memperdulikan pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh yang secara gaji tidak terlalu mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari seperti bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang upah kecil dan pengasuh anak dengan upah yang minimum<sup>32</sup>.

Sejalan dengan hal tersebut paradigma pembangunan Indonesia mulai bergeser dari pembangunan yang *top down* kepada pembangunan dari bawah (*bottom up*). Pembangunan tidak hanya bersifat linier dan tidak hanya melibatkan aparatur pemerintahan saja. Paradigma pembangunan menjadi "*Pembangunan Partisipatif*". Hal ini dilandasi oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari sisi ini pemberdayaan perempuan mulai berkembang di Indonesia. Ini artinya ada perubahan mendasar dimana perempuan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan yang berdaya terutama ikut membantu perekonomian keluarga berbasis kemampuan masing masing<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup>Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius. 1997, hal.94. lihat juga Mayling Oey-Gardiner et el, *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 199,7, hal. 293

<sup>33</sup> Lihat Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004, h.7; sebagai perbandingan Prijono, Onny S.& A.M.W. Pranarka (eds.), *Pemberdayaan: Konsep*,

Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional dikutip dari Riant Nugroho mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan, yaitu: 1) akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan; 2) partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut; 3) kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut; 4) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara<sup>34</sup>. Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan.

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas<sup>35</sup>.

Berbagai pemberdayaan perempuan di Indonesia telah banyak dilakukan melalui indikator pemberdayaan dan langkah langkah tersebut, termasuk berbagai aturan atas pemberdayaan perempuan seperti Undang-Undang Republik

---

*Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. 1996, h. 55

<sup>34</sup> Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Universitas Sumatera Utara. 2008, h. 17

<sup>35</sup> Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*, h.18

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk juga dibentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di Indonesia<sup>36</sup>.

Seiring dengan gerakan partisipasi perempuan tersebut mulai memasuki ranah pengembangan usaha produktif dalam upaya memberikan kontribusi secara ekonomi baik pada dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Bina kesadaran tersebut mendukung tumbuhnya jiwa kewirausahaan dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi. Beberapa contoh industri rumahan berupa kerajinan tangan, tenun, menjahit pakaian, membuat makanan olahan, warung sembako, warung makan. Perempuan di pedesaan banyak menjalankan kegiatan usaha di pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil dan perdagangan.

---

<sup>36</sup> Dalam sejarahnya tahapan pembangunan pemberdayaan perempuan diawali dengan Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, berganti nama pada 1988 dengan sebutan Menteri Negara Peningkatan Peranan, kemudian berubah nama pada 1999 dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, sampai kemudian pada tahun 2014 berubah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA )

Problem yang hadir kemudian adalah peran lembaga perbankan dan lembaga non perbankan dalam upaya mensupport gerakan pemberdayaan perempuan tersebut belum maksimal. Kelayakan keuntungan yang “rendah” ditambah manajemen tradisional melalui usaha dikelola turun temurun tanpa ada perencanaan dan pembukuan usaha. Konsep dasar “yang penting berjalan, tidak rugi, dan mampu menambah pendapatan rumah tangga” menjadi adigium dalam aktifitas mereka. Beberapa alasan tersebut menjadikan usaha produktif tersebut belum maksimal dan belum menjadi target kebersamaan dengan berbagai kemitraan dunia perbankan maupun pengusaha besar untuk membangun maksimal<sup>37</sup>.

Hadirnya *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) atau lembaga Keuangan Mikro DI Indonesia terus berkembang sejak diperkenalkan pada awal 2000-an. Lembaga yang diawasi dan dibina Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut mengalami pertumbuhan signifikan. Berdasarkan data Permodalan BMT (PBMT) ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT di 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum<sup>38</sup>.

*World Giving Index* menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang

---

<sup>37</sup> Lihat misalnya Masrizal, Bahrein T. Sugihen, Hasanuddin, *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019

<sup>38</sup>Sri Cahyaning Umi Salama, “Babak Baru BMT di Indonesia”, diakses dari [www.medcom.id](http://www.medcom.id),

murni lahir dengan kekhasan Indonesia yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi amil (*Baitul Maal*) dan fungsi pembiayaan (*Baitut Tamwil*). Akan tetapi, meski perkembangan dan praktik BMT sudah sangat meluas di Indonesia, ditandai dengan sudah berdirinya sekitar 4.500 unit BMT di seluruh Indonesia (PBMT, 2018), masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi oleh sektor ini, khususnya terkait *sustainability* lembaga, sehingga kebermanfaatannya dalam mengentaskan kemiskinan dan memandirikan ekonomi masyarakat menjadi tidak optimal, termasuk pengembangan usaha produktif oleh kaum perempuan<sup>39</sup>. Upaya menguatkan babak baru *Baitul Mal Wa Tamwil* tersebut diperlukan berbagai kajian terutama atas aktifitas BMT di kota Palembang untuk mensinergikan partisipasi perempuan dalam pengembangan usaha produktif di Kota Sriwijaya Palembang

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Partisipasi Perempuan Dalam Pengembangan Usaha Produktif *Era New Normal Life* di kota Palembang?
2. Bagaimana *Baitul Mal Wa Tamwil* Di Palembang membangun Sinergi dalam pemberdayaan perempuan pada usaha produktif?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Umum**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan partisipasi perempuan di kota Palembang dalam pengembangan usaha produktif di *era new normal life* baik

---

<sup>39</sup>KnKs, “ Penyusunan Roadmap Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia”, diakses dari [knks.go.id/isuutama](http://knks.go.id/isuutama)

dari sisi kelemahan maupun kelebihan, kemudian mengetahui dan menjelaskan aktifitas dan perkembangan *Baitul Mal Wa Tamwil* di Palembang.. Dari hasil tersebut ditemukan model *Baitul Mal Wa Tamwil* yang bersinergi untuk meningkatkan partisipatif perempuan dalam membangun pemberdayaan melalui usaha produktif berkesinambungan dan berdaya gunakan untuk peningkatan ekonomi keluarga.

## **2. Khusus**

Upaya untuk mencapai target pada tujuan umum tersebut dilakukan dengan melakukan berbagai langkah langkah baik dengan menggali berbagai data dan informasi dari jurnal, karya dan literatur mengenai pokok bahasan, pendalaman kajian dengan melakukan dialog baik langsung dengan Responden dari praktisi BMT di Kota Palembang, dunia usaha maupun penggiat gender, termasuk didalamnya menyajikan berbagai data tentang aktifitas pengarusutamaan gender di kota Palembang sebagai upaya kalobarasi untuk menemukan berbagai rekomendasi kebijakan maupun kebaruan pola sinergi antara lembaga dan penggiat gender.

## **D. Literature Review**

Berbagai studi atas pemberdayaan perempuan dan *baitul wa tamwil* maupun studi pemberdayaan perempuan telah banyak dilakukan. Penelitian fokus terhadap pemberdayaan perempuan seperti Wahyu Tjiptaningsih yang menelaah pelaksanaan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan kecendrungan deskriminasi dan kualitas pemberayaan perempuan<sup>40</sup>. Studi terhadap peran

---

<sup>40</sup> Wahyu Tjiptaningsih, Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten

perempuan dalam pembangunan dilakukan oleh Rini Rinawati<sup>41</sup>, Marthalina<sup>42</sup> keduanya menelaah peran perempuan dalam membangun pemberdayaan yang mengalami kendala akibat masih rendahnya kepercayaan dunia perbankan terutama dalam pemberian kredit permodalan, sementara Dwi Listia dalam jurnalnya berjudul Pengembangan Program Usaha Ekonomis Produktif Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Sumenep yang menyimpulkan tingkat partisipasi perempuan yang rendah dalam melakukan pengembangan usahanya dan upaya perempuan Sumenep melakukan sinergi dengan program pengembangan ekonomi pedesaan<sup>43</sup>

Muntaha Banihani dalam jurnalnya berjudul *“Empowering Jordanian Women Through Entrepreneurship”* yang juga berangkat antara posisi perempuan dalam masyarakat dan pembangunan ekonomi yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi negara. Meskipun perempuan memiliki dampak dalam hal kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, peran perempuan pengusaha seringkali diremehkan dan diremehkan, hal tersebut

---

Cirebon), *Reformasi : Jurnal Ilmiah Administrasi*, Nomor 1 Jilid 2 Maret 2017, h. 28

<sup>41</sup> Rini Rinawati, “Partisipasi Wanita Dalam Pembangunan: Kajian Gender mengenai Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Partisipatif melalui Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Mimbar*, Volume XX No. 3 Juli – September 2004, 387 - 405

<sup>42</sup> Marthalina, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018: h. 59 – 76

<sup>43</sup> Dwi Listia Rika Tini, “Pengembangan Program Usaha Ekonomis Produktif Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Sumenep”, *JISOP (Jurnal Inovasi Sosial Politik)*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2019, h. 148

disimpulkannya bahwa bahwa perempuan pengusaha di Yordania masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait tanggung jawab keluarga, jaringan, dan mobilitas fisik. Batasan makalah ini memberikan argumen yang kuat untuk menantang persepsi sosial tradisional mengenai peran perempuan<sup>44</sup>.

Hasil studi Kai Spratt, Dima Toukan et el menyebut bahwa sebagian besar orang di Yordania percaya bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik, tetapi mayoritas dari mereka (63 persen) mendukung prinsip umum kesetaraan gender, namun antusiasme terhadap kesetaraan gender dalam politik, ekonomi, dan kehidupan keluarga kurang, dan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Studi mereka menyimpulkan bahwa . Data jajak pendapat publik di Yordania menemukan bahwa hanya 44 persen pria yang setuju bahwa wanita dan pria harus memiliki hak yang sama, dibandingkan dengan 82 persen wanita, sementara 57 persen pria dan 42 persen wanita percaya pria adalah pemimpin yang lebih baik<sup>45</sup>. Pernyataan tersebut hampir sama dengan studi Carmen Friedric, Henriette Engelhardt dan Florian Schulz menyimpulkan bahwa perempuan di Timur Tengah dan Afrika Utara Meskipun perkembangan sosial ekonomi dan pencapaian pendidikan perempuan meningkat, nilai-nilai patriarki masih mendominasi dan menempatkan perempuan

---

<sup>44</sup> Muntaha Banihani, "Empowering Jordanian Women Through Entrepreneurship", *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship* · May 2020

<sup>45</sup> Kai Spratt, Dima Toukan, Summer Lopez and Namar Kayed, "Women's Leadership As A Route To Greater Empowerment (Jordan Case Study)", USA: Management Systems International Corporate Offices, Usaid, h. 1



pada peran subordinat<sup>46</sup> .

Sinaria Abdel Jabbar, dan Haidar Ibrahim Zaza dalam artikelnya berjudul “*Evaluating a vocational training programme for women refugees at the Zaatari camp in Jordan: women empowerment: a journey and not an output*” menemukan bahwa program pelatihan kejuruan bertajuk 'Oasis Wanita dan Anak Perempuan' di Kamp Pengungsi Zaatari di kota Mafraq, Yordania berdampak meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri perempuan, meningkatkan bisnis pekerjaan, dan keterampilan kewirausahaan, membantu mereka menghasilkan pendapatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka yang hancur; dan memberi mereka harapan dan kesempatan setelah mengalami perang secara langsung. Studi tersebut mengungkapkan bahwa dalam komunitas pengungsi, pola didekonstruksi dan peran gender dapat diubah; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ini dilihat sebagai tambahan untuk pembangunan berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan milenium<sup>47</sup> .

Dari penelitian tersebut sejalan dengan Azita Berar Awaad dan Frank Hagemann yang memperlihatkan bahwa gerakan pengarusutamaan gender melalui pemberdayaan perempuan di Yordania memiliki kekhasan tersendiri, terutama prioritas pengembangan produktifitas perempuan

---

<sup>46</sup> Carmen Friedric, Henriette Engelhardt dan Florian Schulz, “Women’s Agency in Egypt, Jordan, and Tunisia: The Role of Parenthood and Education”, diakses dari [link.springer.com/article](http://link.springer.com/article), 2020; h.1

<sup>47</sup> Sinaria Abdel Jabbar, dan Haidar Ibrahim Zaza dalam artikelnya berjudul “*Evaluating a vocational training programme for women refugees at the Zaatari camp in Jordan: women empowerment: a journey and not an output*”, International Journal of Adolescence and Youth, Volume 21, 2016, h.2-4

pada pengungsi perempuan dan janda<sup>48</sup>. Dalam Beberapa studi juga memperlihatkan seperti hasil studi Daniel Jordan Smith<sup>49</sup> dan Jose salem<sup>50</sup> yang menemukan bahwa meningkatnya aspirasi dan peluang, tantangan ekonomi, dan kewajiban kekerabatan yang membebani perempuan memaksa sebagian perempuan muda untuk bermigrasi dari pedesaan ke perkotaan. Banyak migran perempuan muda beradaptasi dengan tantangan kota melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang dapat memberikan sumber pencarian dimana fenomena ini secara tidak langsung merendahkan dan memberdayakan perempuan di negeri dalam sisi gelap, dari sisi lain bahwa perempuan di Jordan memiliki kesempatan yang tinggi dalam pembangunan negara namun memiliki partisipasi yang rendah karena pilihan peran domestik lebih utama.

Dalam mengkaji peran BMT pada pengembangan usaha perempuan telah banyak dilakukan. Seperti Maftukhasholihah dan Dwi Budiarto<sup>51</sup>, Irwanuddin<sup>52</sup>, dan

---

<sup>48</sup> Lebih luas lihat Azita Berar Awaad dan Frank Hagemann, *Promoting youth employment and empowerment of young women in Jordan (An assessment of active labour market policies)*, International Labour Office, Impact Report Series, Issue 9. Geneva: 2017

<sup>49</sup> Daniel Jordan Smith (2010), *Migration, gender and sexual economies: Young Women Migrant in negeri*, dalam *The International hand book Gender and Proverty*

<sup>50</sup> Salem-Pickartz J. (2002) *Women's Status in Jordan — Progress and Setbacks*. In: Fleßner H., Potts L. (eds) *Societies in Transition — Challenges to Women's and Gender Studies*. Studien interdisziplinäre Geschlechterforschung, vol 4. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. [https://doi.org/10.1007/978-3-663-11375-1\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-663-11375-1_12)

<sup>51</sup> Maftukhasholihah, Dwi Budiarto, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender dan Ekonomi" Studi Kasus Pengusaha UMKM Perempuan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT Palembang", *Jurnal i-finance*, Vol. 05, Nomor 01, 2019, h. 34-45

<sup>52</sup> Irwanuddin, "Peranan Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Ninik Sri Rahayu<sup>53</sup> keduanya mengkaji akses pengusaha perempuan pada BMT telah sensitif gender dengan memberikan kemudahan dalam pembiayaan, sehingga pendapatan mereka bertambah, namun hasil studi mereka belum memberikan konstruksi secara komprehensif dan masih bersifat kasuistis wilayah penelitian masing masing dalam membentuk sinergitas keduanya yang diterima luas. Disamping itu Segmen terbesar dari BMT adalah pedagang atau pengusaha mikro perempuan yang belum memiliki program-program yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan. Kajian khusus BMT seperti Amri<sup>54</sup>, Asfino dan Prabowo<sup>55</sup>, kemudian Kuswana N, Hamzah dan Aziz<sup>56</sup>.

Penelitian yang membahas peranan perempuan pada lembaga keuangan diteliti oleh Jordan Van Rijn<sup>57</sup> oyang membahas bahwa Studi sebelumnya tentang manajemen

---

Bagi Perempuan ( Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar), Jurnal *Laa Maisyir*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017, h. 57-80

<sup>53</sup>Ninik Sri Rahayu, “Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Bmt Di Kabupaten Sleman Yogyakarta), *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Volume 4, No. 3, September 2015, h. 162-188

<sup>54</sup> Amri, “Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Islamic Banking*, <https://doi.org/10.1111>

<sup>55</sup> Asfino, A. A., dan Prabowo, P. S. (2019). “Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM”, <http://diskopukm.jatimprov.go.id>

<sup>56</sup> Kuswana N, Hamzah dan Aziz, “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2016

<sup>57</sup> Jordan Van Rijn (2019), Does Ceo Gender Matter at Financial Institutions? Evidence From Credit Union CEO Transisitioisn. van Rijn, Jordan, Does CEO Gender Matter at Financial Institutions? Evidence from Credit Union CEO Transitions (November 27, 2019). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3316280> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3316280>

risiko dan terlalu percaya diri di perusahaan dan lembaga keuangan menunjukkan bahwa CEO wanita terlibat dalam praktik manajemen risiko yang lebih konservatif dibandingkan dengan CEO pria, dan perilaku pertumbuhan dan akuisisi yang kurang agresif, walaupun variasi masih dalam pembatasan hanya 5% CEO bank komersial dan 6% CEO perusahaan Fortune 500 adalah perempuan. Kami memeriksa perbedaan gender dalam manajemen risiko dan terlalu percaya diri dalam konteks berbeda dari koperasi keuangan nirlaba ("serikat kredit"), di mana mayoritas (52%) CEO adalah perempuan. Dalam nilai credit union yang dipimpin pria tumbuh 2,9% lebih besar dalam hal keanggotaan dan 5,9% lebih besar dalam hal pinjaman. Mereka juga memperluas bidang keanggotaan mereka untuk memiliki 8,2% lebih banyak anggota potensial, melaksanakan 2,8% lebih banyak akuisisi merger, dan meningkatkan biaya pemasaran mereka sebesar 7,5% dibandingkan dengan credit unions yang dipimpin oleh perempuan. Meskipun demikian, tidak ada perbedaan gender yang signifikan dalam pendapatan *credit union*.

Dari berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan pergerakan yang signifikan dalam pengarusutamaan gender dengan berbagai varian yang saling berhubungan dengan kondisi masing masing negara. Perbedaan dengan studi terdahulu penelitian ini terletak pada peran lembaga keuangan micro atas upaya pengembangan pemberdayaan perempuan melalui program program produktif yang berkesinambungan dengan program lembaga keuangan tersebut.

## **E. Landasan Teori**

Dalam studi ini menggunakan 2 teori utama yaitu teori Efisiensi berkeadilan Sri Edi Swasono yang berangkat

dari keyakinannya atas Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan hukum sistem ekonomi di Indonesia. Struktur utama teorinya tersebut dilatar belakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh Pasal 23, 27 Ayat (2), 34 serta Penjelasan Pasal 2 UUD 1945 yang dihubungkan dengan sila-sila dalam<sup>58</sup>. Menurutnya seperti dikutip dari Heri Junaidi bahwa nilai-nilai filosofis Efisiensi berkeadilan yang dibangun dalam satu kalimat memberikan nilai kekuatan ekonomi Indonesia untuk tetap berpijak pada kesejahteraan sosial. *Pertama*, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. *Kedua*, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. *Ketiga*, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. *Keempat*, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, Efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional<sup>59</sup>.

Dalam teori Efisiensi berkeadilan, Sri Edi menegaskan perilaku ekonomi bangsa tidaklah boleh semata-mata mempertimbangkan maksimalisasi keuntungan dan kepuasan dari para pelaku ekonomi tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain, terutama hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat 2. Sehingga berkeadilan

---

<sup>58</sup>Lihat Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010), h. 98-99;

<sup>59</sup> Heri Junaidi, *Efisiensi Berkeadilan Pada Kasus Usaha Songket Palembang*, Palembang: P3RF, 2010, h. 25

setelah kata Efisiensi seperti yang terdapat dalam pasal 33 ayat 4 tersebut memperlihatkan bahwa *individual preferences* dirubah menjadi *social preference*, dan *pareto efficiency* yang statis dirubah menjadi *pareto social-efficiency*.<sup>60</sup> Teori tersebut digunakan sebagai fondasi memahami posisi perempuan umumnya dan di Indonesia khususnya yang memiliki kepentingan untuk pengembangan ekonomi melalui usaha produktif yang dilakukan dalam upaya menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.

Penyatuan Efisiensi berkeadilan dalam satu kalimat untuk mentransformasi makna Efisiensi pada tataran ekonomi mikro maupun pada tataran ekonomi makro yang terbentuk dalam nilai-nilai keadilan. Memberikan kekuatan produktifitas selalu mengarah kepada kemasylahatan manusia secara menyeluruh dan juga sekaligus menekankan pentingnya Efisiensi sosial.<sup>61</sup> Dengan demikian, nilai-nilai Efisiensi berkeadilan juga bersama dengan asas kekeluargaan, sebab tidak akan ada keadilan tanpa berada dalam suasana kekeluargaan (ukhuwah wathoniah). Tanpa adanya asas kekeluargaan maka keadilan akan berarti perebutan, yang kuatlah yang akan menentukan apa adil bagi

---

<sup>60</sup>Konsep tersebut mengubah paradigma Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa, seperti pandangan Schultz yang menyebutkan bahwa sebuah sistem ekonomi dapat disebut efisien bila memenuhi kriteria berikut: (1) tidak ada yang bisa dibuat menjadi lebih makmur tanpa adanya pengorbanan; (2) tidak ada keluaran yang dapat diperoleh tanpa adanya peningkatan jumlah masukan; (3) tidak ada produksi bila tanpa adanya biaya yang rendah dalam satuan unit. Lihat Walter J. Schultz, *The Moral Conditions Of Economic Efficiency* (London: Cambridge University Press, 2001), 13.

<sup>61</sup>Lihat Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), 157.

si lemah, berlakulah di sini *peradaban homo homini lupus*. Sebaliknya, dengan dalam masyarakat yang melaksanakan asas kekeluargaan, keadilan akan terwujud sendiri.<sup>62</sup>

Teori kedua yang digunakan adalah teori *maqashid Syari'ah* untuk merealisasikan semua kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, dengan memberikan manfaat atau menghindarkan manusia dari bahaya dan kerusakan,<sup>63</sup> menjamin pemeliharaan tujuan dan maksud-maksud syari'ah, serta kelestarian sistim alam, dengan mengatur perilaku manusia agar tidak terjebak dalam kerusakan, melalui pencapaian maslahat yang dimaksud<sup>64</sup>. . Teori ini penting untuk studi ini sebab Chapra menilai Efisiensi sumber daya dalam perekonomian Islam ditentukan berdasarkan *maqashid* dimana tidak tercapainya realisasi al-Maqashid dipandang sebagai infisiensi (kesia-sian),<sup>65</sup> penetapan kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat* atau kebaikan, dan kesejahteraan umat manusia untuk pemeliharaan lima *maslahat* berdasarkan aturan shari'ah.<sup>66</sup>

Tiga tingkatan maslahat sebagai upaya membangun hal tersebut yaitu 1) *al- Riyah* sebagai maslahat pokok bagi kehidupan manusia, baik secara agama maupun kehidupan dunia. ketiadaan maslahat tersebut, merusak sendi kehidupan, hilangnya kenikmatan abadi dan menuai azab di akhirat

---

<sup>62</sup>Lihat Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan* (Jakarta: UNJ Press, 2005), 179-180.

<sup>63</sup> Al-Syatib, *alMuwafaqqat*, Beirut: Dar. al-Kutb alslamiyah t.t., jld. 2, h. 6

<sup>64</sup> Muhammad Umer Chapra, *Islam dan tantangan ekonomi*, Jakarta, IIT, 1996, h. 25

<sup>65</sup> Muhammad Umer Chepra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, 60.

<sup>66</sup> Ahmad Raisuni, *Naẓariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Beirut: al-Ma'had al-'Lami li al-Fikri al-Islami, 1995, 19. .

kelak. Pemeliharannya pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta; 2) Hajiah tidak menyentuh eksistensi hidup manusia, tapi hanya menyebabkan kesulitan dalam hidup, tidak menimbulkan masalah atas masalah pokok, sifatnya hanya untuk memenuhi kesenangan dan kenyamanan hidup; 3) Tahsiniyah yaitu masalah berkenaan dengan kemewahan hidup, tingkatannya tidak sepenting dua masalah di atas<sup>67</sup>.

Kedua teori tersedut dilakukan dengan pendekatan Gender Dalam Pembangunan, sebab Diakui ataupun tidak, perempuan telah cukup aktif dalam berbagai bidang kehidupan, walaupun kuantitas tidak sebanyak laki-laki dalam sektor publik. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan pembangunan masih netral Gender yang memberikan dampak tersendiri bagi perempuan. Kondisi netral Gender didasari atas asumsi bahwa kebijakan dan program dibuat memberikan manfaat dan berdampak sama kepada perempuan dan laki-laki. Padahal perempuan tidak akan pernah sama dengan laki-laki karena memiliki perbedaan kodrati dan Gender.

Upaya merekonstruksi pembangunan menuju pembangunan berwawasan Gender memerlukan rencana pembangunan responsif Gender dan sekaligus perubahan kebijakan pembangunan yang mengarah pada indentikasi ada tidaknya kesenjangan Gender dari sisi kekuasaan, status, dan kemampuan. 4 faktor utama sebagai identifikasi teori Gender dalam pembangunan adalah:

1. Profil Kegiatan. Yaitu bagaimana interaksi perempuan dalam salah satu proyek pembangunan dari sisi waktu, tempat kerja, beban kerja, pendapatan;

---

<sup>67</sup> Al-Syatib, *al-Muwafaqqat*, jld. 1, h. 38



2. Faktor akses, yang menilai tingkat keseimbangan dan persamaan dalam memperoleh akses kredit/modal, rumah, tanah, informasi, dan pendidikan;
3. Faktor kontrol dengan melihat tingkat penguasaan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima sumber-sumber daya pembangunan
4. Faktor partisipasi dengan melihat bagaimana perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam program pembangunan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Seperti contoh, dalam kepengurusan suatu usaha, berapa perbandingan jumlah pengurus laki-laki dan perempuan; berapa jumlah laki-laki dan perempuan sebagai anggota biasa, maupun sebagai simpatisan;
5. Faktor manfaat dari hasil pembangunan, mulai dari sisi pendapatan, sampai pada kesejahteraan yang didapat antara laki-laki dan perempuan<sup>68</sup>.

Dengan demikian usaha memahami hak-hak tersebut tidak lepas dari pengkajian mendalam tentang (1) pandangan sosial kedudukan laki-laki dan perempuan; (2) tipologi kebijakan itu sendiri; dan (3) kondisi objektif yang membentuk terjadinya pembagian hak dan kewajiban serupa itu. Hak dasar kebutuhan ekonomi, sebagai kebutuhan setiap individu warga masyarakat yang mesti diprioritaskan pemenuhannya; hal tersebut juga merupakan kebutuhan akan barang dan jasa paling besar dari secara kuantitatif, maka untuk itu juga diperlukan produksi yang besar pula; sehingga hal tersebut akan meningkatkan *demand* atas tenaga kerja, yang berarti akan mengurangi pengangguran.

---

<sup>68</sup>Eva Lidya, "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berwawasan Gender", *Artikel Umum*, Bulletin Bakohumas Kota Palembang, 2003, h. 6

Untuk membangun tersebut digunakan prinsip-prinsip keadilan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah *fundamental research*<sup>69</sup> dengan menggunakan pendekatan penelitian induktif yang bertujuan mengembangkan (*generating*) teori, dan menemukan teori (*grounded theory*)<sup>70</sup> yang berkenaan dengan partisipasi perempuan dalam pengembangan usaha produktif dan BMT. Untuk mencapai sinergitas keduanya dilakukan pendekatan *adaptif* yang berusaha melakukan penyesuaian diri berdasarkan kondisi setempat seperti tata aturan pengarusutamaan gender terutama masa *new normal life*, konsep usaha produktif dan konsep lembaga micro finance<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup>Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian dibagi dua yaitu: penelitian dasar (*fundamental research*) dan penelitian terapan (*applied research*). Jenis penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori. Lihat Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 26.

<sup>70</sup>Sekaren, *Research Method for Business: a Skill Building Approach* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1992), 5-6. Lihat juga Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2002), 23-24.

<sup>71</sup>Volker Nienhaus, "Islamic Economic, Finance and Banking, Theory and Practice in *Islamic Banking and Finance*, edited by Butterworth Editorial Staff, (London: Butterworth, 1986), 5-6. Menurut Volker Nienhaus ada empat pendekatan utama dalam kajian mengenai ekonomi Islam yaitu: Pertama, *pragmatis*; kecenderungan ini ditandai dengan penolakan ideologi-ideologi ekonomi yang diikuti dengan upaya mencampur berbagai gagasan dan teori yang dianggap paling praktis untuk dilaksanakan. Kedua, *resitatif*; pendekatan yang mengacu pada teks ajaran Islam, pendekatan ini mengacu pada hukum fikih, teologi, etika ekonomi. Ketiga, pendekatan *utopian* dikembangkan dengan merumuskan model manusia yang selanjutnya dikembangkan model masyarakat yang dicita-citakan. Keempat, *adaptif* yang berusaha melakukan penyesuaian

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari 1) Data Primer dan 2) Data Sekunder. Data primer diambil berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui analisis wawancara dengan Responden terpilih yang berhubungan dengan subjek penelitian di dua negara. Data sekunder didapat dari 3 sumber bahan hukum yaitu 1) Sumber Hukum Primer yaitu peraturan perundangan undangan yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender, Usaha Produktif, dan lembaga micro finance BMT di Palembang; 2) Sumber Hukum Sekunder yaitu berbagai pandangan ahli hukum ekonomi sebagai penjelasan dari berbagai aturan perundang-undangan dalam sumber hukum primer; dan 3) Sumber Hukum Tersier yaitu sebagai petunjuk atas kajian dalam sumber hukum primer dan sekunder berupa kamus ekonomi, ensiklopedia.

Dalam menggali rumusan masalah dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berkenaan dengan Partisipasi Perempuan Dalam Pengembangan Usaha Produktif *Era New Normal Life* dan Model *Baitul Mal Wa Tamwil* Di Palembang untuk menilai model Baitul Mal Wa Tamwil dibatasi pada teori Efisiensi Berkeadilan dan teori *maqashid shari'ah* dengan pendekatan Gender Dalam Pembangunan. Hasil kedua pendekatan dinilai dari pengembangan usaha produktif *era new normal life*.

## 3. Lokasi Penelitian

Untuk pendalaman kajian lapangan akan dilakukan di kota Palembang. Alasan pengambilan wilayah tersebut

---

diri berdasarkan kondisi setempat dan sejarah masing-masing umat Islam, seperti gagasan sosialisme Islam; sosialisme kerakyatan; sosialisme demokrasi. Lihat juga M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), xii-xvi.

karena 1) Palembang dikenal dengan miniatur Indonesia dengan daerah yang paling majemuk, mempunyai banyak bahasa daerah<sup>72</sup>, berkumpulnya semua suku, etnis dan agama; 2) Perkembangan BMT maupun kinerja perempuan dibidang pemberdayaan cukup representatif..

#### 4. Responden dan Teknik Sampling

Responden penelitian ini adalah para akademisi penggiat gender di Sumatera Selatan, instansi yang membidangi pemberdayaan perempuan dan BMT, pelaku usaha perempuan di kota Palembang Untuk batasan wilayah sampel (*area sampling*) hanya difokuskan di tempat-tempat yang diidentifikasi sebagai wilayah mayoritas perempuan yang melakukan pengembangan usaha produktif di Palembang. Responden yang masuk dalam wilayah tersebut menjadi fokus pengambilan data wawancara dengan menggunakan metode *snowball sampling*. Kreteria Responden dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL 1**  
**Kreteria Responden Penelitian**

No	Kreteria	Jumlah
1	Akademisi Penggiat Gender Sumatera Selatan	6
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak	2

---

<sup>72</sup>Data terakhir menyebutkan bahwa Sumatera Selatan mempunyai 22 suku antara lain suku Komerling, Palembang, Pasemah, Semendo, Ranau, Kisam, Ogan, Lematang, Rejang, Rawas, Kubu, ditambah dengan 8 etnis seperti China, India, Arab, Melayu. dikutip dari Abdul Hadi Adjin, et al (edit), *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung 1924-1950*, Tanjung Pandan: Pemda Tk II Belitung, 2000, hh. 65-67; Djene Bale, *Peta Suku Bangsa di Pulau Sumatera*, Depdikbud, Ditjen. Kebudayaan, Direktorat Jarahnitra Sub dit Limngkungan Budaya, 1989, h. 34.

	Sumatera Selatan	
3	Pengurus Baitul Mal Wa Tamwil	2
4	Pelaku Usaha Perempuan	10
Jumlah Respon		20

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara terstruktur kepada para Responden. wawancara digunakan untuk mendapatkan data parsifasi perempuan dalam pengembangan usaha produktif di *new normal Life*.

### b. Focus Group Diskusi (FGD)

Aktifitas focus group diskusi untuk menggali pengembangan usaha serta langkah langkah strategis BMT untuk membantu partisipasi perempuan tersebut.

### c. Dokumentasi

Alat ini digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi baik dari literatur, manuscript atas kajian penelitian

## 6. Teknik Analisis Data

Hasil pengumpulan data akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif yang mendasarkan hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti secara berurutan dan terstruktur secara taksioma mulai dari domain atau diambilnya data, pemrosesan data hingga analisis dan pembahasan hasil. Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna pada pemahaman mendalam atas proses-proses sosial yang kompleks atas partisipasi perempuan dalam mengembangkan usaha melalui produk *Baitul Mal Wa Tamwil Di Palembang*, karenanya analisis model interaktif yaitu 1) pengumpulan data, 2) reduksi data; 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan

menjadi bagian untuk menemukan jawaban rumusan masalah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terbagi dalam 5 bab utama, diawali dengan BAB I sebagai Pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah hingga metodologi penelitian. pada BAB II membahas kerangka konseptual atas pemahaman makna dan konsep partisipasi perempuan dibidang ekonomi dan perkembangan pengarusutamaan gender, termasuk konsep pemberdayaan perempuan dan lembaga non perbankan Syari'ah

BAB III merupakan kajian dan penelaahan Perempuan, Ekonomi dan Baitul Mal Wa Tamwil di Palembang, Dalam bab ini diawali dengan sejarah perkembangan pengarusutamaan gender bidang ekonomi Indonesia, partisipasi perempuan dalam melakukan pengembangan usaha terutama penilaian mulai dari normal life hingga new normal life. Produk-produk *Baitul Mal Wa Tamwil* yang ditawarkan oleh dua lembaga tersebut terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi bagian dalam bab ini.

Hasil penelitian dan pembahasan dikaji dalam BAB IV merupakan pembahasan dan hasil penelitian yang difokuskan Partisipasi Perempuan Dalam Pengembangan Usaha Produktif *Era New Normal Life* , dan aktifitas usaha produktif perempuan pada produk *Baitul Mal Wa Tamwil* Palembang. Hasil kesimpulan penelitian, dan rekomendasi kebijakan, serta rekomendasi strategi di tulis dalam BAB V sebagai Penutup.



## BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

### A. Pengertian

#### 1. Partisipasi Perempuan

Sisi pemaknaan, partisipasi perempuan dari dua kata yaitu “partisipasi dan Perempuan”. Secara etimologi partisipasi diartikan dengan peran serta, ikut serta<sup>73</sup>. Dalam Bahasa Inggris *participation* diartikan dengan *take part in activity, to Participate* adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, “participation” adalah hal mengambil bagian<sup>74</sup>. dalam Bahasa Arab *Ishtaraka, sharaka* yang diartikan *ja’alahu syarikan*, dia telah menyertai<sup>75</sup>. Beberapa pemahaman menyebutkan bahwa partisipasi merupakan aktifitas atas keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan untuk memberikan bantuan sebagai rasa tanggung jawab atas tujuan yang akan dicapai<sup>76</sup>.

Partisipasi juga dipahami sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, ini artinya bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari

---

<sup>73</sup> Lukman Ali, et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008. 1024

<sup>74</sup> A.S. Hornby, *Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1974. 610

<sup>75</sup> Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-lughah*, Libanon: Dar al-Masriq, 1975, 384

<sup>76</sup> Jim Ite, dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Cet ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. 54



rakyat<sup>77</sup>. Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, akses dan *control*<sup>78</sup>.

Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah 1) *voice* yaitu hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah; 2) *Access*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik; 3) *control* dimana bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Dalam bukunya Teguh memahami partisipasi adalah pembuat keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa<sup>79</sup>. Pemahaman lain bahwa partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran,

---

<sup>77</sup> Dadang Juliantara, *Pembaharuan Kabupaten*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2004. 84

<sup>78</sup> Dadang Juliantara, *Pembaharuan Kabupaten*, 90

<sup>79</sup> Teguh Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah*, Pusat Kajian Otonomi. Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang, 2001, 201

tenaga, waktu, keahlian, modal, ikut memanfaatkan dan menikmati hasil hasil pembangunan<sup>80</sup>.

Dari berbagai pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil hasil pembangunan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, perempuan adalah orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui<sup>81</sup>, secara etimologi lain perempuan dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar<sup>82</sup>. Diartikan juga dengan dihargai dan berbeda dengan arti wanita yang berorientasi pada *wan* adalah nafsu yang dimaknai menjadi dinafsui atau objek nafsu, atau *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan<sup>83</sup>. Kelompok feminisme perempuan menegaskan pemahaman perempuan sebagai istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya<sup>84</sup>. Pemahaman lebih luas atas perempuan dapat dinilai dari berbagai segi yaitu:

---

<sup>80</sup> Sumaryadi. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama. 2005

<sup>81</sup> Lukman Ali, et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1054

<sup>82</sup> Herman Saksono, *Pusat Studi wanita*, <http://www.yoho.com>, diakses tanggal 12 Agustus 2021)

<sup>83</sup> Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004, 1.

<sup>84</sup> Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 200), 501

- a. Segi kekuatan fisik maupun spiritual namun tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya<sup>85</sup>.
- b. Segi medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik<sup>86</sup> dan psikis<sup>87</sup>.
- c. fisiologis yang alami oleh struktur adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan. Pengaruh kultural dan pedagogis tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria, feminis tertentu<sup>88</sup>.

Mansoer Fakhri lebih spesifik menjelaskan bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrat) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (Jawa: *kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk

---

<sup>85</sup> Lebih luas lihat Murtaglo Muthahari. *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995, 107

<sup>86</sup> Segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki, lembut memberi pesona dari semua titik tubuhnya. Lebih jauh lihat Murtaglo Muthahari. *Hak-hak Wanita dalam Islam*, 108

<sup>87</sup> Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat, lembut memberi pesona dari semua titik tubuhnya. Lihat Murtaglo Muthahari. *Hak-hak Wanita dalam Islam*, 108-110

<sup>88</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Maju, 1989, 4

melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (payudara).

Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural.[11] Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan<sup>89</sup>.

Filosofis nilai partisipasi perempuan dalam pemahaman tersebut secara eksistensial adalah nilai bahwa setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk mengenyam pendidikan. Ketiga hak tersebut merupakan kodrat manusia. Siapapun tidak boleh mengganggu dan harus dilindungi. Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia adalah makhluk Tuhan yang satu, memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang budayanya, dan karena itu memiliki penghargaan yang sama dari Tuhan yang harus dihormati dan dimuliakan. Maka, diskriminasi yang berlandaskan pada

---

<sup>89</sup> Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial Cet. IX*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 8-9

perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, teritorial, suku, agama dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran Tauhid. Hanya tingkat ketaqwaan kepada Allah yang menjadi ukuran perbedaan kelak dihari pembalasan<sup>90</sup>.

## 2. Pengembangan Usaha Produktif

Tiga kata dalam subjudul ini yaitu 1) pengembangan; 2) usaha; 3) Produktif. Kajian etimologi pengembangan dari kata kembang arti bunga penambahan peng-an diartikan dengan cara, proses mengembang<sup>91</sup>. Abdul madjid memahami pengembangan dengan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan<sup>92</sup>. Dalam pemahaman lain bahwa pengembangan dalam kajian ekonomi adalah penciptaan jangka panjang bagi organisasi dari pelanggan, pasar, dan interaksi di dalamnya<sup>93</sup>.

Makna usaha dalam Bahasa Inggris yaitu *effort, mission, maximum, concern, occupation, trade, calling, affair, matter, action by an actor* yang kesemuanya pengertian sebagai kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai

---

<sup>90</sup> Bandingkan pemikiran Hussein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2004, 11

<sup>91</sup> Lukman Ali, et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 662

<sup>92</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005. 24.

<sup>93</sup> Silmi Nurul Utami, *Pengembangan Usaha: Pengertian, Jenis, Aspek, dan Strateginya*, diakses dari *Kompas.com*, tanggal 16 Agustus 2021

suatu maksud<sup>94</sup>. Ismail Solihin dalam bukunya seperti dikutip dari tata aturan perundang undangan Indonesia<sup>95</sup> bahwa usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba<sup>96</sup>.

Usaha juga dipahami dengan upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari<sup>97</sup>. Diartikan juga dengan segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu<sup>98</sup>. Usaha akan dapat dipahami lebih komprehensif pada kalimat “pengembangan Usaha”. Serway dan Vuille seperti dikutip dari Hamdi keduanya menyatakan bahwa *Work has a different meaning in physics than it does in everyday usage. In physics, work is done only if an object is moved through some displacement while a force is applied to it. If either the force or displacement is doubled, the work is doubled*<sup>99</sup>. Dengan Demikian Usaha adalah suatu kegiatan yang didalamnya mencakup kegiatan produksi, dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran dan badan untuk mencapai suatu tujuan.

---

<sup>94</sup> Lukman Ali, et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1254

<sup>95</sup> Lebih luas lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan

<sup>96</sup> Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 29

<sup>97</sup> Wasis, Sugeng Yuli Irianto, *Ilmu Pengetahuan Alam*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008. 172.

<sup>98</sup> Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *IPS terpadu: Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah*, Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2006. 342.

<sup>99</sup> Hamdi, *Energi Terbarukan*, Jakarta: Kencana, 2016, 32.

Jafar Hafsa menjelaskan pengembangan usaha adalah setiap upaya untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi dalam mempengaruhi sikap untuk menambah kecakapan<sup>100</sup>. Dengan demikian Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Pada umumnya pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya harus mampu melihat suatu peluang dimana orang lain tidak mampu melihatnya, menangkap peluang dan memulai usaha (bisnis), dan menjalankan bisnis dengan berhasil.

Kata produktif sesuatu aktifitas yang menghasilkan keuntungan maksimal, dengan konsep dasar hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini<sup>101</sup>. Washin, George J. Sebagaimana dikutip dari Slamet Saksono menjelaskan bahwa produktif sama dengan dengan produktifitas memiliki dua konsep utama efisiensi dan efektifitas, dimana Efisiensi mengukur tingkat sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun alam yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang dikehendaki, efektivitas mengukur hasil mutu pelayanan yang dicapai<sup>102</sup>. Dalam konsep Islam Produktif merupakan sikap yang konsisten untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, tidak ada konsep untuk menganggur dan kehilangan perjuangan untuk

---

<sup>100</sup> M.Jafar Hafsa, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. (UKM), Infokop Nomor 25 Tahun 2004, 34

<sup>101</sup> Bambang Tri Cahyono, *Manajemen pemasaran : Analisis Agribisnis dan Industri*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Program Magister Manajemen, 2000: 283

<sup>102</sup> Slamet Skasono. *Administrasi Kepegawaian*. Jogjakarta: Kanisius, 2003, 113

berusaha<sup>103</sup>. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan usaha produktif adalah Upaya manusia secara konsisten dalam melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dalam meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai suatu maksud dalam menghasilkan keuntungan maksimal dan dengan konsep dasar hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

Pengembangan usaha produktif tersebut dikembangkan dalam dua jenis yaitu 1) Pengembangan vertikal sebagai perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya; 2) Pengembangan horizontal adalah pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif, yang secara line produk tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya.

Dalam konteks pengertian tersebut, Humaizar menjabarkan cara pengembangan usaha kedalam 3 pola yaitu 1) Perluasan ke hulu atau ke hilir dengan melihat ranah usaha. Jika usaha berada di hulu maka pengembangannya ke hilir, demikian sebaliknya. Pola tersebut memudahkan pengembangan, karena telah mengetahui pasar, sumber material, dan teknologi. Kekurangan: jika terjadi permintaan produk pada bisnis ini melemah, maka tingkat penjualan akan menurun; 2) Diversifikasi usaha adalah mengembangkan

---

<sup>103</sup> Fahmi Mediasi, *Ekonomi Mikro Islam*, Magelang, Unima, 2018. 23. Perbedaan produktif dan konsumtif pada nilai hasil. Produktif orientasi keuntungan sementara konsumtif orientasi kerugian. Barang produktif mempunyai nilai pertumbuhan jangka Panjang, nilai konsumtif selalu menagalami penurunan jangka Panjang.



usaha ke berbagai jenis usaha. Pola tersebut akan memberikan solusi dimana jika salah satu jenis usaha mengalami penurunan permintaan pasar (rugi), maka usaha yang lain masih dapat menutupi kerugiannya. Walaupun demikian sisi kelemahannya cukup sulit dilakukan karena harus mempelajari dari awal baik pasar, sumber material, ataupun teknologinya; 3) Menjual bisnis (franchise) sebagai upaya menjual hak patennya. Ini dilakukan ketika usaha tersebut sudah memiliki hak paten atas produk atau jasa dan konsep pemasarannya<sup>104</sup>.

### 3. Era New Normal Life

Berbagai pengertian istilah *new normal life* muncul berdasarkan kompetensi kepakaran masing-masing. Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 seperti dikutip dari Dandy menyatakan bahwa new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19<sup>105</sup>. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Airlangga Hartato bahwa Definisi new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi<sup>106</sup>. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan

---

<sup>104</sup> Humaizar. *Manajemen Peluang Usaha*. Bekasi: Dian Anugerah Perkasa 2010, 57

<sup>105</sup> Dandy Bayu Bramasta, “sering disebut sebut, Apa Itu New Normal”, diakses dari [www.compas.com](http://www.compas.com). Tanggal 21 Agustus 2021.

<sup>106</sup> Situasi perekonomian Indonesia tahun 2021 berdasarkan perhitungan Year on Year pada kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% saja. Data pada kuartal kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar -5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan negatif, seperti Industri transportasi yang mengalami pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar -30,84%. Akan

rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional<sup>107</sup>.

Kedua pengertian tersebut dipahami juga sebagai *New normal* adalah skenario baru kehidupan melalui aspek kesehatan dan aktifitas sosial-ekonomi. Ini artinya adanya kenormalan Baru. Kata normal sebetulnya dalam bahasa inggris sudah dijadikan nomina makanya jadi *new normal*. Badan bahasa kemudian membuat padanannya menjadi kenormalan karena kalau normal itu adjektiva kata sifat, jadi kenormalan baru<sup>108</sup>

Pemahaman tersebut memperlihatkan beberapa nilai yang pada intinya perubahan aktifitas kehidupan berbasis Kesehatan. Pengembangan atas pengertian tersebut dapat dimakanai dengan perubahan cara kehidupan lama dengan cara kehidupan baru melalui Gerakan sinergi dengan kecepatan arus informasi, globalisasi dan ekonomi digital yang spasio-temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Pengembangan teknologi yang ter-afirmasi dalam “aliran-

---

tetapi, beberapa sektor masih mengalami pertumbuhan positif, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air. Perekonomian nasional dari segi pengeluaran pun semakin melengkapi data penurunan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada kuartal kedua tahun 2020, data mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar -5,51%, pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar -6,90%, ekspor tumbuh sebesar -11,66%, dan impor tumbuh sebesar -16,96%. Data-data tersebut mengkonfirmasi kontraksi yang dialami oleh sebagian besar sektor industri yang beroperasi di Indonesia.

<sup>107</sup> Dipna Videlia Putsanra “Apa Itu New Normal dan Bagaimana Penerapannya Saat Pandemi Corona?”, diakses dari <https://tirto.id/fCSg>, tanggal 21 Agustus 2021. Lihat juga Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

<sup>108</sup>Diakses dari <https://www.j-express.id/new-normal-di-indonesia-arti-fakta-dan-kesiapan-daerah/>, 21 Agustus 2021

data” dan informasi yang menghasilkan kemampuan menggerakkan perdagangan barang melalui transmisi arus informasi dan gagasan, arus data tersebut kemudian mendeterminasikan pergerakan barang, jasa, keuangan, dan manusia memasuki fase baru yang didefinisikan oleh arus perdagangan barang dan jasa pada abad sebelumnya<sup>109</sup>. Berdasarkan data diketahui perbedaan normal life dan new normal life sebagaimana dalam tabel berikut:

**TABEL 2.1**  
**Perbedaan *Normal Life* Dan *New Normal Life***

No	Normal Life	New Normal Life
1	Etika pergaulan dalam konsep berbasis kesadaran	Etika pergaulan tegas berlaku dan diatur melalui Peraturan protokol Kesehatan yang dikeluarkan pemerintah
2	Budaya kumpul kumpul dalam kebersamaan	Budaya menjaga jarak dalam kebersamaan

---

<sup>109</sup> Laporan *McKinsey Global Institute* (MGI) menjelaskan bahwa Era baru memungkinkan perusahaan mencapai pasar internasional dengan model bisnis yang *kurang padat modal*. Peningkatan penggunaan “*bandwidth*” merupakan “*core*” globalisasi dan ekonomi digital dalam menghubungkan seluruh moda dunia, tumbuh 45 kali lebih besar sejak tahun 2005. Fenomena ini diperkirakan akan meningkat sembilan kali dalam lima tahun ke depan seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna arus informasi, penelusuran (*searching*), komunikasi, video, transaksi, dan lalu lintas *intracompany*. Ekonomi digital merubah ekonomi global, memungkinkan industri kecil menjadi industri multinasional mikro dengan elastisitas dan dinamika yang mereka miliki. Hal ini memberi kesempatan yang lebih tinggi bagi para pemula untuk *terlahir secara global*, digitalisasi mendorong persaingan karena memungkinkan model bisnis yang inovatif dan memungkinkan perusahaan untuk meningkat dengan cepat. Contoh pada perubahan eksportir dan bergabung dengan pasar *e-commerce*, dan bisa bersaing dengan perusahaan multinasional terbesar. Lihat Agus Puji Prasetyono, “Persaingan Di Era Globalisasi Dan Ekonomi Digital”, opini Badan Riset dan Inovasi Nasional, <https://www.brin.go.id/>, diakses tanggal 21 Agustus 2021

3	Media komunikasi terbatas dan komunikasi on line dianggap tidak menjunjung etika kesantunan	Komunikasi <i>on line</i> memasyarakat
4	Pola transaksi jual beli berbasis komunikasi dengan prinsip pembeli adalah raja	Pola transaksi digital dengan prinsip Efisiensi dan kepercayaan
5	Media social lebih berorientasi pada pertemanan dan perluasan jejaring kolega	Media sosial menjadi sensasi virtual dengan beragam penggunaan seperti Live instagram, berbagai aplikasi meeting on line, Panggung online dengan konsep virtual di bidang entertainment yang juga menggunakan konsep charity. Media yang semakin beragam seperti tik tok juga semakin banyak digunakan.
6	Tradisi panggung terbuka	Tradisi panggung on line dengan konsep charity dan aplikasi entertainment
7	Pendidikan dengan absen kehadiran langsung, tatap muka wajib	Pendidikan berinovasi dengan system kehadiran melalui aplikasi, termasuk tatap muka yang diatur berdasarkan kebutuhan dan jumlah peserta
8	Pertemuan keagamaan tanpa batas peserta	Pertemuan keagamaan diatur batas peserta dan pola pertemuan

*Sumber:* Olah Berbagai Sumber, 2021

#### **4. Model *Baitul Mal Wa Tamwil***

Berbagai literatur dipahami bahwa BMT singkatan Baitul Mal Wa Tamwil yang dimaknai dengan Balai Usaha

Mandiri Terpadu atau, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul tamwil* yang diartikan dengan rumah pengembangan harta yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, sementara *Baitul maal* yang artinya rumah harta untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya<sup>110</sup>.

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah<sup>111</sup>. Ia juga disebut juga dengan “Koperasi”<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Neni Sri Imanayati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010, 3

<sup>111</sup> Yaya. *Akuntansi Perbankan. Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2009, 22

<sup>112</sup> Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris: *co-operation*, *cooperative*, atau bahasa Latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperatie*, *cooperatieve*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerjasama. Ada beberapa ilmuwan seperti Margareth Digby, seorang praktisi sekaligus kritikus koperasi berkebangsaan Inggris, dalam buku "*The World Cooperative Movement*", juga C.R. Fay, dalam buku "*Cooperative at Home and Abroad*", Mladenant, ilmuwan asal Perancis, dalam buku "*L'Histoire des Doctrines Cooperatives*", kemudian H.E. Erdman, dalam buku "*Passing Of Monopoly As An Aim Of Cooperative*", Frank Robotka, dalam buku "*A Theory Of Cooperative*", Calvert, dalam buku "*The Law and Principles of Cooperation*", A. Chaniago dalam buku "Perkoperasian Indonesia", dan masih banyak lagi, masing-masing telah memaparkan pemikirannya tentang apa yang dimaksud dengan koperasi dan membuat definisi sendiri-sendiri. Demikian juga, di dalam Setiap Undang-Undang Koperasi yang pernah berlaku juga senantiasa merumuskan tentang makna koperasi. Calvert memberi definisi tentang koperasi sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing. Chaniago memberi definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan

Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga usaha ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu melayani nasabah usaha kecil-bawah berdasarkan sistem bagi hasil, dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungannya sendiri. BMT berasal dari konsep *baitu al-mâl* wa *al-tamwil* yang terdiri dari dua sisi kegiatan *baitu al-mâl* dan *baitu al-tamwîl*. Kegiatan *baitu al-tamwîl* mengutamakan pengembangan kegiatan investasi dan produktif dengan sasaran ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk pembangunan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. Sedangkan *baitu al-mâl* mengutamakan kegiatan kesejahteraan bersifat nirlaba yang diharapkan mampu mengakumulasi dana zakat, infaq, shadaqah yang pada gilirannya berfungsi mendukung kemungkinan resiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah itu<sup>113</sup>.

---

masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Organisasi Buruh Sedunia (International Labor Organization/ILO), dalam resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, membuat batasan mengenai ciri-ciri utama koperasi yaitu: (1) merupakan perkumpulan orang-orang; (2) yang secara sukarela bergabung bersama; (3) untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama; (4) melalui pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis dan; (5) Yang memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima bagian resiko dan manfaat yang adil dari perusahaan di mana anggota aktif berpartisipasi. Lebih luas lihat Aharoni, Y, “How Small Firms Can Achieve Competitive Advantages in an Interdependent World”, dalam T. Agmon dan R. Drobnick (ed.), *Small Firms in Global Competition*, New York: Oxford University Press, 2000.42; sebagai perbandingan lihat juga Ahmad Dimiyadhi, *Islam dan Koperasi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004. 4

<sup>113</sup> Widodo, et el, *Pedoman Akuntansi Syari'ah: Panduan Praktis Operasional Bait al Mal wa al-Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999. 9

Sebelum mengkaji hal tersebut diperlukan refleksi sejarah BMT di Indonesia, dimulai tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) di Masjid Salman. Mereka mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian pada 1992 BMT lebih di berdayakan lagi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ketika itu, fokus BMT pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari pegawai perusahaan atau instansi pemerintah. Sebagai sebuah gerakan yang telah dimotori oleh ICMI kemudian secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pinbuk kemudian menjadi lembaga pelatihan bagi BMT dan pada waktu itu telah mencanangkan pengembangan ribuan BMT di Indonesia.

Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian. Fokus BMT kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syari'ah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT kemudian semakin populer setelah dipicu oleh kesadaran masyarakat Muslim tanah air untuk mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan mikro. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.

---

Belakangan ini BMT semakin populer di perbincangkan terutama dalam perekonomian Islam. BMT yang juga dikenal sebagai koperasi syariah telah mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul maal Waa Tanwil (BMT) saat ini sudah ada BMT yang menargetkan aset senilai Rp 2 triliun.

Pendirian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berada pada mayoritas umat Islam. Gerakan lembaga keuangan pada tingkat bawah ini relatif mampu mengurangi ketergantungan masyarakat lapisan bawah dari cengkeraman rentenir. Lembaga ini (BMT) terdiri dari dua divisi yaitu; pertama, divisi *baitul maal* yang mengelola zakat, infaq dan sadaqah (ZIS). Kedua, divisi *baitul tamwil* yaitu menggerakkan simpanan dan penyaluran dana (pembiayaan modal) dengan sistem bagi hasil. Diharapkan dengan sistem ekonomi Islam, masyarakat termasuk umat Islam mampu menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Untuk dasar hukum di Indonesia BMT paling mendekati dengan badan hukum koperasi, baik serba usaha (KSU), maupun simpan pinjam (KSP) Lembaga Baitul Maal Tamwil terciptanya adanya kesadaran umat yang juga berfungsi untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Peran



umum *Baitul Mal Wa Tamwil* adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syari'ah yang menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Sebagai penganut sistem perekonomian pancasila yang menganut sistem pasar yang beretika dimana ada pemerintah yang turut campur tangan untuk mengatur, mengawasi jalannya perekonomian agar tidak terjadi kecurangan oleh para pelaku ekonomi dalam hal ini pengusaha, sehingga persaingan usaha lebih sehat. Dikatakan berbahaya karena jika swasta apalagi swasta asing telah mendominasi perekonomian, maka pemerintah akan dikendalikan bukan mengendalikan dan juga akan terjadi persaingan *Baitul tamwil* termasuk lembaga keuangan islam yang dalam kegiatan maupun operasionalnya memperhitungkan keuntungan (*profit oriented*) kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau markup/margin yang berlandaskan sistem syariah. Adapun ciri-ciri BMT 1) Berbadan hukum koperasi; 2) Bertujuan menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan dan memajukan usaha bagi anggotanya; 3) Skala produk dan pendanaan yang terbatas menjadi prinsip dan pembeda dengan lembaga keuangan lainnya, sedangkan mekanisme dan transaksinya hampir sama dengan perbankan syariah non riba.

BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi pada level paling bawah berperan aktif dan maksimal untuk ikut menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Menurut Wahyu Dwi Agung BMT

setidaknya tiga peran yang dimainkan BMT dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama antara lain<sup>8</sup> :

- a. Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung.
- b. Sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis. Sektor religious, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah, BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberi fasilitas pembiayaan

Pada sektor finansial, pemberian pembiayaan oleh BMT diartikan sebagai suntikan dana sementara yang sifatnya tidak permanen, masyarakat diberdayakan untuk mampu mengelola dana dalam rangka meningkatkan ekonominya. Dengan pembiayaan yang ada, masyarakat mikro dapat menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus dan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian kepada nasabah yang dianggap kurang mampu (kategori sangat miskin) tetapi mempunyai kemampuan usaha oleh BMT diberikan pembiayaan yang bersifat *qardul hasan* (artinya orang tersebut hanya mengembalikan dana pinjaman saja). Dengan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat, maka BMT telah membantu masyarakat mikro untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak tergantung dengan subsidi pemerintah, mampu

menciptakan surplus modal, sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya.

Pada sektor riil, peran BMT dalam mendorong sektor riil juga diakui Bank Indonesia (BI). BMT menjadi solusi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena UMKM biasanya kesulitan untuk mendapatkan akses modal ke perbankan karena ada prosedur-prosedur yang susah dan tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat kecil seperti memiliki agunan yang memadai dan lain sebagainya. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank syariah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep linkage, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

Pada sektor religious, BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Dari segi *Baitul Maal*, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, Infaq, dan shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, dan miskin.

Dalam konstruksi BMT tersebut dipahami dari ciri cirinya, yaitu: *Pertama*, Usahanya dimaksud untuk mendorong sikap dan prilaku menabung dari masyarakat banyak dengan menerima simpanan atas dasar balas jasa

berdasarkan bagi hasil; memberi pembiayaan usaha-usaha kegiatan ekonomi dari Rp 25.000,- sampai Rp 100.000,- atau lebih jika aset BMT sudah cukup besar; jika kegiatan simpan pinjam telah mantap dan lembaganya telah bekerja dengan terkendali, dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi riil seperti pemasaran, pengembangan teknologi tepat guna serta kegiatan lain yang sangat erat keitannya dengan pengembangan usaha kecil-bawah di lingkungan itu; menerima titipan dan pengelolaan dan zakat, infaq, dan shadaqah.

*Kedua*, pengelolaannya secara profesional persis mengikuti pembukuan dan prosedur perbankan (namun bukan lembaga perbankan) dengan kekecualian tidak mengharuskan pakai jaminan uang atau harta benda untuk jumlah pinjaman yang kecil; manajemen dilatih dari personil yang paling rendah berpendidikan D3 dan mengenal calon lingkungan kerjanya; mengikuti sistem dan prosedur kerja yang telah dipersiapkan petunjuk pelaksanaannya; untuk pengetahuan praktis bisa didapat dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalam waktu yang ditetapkan.

*Ketiga*, modal awal untuk mendirikan BMT, lebih kurang Rp 5.000.000,- sampai Rp 10.000.000 (lebih besar modal itu lebih baik) ditambah dengan fasilitas sarana dan prasarana lainnya. *Keempat*, pendiri sebagai anggota inti. Terdapat sekelompok orang (20 sampai 40 orang) di sekitar lokasi tempat didirikan BMT. Dan setiap anggota bersedia memberikan saham yang disesuaikan dengan kondisi anggota masing-masing. Kelompok anggota inti mempunyai loyalitas dan bertanggung jawab terhadap maju dan mundurnya BMT di kemudian hari. *Kelima*, biaya operasional sangat rendah antara lain karena kecilnya jumlah staf dan dapat beroperasi

pada kondisi yang tidak mewah. *Keenam*, jaminannya adalah “kepercayaan” baik melalui kenalan maupun rekomendasi dari orang yang dikenal dilingkungan BMT, tokoh atau tanggung renteng, saling kenal disebabkan BMT beroperasi didaerah yang tidak terlalu luas. *Ketujuh*, mitra operasional terintegrasi dengan lembaga lokal; misalnya pengajian, lingkungan masjid<sup>114</sup>.

Model BMT merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari’ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industry dan pertanian.

Memahami model dinilai dari visi, misi dan Tujuan dibentuknya BMT. Secara umum visinya adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati - hatian. Sementara misinya adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Tujuan

---

<sup>114</sup>M. Amin Azis, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT (Baitul Maal wat. Tamwil)*. Jakarta: PINBUK, 1999, 43

BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera<sup>115</sup>.

Model BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Model BMT di masyarakat diharapkan 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah dengan literasi pentingnya sistem ekonomi islam; 2) melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, pola pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum; 3) melepaskan ketergantungan pada rentenir yang bagi masyarakat rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera, memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan<sup>116</sup>.

Dalam model itu juga BMT didirikan atas dasar *saalam* yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan dengan prinsip 1) *ahsan* (Mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsana'amalu* (memuaskan semua pihak), dan sesuai nilai - nilai *salaam* (kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan); 2) *barakah* yaitu berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat; 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai

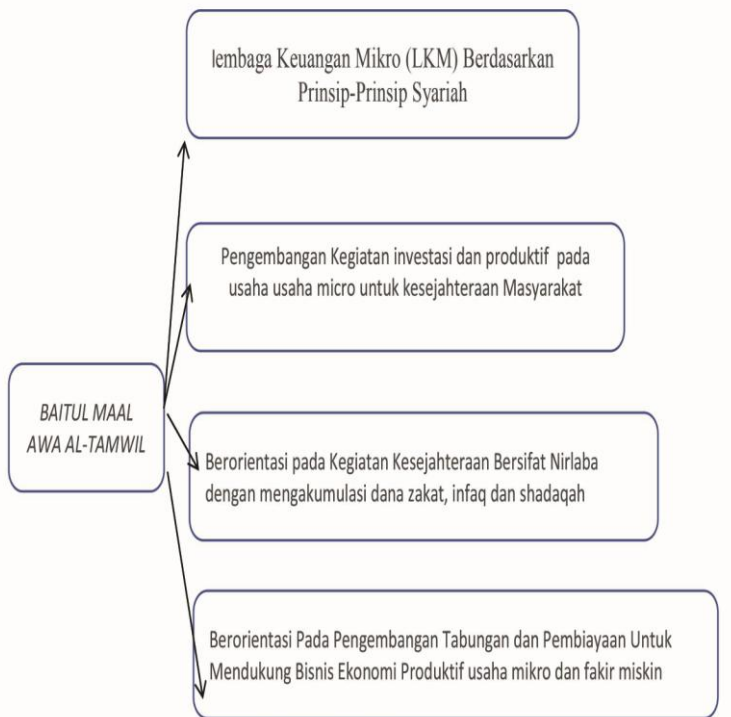
---

<sup>115</sup> A.Djazuli dan Yadi Yanwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat: Sebuah Pengenalan*, Jakarta:Rajawali Press, 2002, 184

<sup>116</sup> Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adi citra Intermedia,2011, 379

ruhiyah ); 4) demokratis, partisipatif, dan inklusif; 5) keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif; 6) Ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya; 7) keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal<sup>117</sup>. Berdasarkan data tersebut maka model BMT sebagaimana dalam gambar berikut:

**GAMBAR 2.1**  
**Model *Baitul Maal Wa Al-Tamwil***



Sumber: Olah Data 2021

<sup>117</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syari'ah Berbasis PSAK*, Jakarta: Permata Puri Media, 2012, 10.

## **B. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan**

Partisipasi merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah berpartisipasi. Secara umum partisipasi penting untuk dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu dapat menilai perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Kualitas partisipasi merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Perbedaan individu atau kelompok berdasarkan “tingkah laku” melibatkan sejumlah persoalan yang berhubungan dengan nilai perempuan dalam masyarakat dan nilai perempuan sebagai suatu individu. Meskipun al-Qur’an membedakan berdasarkan amal saleh, al-Qur’an tidak membangun perangkat nilai untuk tingkah laku tertentu. Hal ini membuat setiap sistem sosial menentukan nilai perilaku yang berbeda. Setiap sistem sosial biasa melakukan dan setiap masyarakat telah membuat perbedaan antara pekerjaan kaum laki-laki dan pekerjaan perempuan. Masalahnya terletak pada tradisi bahwa pekerja pria biasa dipandang lebih berharga daripada pekerja perempuan. Betapun tidak adilnya pembagian tenaga kerja tersebut<sup>118</sup>.

Gender merupakan salah satu isu kritis dalam kehidupan organisasi. Identitas dengan kualitas maskulin maupun feminim tertentu dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial yang dialaminya, termasuk pengalaman

---

<sup>118</sup> Lebih luas lihat K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Jogjakarta: IRCISOD, 2019. 45



organisasional. Oleh sebab itu, gender mulai banyak ditelaah dalam kaitannya dengan aspek manajerial dalam organisasi. Seperti halnya dengan sebagian besar teori organisasi lainnya, belum ada kesepakatan mengenai perspektif atau pendekatan yang dipandang dapat menjelaskan secara tuntas kaitan antara jender dan manajemen. Sebaliknya, ada berbagai perspektif yang berkembang mengenai bagaimana mengelola aspek gender dalam organisasi. Diantaranya adalah pendekatan *Liberal Feminism* dan pendekatan *gender in management*

Pendekatan *liberal feminism* menilai bahwa pria dan wanita berkedudukan sama dan sederajat dalam segala hal. Sehingga perempuan memiliki kemampuan (*capability*) yang sama dengan pria untuk memenuhi berbagai persyaratan dunia kerja seperti posisi kepala sekolah (*dalam penelitian ini*). Liberal feminism mengidentifikasi adanya fenomena “*glass ceiling*” dalam organisasi-organisasi modern. Fenomena tersebut merupakan hambatan yang sifatnya implisit dan tidak terlihat jelas namun sangat sulit ditembus, yang dapat menghalangi kesempatan seorang wanita untuk menduduki posisi senior atau manajemen puncak dalam organisasi<sup>119</sup>. Ironisnya banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung pasrah dan gagal mengatasi “*glass ceiling*” tersebut. Karena persepsi orang lain terhadap dirinya maupun persepsinya terhadap diri sendiri dalam konteks organisasi maupun masyarakat luas<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup>H. Brown, *Women Organising*, London: Routledge, 1992, 23-24, sebagai perbandingan lihat Binar, *Perempuan Keindonesiaan dan Kemodernan*, Jogjakarta: Pustaka Cidesindo, 2009. 16

<sup>120</sup>Diantara penelitian tersebut seperti ditulis B. Alimo Metcalfe, “An Investigation of Female and Male Constructs Of Leadership and Empowerment, dalam *Women in Management Review*, 1995, Vol. 10 (2), 3-8.

Berbagai *stereotyping* terhadap kaum perempuan, seperti sifat emosional, irasional, *irrevocably feminine*, dan *congenitally subordinate*, memunculkan segregasi vertikal yang ditandai dengan dominasi pria dalam posisi puncak organisasi. Fenomena segregasi vertikal banyak dijumpai di negara-negara maju dan berkembang. Di Amerika misalnya, survei university of southern California menunjukkan bahwa hanya 4,3 % posisi manajemen senior di perusahaan jasa terkemuka Amerika di pegang oleh wanita<sup>121</sup>; di Inggris, selama abad dua puluh ini jumlah perempuan yang menduduki posisi manajemen puncak tidak pernah melebihi 10 %<sup>122</sup>; sementara itu di Australia jumlah perempuan yang menduduki posisi pada level manajemen hanya berkisar 3 %<sup>123</sup>.

Bukti-bukti ini menunjukkan adanya ketimpangan dominasi dalam segala aspek non domestik. Di tambah kemudian stereotif mengenai ketrampilan kerja pria *vis a vis* perempuan sering dikedepankan. Menurut Shield stereotif tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**TABEL 2.2**

**Stereotif Ketrampilan Kerja Pria Versus Perempuan<sup>124</sup>**

<i>Laki Laki /Maskulin</i>	<i>Perempuan/Feminin</i>
1. Kompetitif	1. Ko-operatif
2. Asertif	2. <i>Submissisme</i> <sup>125</sup>
3. Individualistic	3. Kolektivis-egalitarian

<sup>121</sup>L. Reynolds, "Translate Fury into Action" dalam *Management Review*, Vol 81 (3), 1997, 36-38.

<sup>122</sup>K. Grint, *The Sociology Of Work: an Introduction*, Oxpord: Polity Press, 1999, edisi revisi, 35

<sup>123</sup>S. Walby, *Gender Transformations*, London: Routledge, 1997.

<sup>124</sup>Dikutip dari J. Shields, *Lecture Notes IROB 5700*, UNSW Sydney, Australia, 1999, hh. 56-57

<sup>125</sup>Memiliki kepatuhan dan tata aturan

4. Status seeking	4. Consensus-seeking <sup>126</sup>
5. Dominating	5. Nurturing
6. Keras hati	6. Sensitive
7. Jugmental	7. Empathetic
8. Confident	8. Self-effacing <sup>127</sup>
9. Risk-taking <sup>128</sup>	9. Berhati-hati
10. Restrained <sup>129</sup>	10. Emosional
11. Rasional	11. Intuitif
12. Spatial technical skills <sup>130</sup>	12. Conceptual verbal skills <sup>131</sup>
13. Object oriented	13. People oriented
14. Tegas	14. Reflektif

Dalam persepektif *Gender in management* lebih bersifat relasional. Asumsi dasarnya adalah bahwa pria dan perempuan bersosialisasi secara berbeda, karena itu mereka juga mengelola organisasi secara berlainan pula. Oleh sebab itu, perspektif tersebut berusaha mengidentifikasi hubungan timbal balik antara gender dan praktek manajemen dengan mengkaji karakteristik penting dalam pekerjaan manajerial,

---

<sup>126</sup> Komitmen atas aturan

<sup>127</sup> *Self-efficacy* merupakan keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi suatu situasi bahwa ia akan berhasil dalam melakukannya.

<sup>128</sup> Pengambilan risiko (*risk-taking*) bukanlah kegiatan secara asal-asalan dan bertindak secara tidak bertanggungjawab. Kadang-kadang orang keliru menganggap bahwa sikap tidak bertanggungjawab dan gegabah sebagai *risk-taking*. Jika gagal mereka menyalahkan kepada nasib buruk. *Risk-taking* adalah relatif. Konsep risiko berbeda bagi setiap orang, dan dapat pula sebagai hasil *training*.

<sup>129</sup> Pengendali

<sup>130</sup> Membangun ruang ketrampilan

<sup>131</sup> Kemampuan dalam kecakapan lisan

gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pria dan perempuan, dan konsekwensinya bagi praktek organisasional dan manajerial, dengan kata lain, fokus utamanya adalah bagaimana seseorang baik laki-laki maupun perempuan secara aktual mengelola organisasi.

Aliran ini meliputi tiga macam pendekatan. Pendekatan pertama, *feminine in management* yang berpandangan bahwa pria dan wanita memiliki gaya manajerial yang secara natural berbeda. Untuk itu, berbagai penelitian diantaranya penelitian Rosener (1990) dan Alimo Metcalfe (1995) telah dilakukan dalam mengidentifikasi karakteristik kunci gaya manajerial feminin (*feminine managerial style*). Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, karakteristik maskulin diasosiasikan dengan kepemimpinan transaksional atau gaya administratif, sedangkan karakteristik *feminine* dihubungkan dengan 'kepemimpinan transformasional atau gaya berorientasi pada perubahan (*changed oriented style*).

Penganut aliran ini berpendapat bahwa gaya kepemimpinan transformasional lebih tepat dan efektif dalam lingkungan sosio-ekonomik dewasa ini dibandingkan dengan gaya *command and control*. Salah satu kesimpulan menarik dari penelitian Rosener yang ditulis dalam *Journal of management studies* yang berjudul *Ways Women Lead* bahwa kesuksesan para pemimpin perempuan dicapai karena mereka perempuan dan bukan karena mereka beradaptasi dengan manajemen maskulin, direktif dan otoritarian. Selain itu, wanita dipersepsikan memiliki ketrampilan social yang dibutuhkan untuk membentuk dan mengelola organisasi yang bersifat demokratis dan non hirarkis.

Pendekatan kedua, *gender globalization*, mengkritik pendekatan *feminine in management* dengan beragumen

bahwa gaya kepemimpinan spesipik cenderung relatif tidak signifikan, kecuali jika gaya tersebut memfasilitasi globalisasi. Ada dua faktor penting yang membuat peranan perempuan dalam posisi pimpinan semakin penting, yaitu: *pertama*, globalisasi membuat para manajer pria dipromosikan menjadi manajer global yang meluangkan sebagian besar waktunya di luar negeri. Untuk itu, posisi yang mereka tinggalkan perlu diganti; *kedua*, angkatan kerja baru yang fleksibel dan bekerja dalam tim cenderung membutuhkan ketrampilan yang lebih rasional, lebih halus, dan lebih feminine dibandingkan dengan manajemen tradisional yang menekankan *command and control*. Implikasinya, menurut Gherardi menegaskan bahwa perempuan menduduki posisi manajerial untuk menangani karyawan atau pegawai sementara manajer pria dipromosikan dan dikirim ke luar negeri untuk mengembangkan bisnis dan bersaing di arena global<sup>132</sup>.

Implikasi lain dalam arena teologi, terutama dalam agama Islam tentang pola relasi gender dalam Islam, karena dianggap telah terjadi dominasi laki-laki dalam masyarakat di sepanjang zaman, wanita masih sebagai manusia nomor dua, masih dipandang lebih rendah daripada laki-laki disepanjang zaman, demikian kritik Asgar Ali Engeneer kepada para fuqaha dalam menjelaskan posisi perempuan dalam al-Qur'an<sup>133</sup>. Kalangan feminisme hampir seluruhnya sepakat bahwa, agama yang diwahyukan adalah agama yang seksis, dalam arti bahwa agama-agama tersebut adalah agama yang mensahkan suprioritas laki-laki, baik dalam wilayah

---

<sup>132</sup> Gherardi, *Gender, Symbolism, and Organizational Cultures*, London: Sage, 2000, 56-57

<sup>133</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Jogjakarta: Benteng, 2001, 45

domestik ataupun wilayah publik. Ketidakadilan yang dijustifikasi agama dalam pandangan kaum feminis adalah pangkal penindasan terhadap perempuan. Mereka juga sepakat bahwa rekonstruksi terhadap ajaran tradisional agama adalah hak yang mutlak dilakukan untuk sejauh mungkin mengeliminasi perbedaan status yang demikian jauh antar Perempuan dan laki-laki. Dari sinilah, konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan diajukan oleh kalangan feminis untuk menegaskan bahwa tafsir agama atas superioritas laki-laki adalah sesuatu yang menjadi pokok rekonstruksi. Dalam perspektif inilah, kalangan feminis Islam melakukan serangkaian kegiatan nyata seperti gugatan kepatuhan mutlak perempuan terhadap laki-laki dan bentuk kongkret subordinasi perempuan serta eksklusi perempuan dari wilayah publik<sup>134</sup>.

### **1. Dikotomi Peran Publik dan Peran Domestik**

Masyarakat tradisional di Indonesia sampai sekarang masih sangat erat memegang tradisi bahwa laki-laki adalah pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai pengasuh (*nurturer*). Konotasi asimetris tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menganut sistem budaya patriarki. Budaya ini oleh Marla Mies dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan kaum laki-laki pada tempat yang lebih tinggi dan mendominasi daripada kaum perempuan<sup>135</sup>.

*Partiarki*, menurut Sylvia Walby merupakan sistem struktur dan praktik sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai kelompok yang mendominasi, melakukan operasi dan

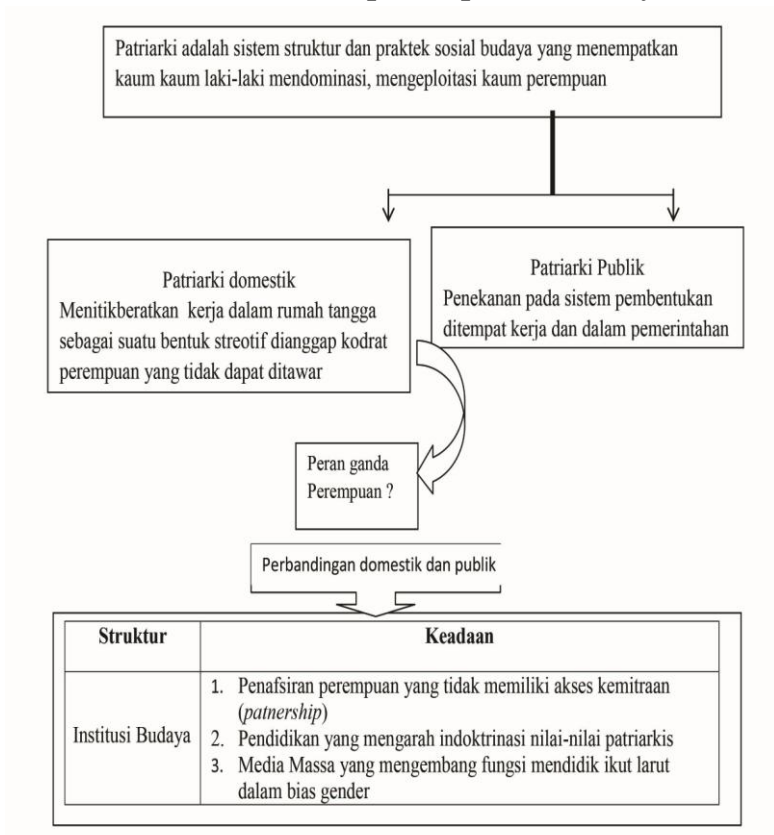
---

<sup>134</sup>Muncul gugatan senada dari 14 mazhab feminis di dunia diantaranya, feminisme post moderen.

<sup>135</sup>Marla Mies, *Patriarchy And Accumulation On a World Scale: Women In The International Division Of Labour*, Avon: The Bath Press, 1986, 37.

mengekloitasi kaum perempuan. Sebagai sebuah system, ia memiliki dua bentuk yaitu: patriarki domestik (*private patriarchy*) dan patriarki publik (*public patriarchy*). Patriarki domestik menitikberatkan kerja dalam rumah tangga sebagai sebuah streatipe yang melekat pada kaum perempuan. Sedangkan patriarki publik yang merupakan wilayah kerja kaum perempuan sebagai manipestasi gerakan kesetaraan. Pola dua sistem tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

**GAMBAR 2. 2**  
**Sistem Patriarki (Kepemimpinan Para Ayah)**



Sebagai akibat dari dikotomi tersebut, muncul konsep *double barden*<sup>136</sup> beban ganda (*double burden*) bagi perempuan. Seiring dengan perkembangan pemikiran aktifnya perempuan di dunia publik didorong oleh berbagai alasan, antara lain untuk menghilangkan ketergantungan kepada suami disamping meringankan beban ekonomi keluarga. Sebagian kaum feminis melihat penyebab utama adanya ketidakadilan bagi perempuan di dalam dunia pendidikan adalah karena sistem patriarkhal yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu, juga melihat hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, karena ini yang kemudian menentukan keterbelakangan perempuan di berbagai bidang.

Persoalan hak-hak reproduksi<sup>137</sup>, kebutuhan

---

<sup>136</sup>*Double burden* dipahami dengan beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah public, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestic. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda. Lebih luas lihat Peggy Antrobus, *The Global Women's Movement: Origins, Issues and Strategies*, Bangladsh: The university Press Ltd, 213. 66

<sup>137</sup>Istilah hak reproduksi terdapat 12 hak-hak yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996 yaitu : 1) Hak untuk hidup Setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan; 2) Hak atas kemerdekaan dan keamanan untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi; 3) Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi;. 4) Hak Hak atas kerahasiaan pribadi dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi.; 5) Hak atas kebebasan berpikir dari



perempuan dan seksualitas perempuan merupakan pembahasan yang penting untuk memahami ketertindasan terhadap perempuan di segala area termasuk perekonomian. Diskursus yang dipakai dalam teori ini adalah budaya patriarkal, opresi seksualitas<sup>138</sup>, pemberdayaan perempuan, mensentralkan kepentingan perempuan. Pada tingkat yang lebih luas, ketidaksetaraan dalam dalam berbagai pembangunan termasuk dalam bidang ekonomi terjadi karena institusi-institusi yang bertanggungjawan atas berbagai pelayanan ekonomi justru menciptakan kelas-kelas ekonomi. Berbagai kajian atas perempuan dalam pembangunan memerlukan stidaknya 7 kemampuan (skills) secara sebagaimana ditulis Faisal Basri<sup>139</sup> yaitu:

---

penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual; 6) Hak mendapatkan informasi dan Pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga; 7) Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga; 8) Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak; 9) Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan; 10 ) Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima; 11) Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi; 12) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual.. Lebih luas lihat Yessi Harnani, Hastuti Marlina, dan Elmia Kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi*,Jogjakarta:depublish, 2019

<sup>138</sup> Opresi seksual merupakan tindakan pemaksaan atau merampas kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu dengan kekuatan yang dimilikinya, sehingga dapat membuat seseorang merasakan kesengsaraan dan penderitaan dalam aktifitas seksual

<sup>139</sup> Faisal Basri, *Peta Perekonomian Indonesia Memasuki Era Digital*, Development, ICT, Theguardian.com, 2017. 77; sebagai

*Pertama, Complex Problem solving*, dimana ketika Negara melalui pemanfaatan teknologi mampu merubah khayalan dan impian manusia menjadi sebuah inovasi dengan menghasilkan banyak ragam dan sistem operasi produk barang dan jasa yang kompleks, maka hal itu akan meningkatkan globalisasi dan kemajuan teknologi, berdampak pada banyaknya masalah yang akan dihadapi. Karena itu teknologi selalu merujuk pada sebuah “pertimbangan” melalui penerapan pengetahuan tentang sistem kompleks yang berkaitan dengan struktur dan system dinamik. Perempuan mampu berperan dalam membangun pemanfaatan teknologi.

*Kedua, Critical Thinking* dimana tingkat pendapatan global dapat berdampak nyata bagi kualitas hidup populasi masyarakat dunia. Teknologi menghasilkan harga murah dengan keuntungan jangka panjang dalam Efisiensi dan produktivitas. Dengan teknologi, biaya transportasi dan komunikasi akan menurun, logistik dan rantai pasokan global lebih efektif, dan biaya perdagangan akan berkurang, yang itu semua akan membuka pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perempuan dapat ikut menjadikan teknologi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan. Sehingga secara umum meningkatkan nilai intelektual universal yang melampaui pembagian materi pelajaran: kejelasan, akurasi, presisi, konsistensi, relevansi, bukti yang baik, alasan bagus, kedalaman, keluasan, dan keadilan.

*Ketiga, creativity* yaitu meningkatnya capaian ketika pelaku kebijakan berhasil mengurangi *ketegangan sosial*. Ini artinya Ketika Teknologi mengakibatkan permintaan akan

---

perbandingan lihat Joachim Funke, “Dynamic systems as tools for analysing human judgement”. *Heidelberg University, Germany. Volume 7, 2001. 69-89*

pekerja terampil meningkat sementara permintaan pekerja dengan pendidikan rendah menurun, maka perempuan memiliki kemampuan untuk ikut andil dalam persaingan membangun; *Keempat, People Management* yang mampu mengarahkan pada hasil kuat dan berkelanjutan dengan cara meningkatkan keterlibatan sumber daya manusia yang responsif gender yang bekerja untuk mereka. Sehingga berdampak langsung pada *bottom-line*.

*Kelima, Coordinating with Other* yang efektif untuk meningkatkan skala keuntungan ekonomi. Karena itu dibutuhkan keterampilan berkoordinasi baik laki laki dan perempuan yang mencakup kapasitas untuk mengatur, dan menghubungkannya dengan keseluruhan alur kerja mencakup penanganan krisis, rintangan atau interupsi yang tak terduga; *Keenam, Emotional Intelligence* untuk memacu setiap informasi yang diterima oleh masyarakat tanpa melihat jenis kelamin, sehingga setiap orang bisa mendapatkan “banjir informasi”, baik yang bersifat lokal-regional dan internasional;. *Ketujuh, Judgement and Decision Making*, keputusan yang baik membutuhkan tujuan yang jelas, spesifik, terukur, disepakati, realistis dan memiliki ketergantungan waktu.

Peranan perempuan di bidang perekonomian Asia-Pasifik pada lima tahun mendatang akan memberi nilai tambah US\$ 4,5 triliun. Sedangkan secara global, kesetaraan perempuan dapat memberikan kontribusi ke ekonomi US\$ 12 triliun pada 2025. Wirausaha perempuan yang mendapat kesempatan sama dengan laki-laki berpotensi meningkatkan PDB global 3-6% menjadi US\$ 5 triliun<sup>140</sup>. Dalam konteks

---

<sup>140</sup>Agatha Olivia Victoria, "Kontribusi Perempuan ke Ekonomi Indonesia Bisa Rp 1.957 T pada 2025", diakses dari <https://katadata.co.id>, Tanggal 30 Agustus 2021

perempuan dan pembangunan persaingan di era global dan ekonomi digital ini merupakan tantangan yang harus diraih dan dijadikan sebuah peluang untuk mendukung pengembangan diri. Tidak banyak kaum perempuan siap menghadapi kondisi ini, hanya mereka yang berpendidikan yang baik memungkinkan untuk bersaing dan memenangkan persaingan ini.

Di Indonesia, peranan perempuan dalam perekonomian semakin signifikan. Pada sektor UMKM, 53,76%-nya dimiliki oleh perempuan, dengan 97% karyawannya adalah perempuan, dan kontribusi dalam perekonomian 61%. Di bidang investasi, kontribusi perempuan mencapai 60%. Perempuan Indonesia memiliki potensi tinggi bersaing di era ini terutama dalam jumlah penduduk yang besar dengan sejumlah *skill* yang dimiliki. Hasil riset Lembaga Wealth-X bekerja sama dengan Bank UBS AG asal Swiss menyatakan bahwa dari keseluruhan 865 orang superkaya di Indonesia, ada 80 orang adalah perempuan dari pelbagai latar belakang. Jika digabungkan, wanita Indonesia yang punya kekayaan di atas rata-rata, nilai asetnya mencapai USD 4 miliar atau setara Rp 45,4 triliun<sup>141</sup> dan mereka berpartisipasi dan andil dalam pembangunan seperti:

1. Sri Mulyani Indrawati, menteri keuangan dan direktur pelaksana Bank Dunia. Sejak menjabat sebagai Managing Director pada Mei 2010, ia menjadi perempuan paling senior di Bank Dunia dan dianggap konstan dalam kepemimpinan organisasi.

---

<sup>141</sup>Ardyan Muhammad, "Daftar Perempuan Indonesia Berpengaruh dalam Perekonomian Dunia, diakses dari <https://www.merdeka.com>, Tanggal 30 Agustus 2021.

2. Kartini Muljadi, alumni Mahasiswa Hukum, pengembang lini usaha Grup Tempo Scan Pacific.
3. Mar'i Elka Pangestu, Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masa Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, sosok perempuan Indonesia yang sangat disegani dalam organisasi perdagangan dunia (WTO). Menjabat Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
4. Karen Agustiawan, direktur Utama PT Pertamina masuk dalam daftar perempuan berpengaruh dunia asal Indonesia versi Fortune berada di urutan 11. Karen dianggap sukses membawa Pertamina mendapat peningkatan keuntungan sampai 15 persen atau USD 2,7 miliar dari pencapaian tahun sebelum dan dianggap capaian itu tertinggi, sejak 45 tahun BUMN tersebut berdiri<sup>142</sup>.
5. Susi Pudjiastuti Pemilik dan Presiden direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Pada tahun 2008, dia mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT ASI Pudjiastuti Flying School.
6. Maya Miranda Ambarsari, Pemilik dan President Director PT. BATAMEC Shipyard (galangan kapal) berasal dari Palembang. co-founder dan shareholder di Pertambangan Emas PT. Merdeka Copper and Gold Tbk, Pemilik Elliotti Residence, yaitu guest house eksklusif di kawasan Pondok Indah, Cipete dan Cisarua.

---

<sup>142</sup> Ardyan Muhammad, "Daftar Perempuan Indonesia Berpengaruh dalam Perekonomian Dunia, diakses dari <https://www.merdeka.com>, Tanggal 30 Agustus 2021

7. Noni Purnomo adalah Direktur Utama PT Blue Bird, Tbk. Noni juga menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi beberapa anak perusahaan, di antaranya yaitu sebagai Komisaris Utama PT Pusaka Nuri Utama, PT Pusaka Bumi Transport. Direktur Utama PT Morante Jaya, PT Pusaka Satria Utama, dan PT Pusaka Bumi Mutiara.
8. Dian Siswarini adalah Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk, Dian Siswarini merupakan perempuan pertama yang memimpin perusahaan telekomunikasi yang sudah terbuka untuk publik atau sudah melantai di bursa, Dian juga berhasil meraih Golden Globe Tigers Award for Women Leadership, juga masuk dalam daftar Forbes Asia's Power Businesswomen.
9. Teresa Wibowo bergerak di bidang e-commerce. Teresa merupakan pimpinan Ruparupa.com, yang merupakan saluran omni e-commerce terbesar di Indonesia, melibatkan lebih dari 300 toko Kawan Lama Retail yang tersebar di 41 kota di Indonesia dengan lebih dari 60 ribu jenis produk. Perusahaan e-commerce milik Grup Kawan lama tersebut berfokus pada bisnis retail dan membawahi sejumlah anak perusahaan antara lain Ace Hardware, Informa Furnishings, dan Toys Kingdom<sup>143</sup>.

Berbagai contoh tersebut melihat peran perempuan di dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di sektor perikanan, data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) 2015 menyebutkan, perempuan mengerjakan 70% pekerjaan produksi perikanan dengan waktu kerja hingga 17 jam, mulai dari menyiapkan bahan bakar, perbaikan alat menangkap ikan, memasak bahan

---

<sup>143</sup> Tania Sentia, "5 Perempuan Indonesia yang Sukses Jadi Pebisnis, diakses dari [www.liputan6.com/](http://www.liputan6.com/) tanggal 30 Agustus 2021

makanan untuk nelayan laki-laki. Setelah ikan tiba di dermaga, perempuan kemudian berperan sebagai penjual atau pengupas kerang. Mereka juga ahli dalam mengolah ikan menjadi makanan siap saji, seperti tekwan, sambal, ataupun kerupuk sehingga harga jual produk ikan menjadi naik. Demikian juga keterlibatan perempuan pada bidang-bidang lain, termasuk politik dan pemerintahan. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Jusuf Kalla pada 2014-2019, perempuan kian diberdayakan dengan ditetapkan peraturan mengenai kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik.

Dalam sebuah forum *Trading Development and Gender Equality* yang berlangsung di *Asian Development Bank Annual Meeting* 2019 di Nadi, Fiji dijelaskan bahwa kaum perempuan adalah aset, potensi, dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa. Mengingat, perempuan adalah pendidik pertama di dalam keluarga.

Berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 lalu, populasi Indonesia pada 2020 mencapai tak kurang dari 264,2 juta jiwa atau 50,2% adalah laki-laki sementara 131,5 juta jiwa atau 49,8% adalah perempuan. Sedangkan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia diketahui mengalami kenaikan dari 90,82 pada 2016 menjadi 90,99 di 2019. IPG yang mendekati 100 itu secara jelas mengindikasikan bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia ikut tercatat naik dari 71,39 pada 2016 menjadi 71,74 di 2017. IDG adalah

indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Data BPS, sekitar 26% pekerja perempuan adalah pekerja sektor rumah tangga, selain itu, sebagian besar pekerja perempuan adalah pekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah yang proporsinya mencapai 89% atau sekitar 43,8 juta jiwa.

### **C. Perempuan dan Pengembangan Usaha Produktif**

Melihat data statistik sampai tahun 2020, jumlah penduduk perempuan senantiasa lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Kondisi ini tidak diimbangi dengan peran yang proporsional dimana peran yang dimiliki oleh perempuan dalam pembangunan senantiasa lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Hal ini menyebabkan status atau kondisi perempuan relatif tidak diuntungkan sehingga berdampak pada jumlah perempuan yang belum dapat melaksanakan seluruh peran-peran yang dapat dilakukan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu kondisi dimana keseluruhan aktor yang terlibat dalam masyarakat senantiasa berupaya untuk mewujudkan kondisi sosial yang baik. Pembangunan juga diimbangi dengan nilai atau keadaan ekonomi masyarakat yang baik.

Upaya mewujudkan kondisi tersebut perlu adanya partisipasi yang cukup tinggi antara laki-laki maupun perempuan dalam berbagai sektor. Upaya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, industri kreatif merupakan jawabannya. Perempuan telah sukses mendominasi serapan tenaga kerja di sektor industri kreatif. Dalam Laporan Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif, BPS dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyebut perempuan secara konsisten menjadi



pemain utama industri kreatif sejak 2011 hingga 2019. Persentase perempuan di sektor ini sebesar 53,86%. Angka yang cukup mencolok bila dibandingkan dengan komposisi industri pada umumnya, di mana pekerja perempuan hanya sekitar 37,16% dan laki-laki sebesar 62,84%. Pada 2019, perempuan yang bekerja di sektor ekonomi kreatif sebanyak 9,4 juta orang. Industri ekonomi kreatif juga membuka kesempatan bagi perempuan untuk memberdayakan diri, khususnya secara ekonomi, melalui industri film. Seperti tahun-tahun terakhir ini, Indonesia memunculkan para pembuat film (*film maker*) perempuan, baik sebagai sutradara, script writer, produser, hingga teknik audio video.

Berdasarkan perspektif kedudukan, peran perempuan dapat dibagi kedalam dua perspektif yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik atau biasa kita kenal peran tradisi merupakan peranan yang menjadi urusan atau pekerjaan seorang perempuan. Mulai dari semua pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mengurus anak, memasak, mencuci, merawat dan membesarkan anak kesemuanya harus dilakukan oleh seorang perempuan. Konsep ini masih sangat melekat dalam struktur sosial masyarakat kita dimana senantiasa menempatkan perempuan sebagai aktor yang lemah dan tidak berdaya. Menurut pandangan tersebut perempuan dijadikan sebagai aktor yang harus senantiasa dirumah dan tidak diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan lain diluar rumah. Peran publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh perempuan diluar pekerjaan domestik. Peran publik ini menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan, peningkatan ekonomi, pengembangan diri dan kegiatan disektor lain. Peran perempuan dalam ranah publik ini memunculkan suatu konsep baru dimana perempuan sudah diberi kesempatan

untuk dapat melakukan aktivitas diluar rumah melalui kegiatan kegiatan lain diluar sektor domestik<sup>144</sup>

Kajian juga memperlihatkan tingkat partisipasi perempuan Indonesia di bidang kewirausahaan tertinggi di Asia Tenggara. Meski begitu, para wirausaha perempuan masih menghadapi tantangan berupa kurangnya jaringan bisnis dan keterampilan pemasaran. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei Google bersama Kantor bertajuk *Advancing Women in Entrepreneurship*. Google mensurvei 990 Responden perempuan dan 510 laki-laki pada Januari-Februari 2020 tentang alasan mereka memilih untuk bekerja serta hal yang penting bagi mereka saat mencari pekerjaan. Penelitian tersebut menemukan 49% perempuan menyatakan diri sebagai pewirausaha dengan bisnis yang mereka jalankan sendiri saat ini. Sedangkan, 45% berkata baru ingin berwirausaha. Dari sisi laki-laki, 61% dari mereka berkata sudah menjadi pewirausaha dan 34% menyatakan ingin berwirausaha. Bagi perempuan yang baru memulai berwirausaha, tantangan terbesar yang dihadapi berupa kurangnya rasa percaya diri, ketakutan akan kegagalan, dan pemahaman tentang cara memulai usaha<sup>145</sup>. Berdasarkan literatur, upaya membangun dan mengembangkan usaha

---

<sup>144</sup>Lebih luas lihat “Pembagian Kerja Secara Seksual Dan Peran Gend. Dalam Buku Pelajaran SD”; Dharwiyanto Putro, “Beban Ganda: Kondisi Perempuan Pemulung Pada Masa Pandemi Di Tempat Pengolahan Sampah Monang Maning, Denpasar”; Ruswinarsih, “Aktivitas Domestik Dan Publik Perempuan Kerja (Studi Terhadap Perempuan Pedagang Kelontong Di Pekapuran Raya Banjarmasin)”; Omara, “Perempuan, Budaya Patriarki Dan Representasi”; Rosyidah, “Maskulinitas Dan Feminitas Kepemimpinan Pendidikan Islam: Kajian Deferensiasi Otak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Neurosains.”

<sup>145</sup>Agatha Olivia Victoria, "Kontribusi Perempuan ke Ekonomi Indonesia Bisa Rp 1.957 T pada 2025", diakses dari <https://katadata.co.id>, Tanggal 30 Agustus 2021

produktif dan usaha kreatif memerlukan strategi. Hendro dalam bukunya *Dasar-dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk. Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis* menjelaskan strategi dalam hal tersebut, yaitu<sup>146</sup>:

*Pertama*, mengembangkan pasar dari sisi produknya adalah langkah awal yang dapat dilakukan berhubungan dengan usaha sehingga masalah profitabilitas (kemampuan mendapatkan laba) serta popularitas dan kualitas sudah diterima di pasar seperti 1) Memperbesar variasi produk; 2) membuat katagorisasi produk seperti kelompok dewasa, remaja dan anak anak dan semuanya diatur berdasarkan standar masing masing katagori; 3) Berbasis lini produk

*Kedua*, Mengembangkan pasar dari sisi sistem penjualannya antara lain 1) mengembangkan system distribusi penjualan kedalam seperti membuka outlet, agen; 2) mengembangkan jaringan melalui Kerjasama dengan pihak lain; 3) mengembangkan system jaringan pemasaran dengan pihak lain, seperti Multi Level Marketing; 4) membangun subkontraktor desain, supplier; Kerjasama outsourcing; Mengembangkan pasar dengan menggabungkan bisnis yang lain dalam satu industri

*Ketiga*. Mengembangkan Pasar dengan strategi integrasi dalam bentuk 1) Integrasi vertikal (hulu ke hilir dari flow industry) dengan cara membeli perusahaan kedalam (pemasok, konsultan, produsen) atau membeli perusahaan keluar arah konsumen (distributor, lagu happy , agen, outlet). Contohnya adalah perusahaan mie yang membeli perusahaan gandum, perusahaan hypermarket yang membeli perusahaan

---

<sup>146</sup> Hendro, *Dasar-dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk. Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011. 515

jaringan mini market; 2) Integrasi horizontal (antar produk, antar kategori). Penyatuan integrasi perusahaan-perusahaan yang produknya tidak sama tetapi menunjang kesuksesan bisnisnya. Contohnya adalah perusahaan sepatu membeli perusahaan alat-alat olahraga.

*Keempat*, Melakukan pengembangan pasar dengan cara mengadakan perjanjian kerja sama antara dua perusahaan yang berbeda pasar dengan tujuan swap market atau tukar pasar dan memperkuat satu sama lainnya karena keduanya mempunyai keistimewaan. Perusahaan yang satu ingin memasarkan produknya ke pasar dan perusahaan yang lainnya ingin menambah calon pelanggan. Contohnya adalah bank dan asuransi, rumah sakit dengan asuransi, dealer mobil dengan asuransi.

Selanjutnya dalam mengembangkan usaha produktif dilakukan dengan berbagai konstruksi. Kustoro Budiarta menjelaskan tahapan sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut<sup>147</sup>: *Pertama*, perempuan wirausaha menggali dari ide usahanya yang didapat dari berbagai sumber dan pengalaman sendiri maupun dari pengalaman orang lain; *Kedua*, Penyaringan konsep usaha untuk membangun hal yang lebih spesipik. Karenannya, studi kelayakan menjadi urgen baik dilakukan secara formil maupun secara non formal; *Ketiga*, Pengembangan Bisnis Plan dengan melakukan perhitungan proyeksi rugi-laba dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba-rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha (business plan), para wirausahawan

---

<sup>147</sup> Kustoro Budiarta, *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2009. 153

memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana usaha. Disamping ketiga tersebut dilakukan juga implementasi rencana tersebut dengan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, tenaga kerja, dan material<sup>148</sup>.

Konstruksi tersebut memperlihatkan perlunya kajian terutama menilai 7 (tujuh) peran yang dapat dijalankan oleh perempuan dimana sebagian besar lebih berorientasi pada keluarga dan sebagainya lain pada masyarakat secara sosial. Ketujuh peran tersebut antara lain : 1). Peran sebagai orang tua, 2). Peran sebagai istri , 3). Peran didalam rumah tangga, 4). Peran didalam kekerabatan, 5). Peran pribadi , 6). Peran didalam komunitas , 7). Peran didalam pekerjaan<sup>149</sup>.

Berdasarkan perkembangan yang ada, perempuan selama ini telah mengalami subordinasi<sup>150</sup>, violence<sup>151</sup>, Streotype<sup>152</sup>, dan marjinalisasi<sup>153</sup> diberbagai sektor

---

<sup>148</sup> Nur Fitri Mutmainah, *Peran Perempuan Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Kegiatan UMKM Di Kabupaten Bantul*, Jogjakarta: Universitas Aisyiyah, 2020.17

<sup>149</sup> Nur Fitri Mutmainah, *Peran Perempuan Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Kegiatan UMKM Di Kabupaten Bantul*, 19

<sup>150</sup> Terjadi subordinasi terhadap kaum perempuan yang dianggap sebagai mahluk nomor 2 yang tidak memiliki arti dan makna dalam kehidupan masyarakat. Bahkan ada adagium yang menyakitkan bagi kaum perempuan, dimana mereka hanya dipantaskan dalam 3 hal yaitu ranjang, rumah, dan dapur

<sup>151</sup> Kekerasan (violence) yang kebanyakan dialami oleh kaum perempuan, yang hanya disebabkan perbedaan gender

<sup>152</sup> Pelabelan negatif (stereotype) terhadap jenis kelamin perempuan yang mengakibatkan diskriminasi dan berbagai ketidakadilan muncul. Dalam masyarakat banyak sekali stereotype yang dilekatkan pada perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan.

<sup>153</sup> Marginalisasi yang dimaksud adalah ketidaktersediaan kesempatan dan peluang yang luas bagi perempuan untuk memperoleh pekerjaan profesi di luar rumah. Seakan-akan banyak pekerjaan yang

kehidupan. Perempuan memakai keseluruhan waktunya untuk melaksanakan kegiatan diluar urusan domestik. Disisi lain tanggung jawab domestik yang harus dijalankan oleh perempuan tetap senantiasa menjadi kewajiban perempuan. Doktrin dan keyakinan yang ada dan berkembang dilingkungan sosial masih menempatkan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki sehingga berdampak pada peran ganda yang harus dijalani perempuan dalam aktivitasnya. Oleh sebab itu konsep perempuan sebagai ibu yang harus mengurus anak-anak, ratu yang cakap dalam rumah tangga menjadi bagian budaya patrialkhi, masih sangat nyata dinegeri ini dan senantiasa bertahan dan dipertahankan sekalipun zaman telah berubah dengan cepat<sup>154</sup>

Dalam perkembangan era yang ditandai diantaranya perempuan semakin nyata terlihat dengan partisipasinya didunia kerja yang senantiasa layak dan terbukti mampu meningkatkan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam aktivitas produksi juga terbukti mampu mempertahankan keberlanjutan ekonomi rumah tangga melalui usaha micro kecil yang dilakukan baik secara tradisional maupun terstruktur. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja yang senantiasa mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil studi menemukan bahwa setidaknya terdapat 2 hal yang menjadi alasan pokok perempuan terlibat dalam pasar kerja. *Pertama* keharusan

---

tercipta hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan tidak cocok dan tidak pantas digeluti oleh perempuan

<sup>154</sup> Lebih luas lihat Achmad Hidir,. "Bias gender dalam infertilitas". Diakses [www.kompas.com](http://www.kompas.com) tanggal 31 Agustus 2021; sebagai perbandingan lihat juga Mujahidah, "Dinamika Gender Dan Peran Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga", *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8 No. 2 Juli-Desember 2015; A. Fitri Balasong, *Imaji; Sketsa Pergolakan Batin Perempuan*. Makassar: Pustaka Sawerigading, Cet. I. 2008. 1-22;

sebagai suatu refleksi dari kondisi ekonomi rumah tangga yang rendah, sehingga bekerja untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga merupakan hal yang penting dan menjadi keharusan. *Kedua* memilih untuk bekerja sebagai refleksi kondisi sosial ekonomi pada tingkatan menengah ketas. Bekerja dimaknai sebagai sesuatu bukan semata-mata diorientasikan untuk mencari tambahan dana untuk ekonomi keluarga tetapi merupakan salah satu aktivitas aktualisasi diri, mencari afiliasi diri dan wadah untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat.

Berbagai kajian tersebut memberikan penegasan bahwa Peran perempuan dalam menjalankan manajemen usaha yang dikelola perempuan tidak pernah lepas dari fungsi dan tugas pokok ibu rumah tangga sebagai pengelola rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak dan menjadi partner suami. Oleh karena itu manajemen usaha keluarga merupakan penjabaran cita-cita keluarga yang di bawah tanggung jawab dan "arahan" kepala keluarga. Manajemen usaha keluarga adalah merupakan perangkat sistem untuk mewujudkan visi atau cita-cita keluarga di masa yang akan datang. Tanpa cita-cita keluarga yang jelas, tidak akan ada sistem manajemen usaha keluarga yang solid dan tepat. Perangkat sistem untuk mewujudkan visi atau cita-cita keluarga mempunyai tiga aspek utama, yaitu 1) aspek perencanaan usaha keluarga dengan kemampuan membaca peluang usaha yang layak dan menguntungkan dilakukan oleh potensi dan kapasitas sumber daya keluarga. Kemudian kemampuan mengidentifikasi sumber sumber daya keluarga baik kapasitas dan kemampuan yang dimiliki anggota keluarga. Memperhatikan posisi tempat tinggal keluarga hubungannya dengan kelayakan membuka usaha, dan juga dapat mengidentifikasi "potensi modal" keluarga yang dapat

digunakan<sup>155</sup>

Aktifitas tersebut dapat dicontohkan dengan *nick-preneurship* usaha makanan(catering); adalah bagi perempuan yang hoby memasak maka sebaiknya mempunyai usaha produksi atau jasa pembuatan makanan. Bahan baku makan yang digunakan sebaiknya menggunakan bahan bahu yang setiap harinya digunakan untuk membuat makanan keluarga. Cara penjualannya bisa menitipkan produksi makanan kepada warung warung terdekat, atau dititikan anak atau saudaranya yang pergi ke sekolah atau bekerja.

Contoh lain *nick-preneurship* rias dan alat kosmetik; adalah perempuan yang hoby merias diri di salon, maka sebaiknya mempunyai usaha jasa rias. Bahan bakunya adalah alat alat kosmetik yang biasa dipakai oleh dirinya dan teruji kualitasnya. Sehingga disamping berusaha sebagai jasa merias juga bisa menjadi distributor alat kecantikan. Para pelanggannya adalah bermula dari saudara atau kawan dekatnya. Contoh lain *nick-preneurship* produksi hiasan rumah seperti merangkai bunga, maka sebaiknya membuka usaha produksi bunga hias baik imitasi maupun buka alami. Bahan bakunya bisa dari barang barang “bekas” atau tanaman hias yang sudah dipakai atau disenangi. Cara penjualannya bisa melalui hubungan keluarga, teman atau menitipkan pada toko toko yang dipercaya. Keunggulan manajemen usaha dengan perspektip *nickpreneurship* adalah tidak terlalu membutuhkan modal usaha yang relatip besar, dan pengelolaannya tidak terlalu mengurangi peran perempuan sebagai ibu rumah tangga<sup>156</sup>.

---

<sup>155</sup> Wahid Abdul Mustafa,. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Diva Press. 2004. 77-79

<sup>156</sup> Nur Fitri Mutmainah, *Peran Perempuan Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Kegiatan UMKM Di Kabupaten Bantul*, 258





### BAB III

## PEREMPUAN, USAHA PRODUKTIF DAN *BAITUL MAL WA TAMWIL* DI KOTA PALEMBANG

### A. Palembang: Sketsa Sejarah dan Perkembangan

Palembang berada di Propinsi Sumatera Selatan<sup>157</sup> terletak antara 101°-105° bujur timur, dan 1,5°-2° Lintang Selatan berada pada propinsi Sumatera Selatan bagian timur, di jalur sungai Musi 105 km dari laut (selat Bangka) yang merupakan induk dari 9 sungai kecil (Batang Hari Sembilan) yang mengitari Propinsi Sumatera Selatan<sup>158</sup>. Di kenal dengan Jembatan Ampera dan menjadi pusat kerajaan sriwijaya dan sekaligus muara pelabuhan perdagangan yang menjadi penguasa perdagangan di Nusantara, dan sekaligus penyelenggara keamanan di Asia Tenggara<sup>159</sup>.

---

<sup>157</sup> Sumatera Selatan memiliki 17 kabupaten kota yang meliputi: 1) Kabupaten. Ogan Komering Ulu (Ibukota Baturaja); 2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Ibukota Martapura); 3) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Ibukota Muara Dua); 4) Kabupaten Ogan Komering Ilir (Ibukota Kayu Agung); 5) Kabupaten Muara Enim (Ibukota Muara Enim); 6) Kabupaten Lahat (Ibukota Lahat); 7) Kabupaten Musi Rawas (Ibukota Muara Beliti); 8) Kabupaten Musi Banyuasin (Ibukota Sekayu); 9) Kabupaten Banyuasin (Ibukota Pangkalan Balai); 10) Kabupaten Empat Lawang (Ibukota Tebingtinggi); 11) Kota Ogan Ilir (Ibukota Indralaya); 12) *Kota Palembang (Ibukota Palembang)*; 13) Kota Pagar Alam (Ibukota Pagar Alam); 14) Kota Lubuk Linggau (Ibukota Lubuk Linggau); 15) Kota Prabumulih (Ibukota Prabumulih); 16) Kabupaten Panukal Abab Iematang Ilir (Ibukota Talang Ubi); 17) Kabupaten Musi Rawas Utara (Ibukota Muara Rupit), diakses dari <http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp>

<sup>158</sup> Sungai Musi merupakan pusat dari sungai-sungai kecil sekitarnya. Seperti, sungai Kikim, sungai Kelingi, sungai Lakitan, sungai Rawas, sungai Lematang, sungai Enim, sungai Ogan, sungai Komering, dan sungai Banyuasin.

<sup>159</sup> Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hh. 34-39; Sartono Kartodirjo, et al, *Sejarah Nasional Indonesia III*,

Nama Palembang berasal dari kata *Lembeng* atau *Lembang*, yakni tanah berlekuk, tanah rendah, akar yang membengkak akibat lama terendam dalam air. Tetapi dalam bahasa Melayu, *lembang* memiliki arti rembesan air. Arti dari kata Palembang itu semuanya adalah tanah yang berair. Hal tersebut dibuktikan dengan data statistik di tahun 1990, terdapat 52,24% tanah di kota Palembang masih tergenang. Bisa dilihat, di Kotamadya saat ini tercatat 117 buah anak-anak sungai di tengah kota<sup>160</sup>.

Dalam literatur disebutkan bahwa Palembang adalah kota paling tua di Indonesia, yang umurnya kurang lebih 1324 tahun, berdasarkan prasasti Kedukan Bukit (683 M), ditemukan pada Bukit Siguntang, sebelah barat dari Kota Palembang, menyatakan pembentukan suatu Wanua dan ditafsirkan menjadi kota yakni ibukota dari Kerajaan Sriwijaya pada 16 Juni 683 Masehi serta dijadikanlah sebagai hari lahir dari Kota Palembang. Palembang juga diyakini masyarakat melayu adalah tanah leluhurnya. Karena berada di kota inilah munculnya cikal bakal dari raja Melayu yang pertama yakni bernama Parameswara turun di Bukit Siguntang. Tapi kemudian Parameswa pergi dari Palembang bersama dengan Sang Nila Utama menuju Tumasik yang diberilah nama Singapura untuk Tumasik<sup>161</sup>.

---

Jakarta: Balai Pustaka, 1977; Abdul Hamid, et al, Sejarah Umum, Jakarta: Depdikbud, 1979, hh. 103-104.

<sup>160</sup>Keadaan Palembang yang berkondisi perairan dimanfaatkan sebagai alat transportasi vital, efisien, ekonomis, daya jangkau dan kecepatan yang tinggi. Disamping kondisi alam, juga kota strategis yang bisa mengendalikan lalu lintas dari tiga kesatuan daerah 1) tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yakni : bernama Pegunungan Bukit Barisan; 2) Daerah kaki bukit dan pertemuan anak sungai yang memasuki daerah dataran rendah; dan 3) Daerah pesisir timur laut.

<sup>161</sup> Zuhaidah Ma'rifah, *Ayo Mengenal Indonesia : Sumatra 2*, Semarang: Alfirm, 2019.6

Palembang memiliki berbagai macam suku dan agama, dianut mayoritas muslim sebab Palembang merupakan tempat kelahiran Raden Fatah, Raja Islam pertama di Demak<sup>162</sup>. Pada masa kesultanan Palembang, Islam telah menjadi agama resmi yang dilambangkan dengan gelar Sultan untuk pemimpin tertinggi kerajaan Palembang<sup>163</sup>. Dalam mengamati proses Islamisasi Palembang dengan mengambil pengandaian. Taufiq Abdullah bahwa jika saja Palembang hanyalah kota pelabuhan dan kerajaan maritim yang terlepas dari perikatan pertuanan, maka bukan tak mungkin perkembangan Islam akan

---

<sup>162</sup> J. Noorduyn, *Islamisasi Makassar*, Jakarta: Bharata, 1972, h.10; Raden Fatah menurut tutur Jawa adalah anak Prabu Brawijaya dari majapahit yang beristrikan wanita China, yang ketika hamil diserahkan kepada Adipati Palembang Ario Damar. Setelah lahir, ia dibesarkan di Palembang dan dididik secara Islam bersama Raden Kusen hingga berumur 20 tahun. Setelah itu ia kembali dikirimkan bersama Raden Kusen ke tanah Jawa untuk memperdalam pengetahuan agama kepada Sunan Ampel, lihat. Hamka. *Sejarah Umat Islam*, Jilid IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, h. 148-149

<sup>163</sup> Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tk.I Sumatera Selatan, *Indonesia Lintasan Sejarah Budaya Sumatera Selatan*, tp.1995. 46. Penelitian Johan Hanafiah menambahkan pada masa inilah Kesultanan Palembang ditambah dengan “Darussalam” setelah Sultan Abdulrahman menyatakan bahwa agama Islam adalah agama rakyat dan agama Sultan. Lihat Johan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, Jakarta: Haji Masagung, 1989; Pada perjalanan pengembangan Islam di Palembang memunculkan ulama yang mencapai kemasyhuran, diantaranya Abd. Al Shamad al-Palembani dengan nama lengkap Abd Shamad bin ‘Abd Allah al-Jawi al-Palembani. Dilahirkan sekitar 1116/1704 di Palembang dan ayahnya adalah seorang Sayyid. Ia berasal dari Sana’a, di Kedah di Semenanjung Melayu. Selanjutnya dia di tunjuk menjadi Qadhi kesultanan Kedah; Selanjutnya ulama yang terkenal untuk pengembangan Islam di Palembang adalah Syekh Syihabuddin bin Abdullah Muhammad Kemas Fakhruddin; Muhhammad Muhyiddin bin Syekh Syihabudin; Kemas Muhammad bin Amad; dan Muhammad Makruf bin Abdallah Khatib Palembang (*dikutip dari beberapa sumber*).

menyamai Malaka ataupun Makasar. Mula-mula tentu saja penganut Islam hanyalah terdiri dari pedagang. Kemudian entah karena *coup d'etat* di istana, seperti mungkin di Malaka, atau raja kehilangan kepercayaan kepada “dunia lama” seperti Makassar, atau bahkan, karena pertimbangan politik dan ekonomi—seperti yang diperkirakan oleh Van Leur mengenai kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa—penguasa Palembang akan menganut Islam<sup>164</sup>.

Sejarah menjelaskan pusat pemerintahan kesultanan adalah Palembang dengan membangun perbedaan penduduk asli dan pendatang, baik dari Arab (datang tahun 1690), Cina (datang tahun 1720), Hindustan (datang tahun 1800, dan Eropah (mulai VOC muncul<sup>165</sup>). Penduduk asli dibagi dalam dua golongan: *golongan priyayi*, dengan tiga tingkatan. yaitu, Pangeran<sup>166</sup>, Raden<sup>167</sup> dan Masagus<sup>168</sup>; golongan kedua

---

<sup>164</sup> Taufik Abdillah. *Islam dan masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987. 209-210. Beberapa bukti perkembangan agama Islam adalah, koleksi perpustakaan keraton Palembang diketahui lengkap dan rapi dari laporan Van Sevenhoven ketika mengirimkan kitab dan naskah hasil rampasan ke Batavia. Masjid agung yang didirikan pada tahun 1738 (1 Jumadil Akhir 1151 H) oleh Pangeran Ario Kesumo bergelar Sultan Abdurrahman Ru'yat Syah yang juga bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatul al-Mukiminun Sayidul Imam atau lebih dikenal dengan nama Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo, dikenal juga dengan Ario Kesumo Abdul Rahim atau sesusuhun Abdul Rahman

<sup>165</sup> Ma'moen Abdullah, *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, Palembang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai Nilai Budaya, 1992. 3; B. Yass, *Cerita rakyat dari Sumatra Selatan*, Jakarta: Gramedia Widiasarna, 1993.

<sup>20</sup> Gelar tertinggi kepada putera mahkota (biasanya anak laki-laki tertua dari sultan Palembang).

<sup>21</sup> Raden berarti yang dijunjung atau dicintai. Gelar ini diberikan kepada anak laki-laki dari hasil perkawinan seorang Pangeran dengan anak perempuan seorang Pangeran. Gelar ini berlaku otomatis dan tidak diberikan kepada orang lain.

<sup>22</sup> Masagus berarti berharga banyak. Gelar ini diberikan kepada anak laki-laki dari hasil perkawinan seorang Pangeran atau Raden dengan

adalah rakyat. Dalam kesultanan Palembang menjadi dalam tingkatan yaitu: Kemas<sup>169</sup>, Kiagus<sup>170</sup>, dan rakyat kebanyakan. Golongan rakyat kebanyakan dibagi atas: Miji<sup>171</sup>, Senan<sup>172</sup>, dan Budak<sup>173</sup>

Seperti masyarakat Sumatera Selatan lainnya, Palembang pada umumnya bertipologi *figuristik* yang patuh terhadap seseorang yang dianggap berwawasan pengetahuan, pemuka adat, maupun pemuka agama. Mereka merupakan sentral figur yang selalu digugu, di tiru dan diikuti. Sejak Kesultanan Palembang Darussalam sampai sekarang, dinamika masyarakat Sumatera Selatan selalu terkait erat dengan pengetahuan para ulama di setiap desa sampai perkotaan, mereka sangat fanatik terhadap semua ucapan mereka yang dianggap guru ngaji, ulama ataupun kyai; *ketiga*, tradisi intelektual ulama desa berkaitan erat dengan

---

seorang Masagus berarti berharga banyak. Gelar ini diberikan kepada anak laki-laki dari hasil perkawinan seorang Pangeran atau Raden dengan seorang pempuan dari golongan rakyat biasa. Ratu = gelar bangsawan untuk istri sultan; Raden ayu atau denayu= gelar istri dan anak perempuan dari pangeran dan raden; Masayu= gelar istri dan anak perempuan dari masagus.

<sup>23</sup> Kemas adalah gelar yang diberikan kepada anak laki-laki dari perkawinan seorang masayu dengan seorang pria dari rakyat kebanyakan. Zuhaidah Ma'rifah, *Ayo Mengenal Indonesia : Sumatra 2*, Semarang: Alfirm, 2019.6

<sup>24</sup> Kiagus adalah gelar yang diberikan kepada anak laki-laki dari mantri dan turunan Raden yang terendah dengan rakyat kebanyakan.

<sup>25</sup> Kelompok orang-orang yang mempunyai keahlian atau ketrampilan tertentu, baik tentara, pekerjaan tangan atau membuat karya seni.

<sup>26</sup> Kelompok orang yang rendah dari Miji, tetapi tidak boleh dipekerjakan kecuali oleh sultan

<sup>27</sup> orang yang menggadaikan diri yang tidak langsung berhadapan dengan sultan, atau orang yang telah membeli kemedekaannya

literatur “kitab kuning” yang mereka gunakan masing-masing<sup>174</sup>.

Palembang menjelma menjadi kota besar dengan Sungai Musi dan Jembatan Ampera menjadi landmark-nya. Penduduk Sumsel masih terkonsentrasi di Kota Palembang dengan jumlah 1,6 juta jiwa, sementara paling sedikit itu di Pagar Alam dengan jumlah 143 ribu jiwa. Total jumlah penduduk Sumatera Selatan dari hasil sensus yang berjalan dari Februari hingga September 2020 adalah 8,467,432 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,25 persen. Jumlah ini naik dibandingkan sensus tahun 2010 yang sebanyak 7,450,394 jiwa. Generasi milenial (kelahiran 1982-1996) dan generasi Z (kelahiran 1997-2012) mendominasi total populasi penduduk Sumsel. Generasi milenial sebanyak 26,92 sedangkan untuk generasi X sebanyak 20,83 persen dari total populasi.

Pada era milenial Palembang mulai berkembang dari semua sisi termasuk dibidang ekonomi dan pengarusutamaan Gender. Industri kreatif di Kota Palembang dinilai berkembang seiring maraknya pagelaran kegiatan atau event skala nasional maupun internasional yang berlangsung di kota itu. Hasil evaluasi memperlihatkan pertumbuhan event di Palembang yang bekerja sama dengan Locket.com meningkat hingga 220% sejak pertengahan 2018. Palembang memiliki potensi pertumbuhan event di semua skala,

---

<sup>174</sup>Ahmad Muflih Saefuddin, “Peranan Tokoh Agama dalam kaitannya dengan Penanggulangan Kemiskinan, Kemelaratan, dan Ketergantungan”, (Hasil Penelitian), dalam Sudjangi (ed), *Kajian Agama dan Masyarakat: 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990*, Jakarta Departemen Agama RI, 1992; Abu Ridha, “Problematika Dakwah (Problema Visi dan Implikasinya)”, dalam Adi Sasono, et el (ed), *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)*, Jakarta: Gema Insani press, 2000.

termasuk kategori workshop yang mengalami peningkatan hampir 40%, kategori festival general hampir 32% dan kategori festival musik sekitar 11%.

Banyak komunitas dan individu kreatif baru yang tumbuh dengan berbagai gelaran event-event tersebut juga memberikan dampak lanjutan bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang, berimplikasi mendorong peningkatan jumlah wisatawan dan pengunjung ke Kota Palembang<sup>175</sup>. Pengembangan ekonomi lokal merupakan usaha daerah dalam memacu pembangunan ekonominya dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat keseluruhan secara luas. Pengembangan ekonomi lokal sendiri merupakan penumbuhan suatu lokalitas secara lebih mandiri dengan menggunakan potensi kekuatan lokal, sumber daya manusia, kelembagaan dan fisik dengan upaya yang ditumbuhkembangkan masyarakat lokal itu sendiri (tumbuh jiwa kewiraswastaan lokal) untuk mengorganisasi serta mentransformasi potensi-potensi ini menjadi penggerak bagi

---

<sup>175</sup>Dinda Wulandari, "Industri Kreatif di Palembang Tumbuh Pesat", <https://sumatra.bisnis.com>. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator ekonomi yang bisa memperlihatkan gambaran keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Palembang di tahun 2014 bisa dikatakan mulai stabil seiring dengan mulai membaiknya perekonomian secara global di sepanjang tahun 2011, ditengah dampak krisis global yang masih tersisa. Namun demikian bukan berarti krisis tidak mampu berpengaruh terhadap perekonomian Pemerintah Kota Palembang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai data pendukung dapat mencerminkan gambaran mengenai penciptaan nilai tambah bruto dari berbagai aktivitas ekonomi di Kota Palembang, sehingga arah pembangunan menjadi lebih terpolu dan terukur. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja ekonomi daerah serta dapat menunjukkan arah kebijakan pembangunan suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.



pembangunan lokal sehingga tercipta kondisi yang lebih baik dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hidup untuk seluruh masyarakat<sup>176</sup>

## **B. Peta Usaha Produktif di Kota Palembang Era Pandemi Covid-19**

Secara umum potensi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penguatan ekonomi suatu Negara berimplikasi besar yang dibuktikan dengan ketahanan Usaha micro kecil yang mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi seperti pada tahun 1998. Dari sisi penyerapan tenaga kerja usaha mikro kecil menengah juga mampu menyerap tenaga kerja yang bisa mencapai 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan kontribusi terhadap perputaran produk domestik bruto dikisaran 57% dimasa pandemi Covid-19<sup>177</sup>.

Berdasarkan hal tersebut nilai nilai faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya

---

<sup>176</sup>Badan Perencana Pembangunan Nasional. Panduan Pembangunan Klaster Industri Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Berdaya Saing Tinggi, Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Bappenas, 2021. Tujuan dari pembangunan ekonomi lokal adalah membangun potensi ekonomi yang ada di suatu daerah tertentu untuk meningkatkan keadaan ekonomi dan kualitas hidup untuk semua di masa depan. Dalam proses ini masyarakat, dan mitra dari sektor swasta bekerja secara kolektif dalam menciptakan suatu kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan kesempatan lapangan kerja. Pengembangan ekonomi lokal menyediakan cukup banyak alternatif program atau kegiatan yang dapat dipilih sebagai prioritas dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal di daerah salah satunya mendorong pertumbuhan klaster

<sup>177</sup> Lusius Genik, “Serap 97 Persen Tenaga Kerja, UMKM Terbukti Jadi Penyangga Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19”, <https://www.tribunnews.com>, diakses tanggal 15 September 2021

terkelompok dalam tiga jenis yaitu: 1) usaha mikro dengan jumlah karyawan dibawa 10 orang; 2) usaha kecil antara 10 sampai 30 orang dan 3) usaha menengah hingga hingga 300 orang. Dari ketiga hal tersebut diklasifikasi menjadi 4 kelompok yaitu (1) sector informal seperti pedagang kaki lima; (2) kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya; (3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor; dan (4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar<sup>178</sup>.

Realitas yang terjadi kemudian mengalami perubahan baik dalam ranah ekonomi makro maupun ekonomi mikro pasca merebaknya pandemic covid-19 Pelaksanaan kebijakan isolasi dan *social distance* serta tetap tinggal dirumah yang terpaksa harus diambil pemimpin dunia untuk mengendalikan penyebaran virus ini berimplikasi pada kehancuran dunia usaha dan mengancam keberadaan banyak stratup yang inovatif sehingga terjadi kembali krisis keuangan secara global<sup>179</sup>. Di Indonesia pada tanggal 12 Maret 2020 IHSG

---

<sup>178</sup> Lebih luas lihat *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Kerjasama LIPI dan Bank Indonesia, 2015.

<sup>179</sup>Lihat Ashraf, B. N. Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 27, 100371. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371>, 2020; lihat juga pandangan Donthu, N., & Gustafsson, A. Effects of COVID-19 on business and research. *Journal of Business Research*, 117(June), 2020 284–289. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.008>; Shehzad, K., Xiaoxing, L., & Kazouz, H. (2020). COVID-19's disasters are perilous than Global Financial Crisis: A rumor or fact? *Finance Research Letters*, April, 101669. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101669>. Dampak

jatuh 4,2% dan pada tanggal 13 Maret 2020 perdagangan saham dihentikan untuk pertama kalinya sejak Tahun 2008, walaupun kemudian mengalami kenaikan Kembali dan konsisten diatas level 5.000 sejak Bulan Juli.

Contoh negara Swedia sebagaimana ditulis Thorgren dan Williams yang dikutip dari Nurlinda bahwa dampak Covid-19 mempengaruhi industri perhotelan, ritel dan jasa namun 30% UMKM akan optimis bertahan pada saat sulit, meskipun krisis mengganggu sumber daya bagi UMKM namun mereka akan menemukan pendekatan kreatif untuk menyebarkan sumber daya. Sebagian besar UKM yang menghadapi guncangan eksternal menunjukkan pengambilan keputusan UKM. Focus pada mengurangi arus kas negatif daripada meningkatkan rasio hutang terhadap ekuitas. UKM lebih memilih bangkrut daripada mendorong pada masalah keuangan di masa depan. UKM juga memilih strategi kelangsungan hidup dengan focus pada biaya bukan pada peningkatan pendapatan atau meningkatkan inovasi yang menyebabkan UKM mengabaikan alternatif investasi dan cenderung mempertahankan sumber daya yang ada<sup>180</sup> Padahal dalam jangka panjang alternative insvestasi akan membantu UKM bertahan seperti investasi dalam teknologi terutama teknologi berbasis online.

---

pandemic Covid-19 menyebar dari menurunnya harga saham di AS, Inggris, Spanyol, Hongkong dan Cina hingga harga saham turun sampai level ekstrim seperti yang terjadi di Jerman, Perancis dan Italia (Shehzad et al., 2020). Selain turunnya harga saham dunia industri di Amereka Serikat mengalami kondisi abnormal return terutama pada restoran, hotel dan motel yang memiliki *negative return*.

<sup>180</sup> Nurlinda, Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur, *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*. ISBN: 978-602-53460-5-7

Perkembangan ekonomi dunia yang turun juga berdampak pada Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 hanya sebesar 2,97% jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97% ([www money.kompas.com](http://www.money.kompas.com)). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 menurut Kepala BPS mengalami kontraksi -4.19%. Kontraksi ini terjadi karena investasi yang melemah dan penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)). Konsumsi rumah tangga yang turun pada akhirnya menyebabkan banyak usaha yang mengalami penurunan pendapatan, sebagai dampak daya beli masyarakat yang turun.

Banyaknya usaha yang memilih tutup atau bangkrut pada akhirnya menyebabkan kondisi perekonomian menjadi melemah. Di Indonesia pandemic Covid-19 berdampak pada sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor lainnya, namun Sektor ekonomi yang paling terkena dampak COVID-19 adalah rumah sektor industri tangga, Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dikutip dari [republika.co.id](http://republika.co.id) merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 mencapai 5,07 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*year on year/ yoy*), yakni 5,06 persen. Tapi, dibandingkan kuartal keempat 2018 (*quarter to quarter/ q to q*), angkanya menurun dari 5,18 persen. Faktor Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal pertama diantara factor-faktor penunjang lainnya, yakni hingga 2,75 persen. Sementara itu, faktor terbesar berikutnya adalah pembentukan modal tetap domestik bruto

(PMTB) dengan nilai 1,65 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang berkontribusi 0,30 persen.

Konsumsi rumah tangga ini berkaitan dengan adanya peningkatan atas penjualan eceran yang tumbuh 8,10%, menguat dibanding kuartal I/2018 tumbuh 0,70% sekarang. Penguatan ini antara lain terjadi pada peningkatan penjualan makanan dan minuman, perlengkapan rumah tangga, dan barang lainnya yang berkaitan erat dengan kebutuhan hidup mendasar yang diperlukan masyarakat. Semua kebutuhan ini sudah ada dan menjadi kegiatan pokok ekonomi dalam usaha masyarakat yang dapat kita sebut dengan usaha mikro kecil dan menengah (UKM). walaupun demikian ada satu peluang yang dapat menjadi harapan bergulirnya ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM yang tumbuh dan berkembang dengan baik adalah unit yang telah menerapkan dan tergabung dalam ekosistem digital, sehingga penting segera dilakukan adalah transformasi dari *offline* ke *online*.

Transformasi ini harus segera dilakukan mengingat adanya perubahan perilaku konsumen ke pasar Online. Seperti juga di Provinsi Lain, Kota Palembang sebagai ibukota provinsi memiliki Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang sebanyak 58.321 UMKM dibagi dalam berbagai kluster usaha produktif<sup>181</sup>. Berdasarkan data lapangan berbagai usaha produktif yang berkembang di Palembang dapat dikategorikan sebagaimana dalam tabel berikut:

---

<sup>181</sup> Jumlah UMKM kota Palembang didata sampai bulan Agustus 2021 dari hasil penghitungan jumlah Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM diakses dari <https://bakohumas.palembang.go.id/> tanggal 15 September 2021

**TABEL 3.1**  
**Sentral Komoditi Usaha Micro Kecil Menengah Kota Palembang**

No	Komoditi	Lokasi di Palembang
1	Kain Songket dan Acesoriesnya	1. Tangga Buntung 30 Ilir 2. 32 Ilir 3. Kawasan pasar 16 Ilir sentral penjualan
2	Kain Jumputan dan Acesoriesnya	1. Tuan Kentang, Seberang Ulu I 2. Kawasan pasar 16 Ilir sentral penjualan
3	Makanan Ringan (pemppek, kerupuk, kemplang)	1. Kelurahan Bukit Kecil 2. Kelurahan Alang-Alang Lebar 3. Kelurahan Sekip Jaya 4. Kelurahan 3 dan 4 Ulu 5. Kelurahan 26 Ilir 6. Kelurahan Sungai Pangeran 7. Kelurahan 10 Ulu
4	Kerajinan Ukiran Kayu Khas Palembang	1. Kelurahan 18 Ilir 2. Kelurahan 19 Ilir 3. Kelurahan Sukabangun 4. Kelurahan Sukarami
5	Tekwan dan Model	16 Ilir
6	Tikar Purun	3-4 Ulu

### **C. Partisipasi Perempuan Kota Palembang pada Usaha Produktif**

Pasca hadirnya perundang-undangan terhadap pemberdayaan perempuan berimplikasi perkembangan Gerakan produktif perempuan<sup>182</sup>. Partisipasi perempuan

---

<sup>182</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

apalagi dengan bahwa karakteristik perempuan dalam wirausaha lebih ulet, telaten, rajin dan pantang menyerah. Karakteristik tadi dimiliki kaum perempuan dibandingkan dengan kaum pria, meskipun kaum pria lebih dominan dalam berwirausaha. Masalah pemberdayaan perempuan turut menjadi perhatian Pemerintah, karena pelaku usaha atau yang bergerak sebagai entrepreneur di Indonesia di bawah dua persen dari total penduduk, sedangkan pelaku usaha wanita masih di bawah 0,1 persen<sup>183</sup>, Sektor informal merupakan kegiatan ekonomi alternatif bagi pekerja perempuan di Kota Palembang. Selama ini potret sektor informal identik dengan rendahnya upah, pendidikan, kualitas, produktivitas, dan daya saing serta tidak ada keterampilan.<sup>184</sup>

---

mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

<sup>183</sup> (<http://nasional.republika.co.id/b>)

<sup>184</sup> armansyah And Kiki, “Analisis Karakteristik Demografi Pekerja Wanita Sektor Informal Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean Di Kota Palembang”; Terttiaavini Et AL., “Pengembangan Kewirausahaan ‘Kemplang Tunu’ Sebagai Produk Cemilan Khas Kota Palembang”; Aseptianova, “Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Untuk Pengobatan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 51,8% pada tahun 2018. Pekerja perempuan paling banyak berperan sebagai tenaga usaha jasa. Dominasinya mencapai 58,04% dibanding pekerja tenaga usaha jasa laki-laki di 2019. Kondisi tersebut naik 0,87% dibanding tahun sebelumnya. Perempuan bekerja sebagai tenaga usaha jasa sebesar 58,91% dibanding laki-laki. Kontribusi perempuan tidak hanya pada lapisan ekonomi menengah bawah tetapi juga pada berbagai sector usaha menengah dan besar. Data menunjukkan 21,66% perempuan yang terjun sebagai tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, 35% posisi manager pada perusahaan-perusahaan besar dipegang oleh perempuan.

Hadirnya perempuan dalam usaha produktif berhubungan dengan Tekanan ekonomi yang semakin tinggi membuat peran perempuan dalam keluarga menjadi sangat penting. Kenaikan harga bahan pokok dan biaya pendidikan menjadi argumentasi penting hadirnya kembali perempuan di ranah produktif dengan membangun usaha berbasis rumah (*home industry*). Partisipasi yang mereka jalani dalam usaha produktif meliputi: *Pertama*, sebagai pemilik usaha yang disuport oleh keluarga dalam berbagai bentuk seperti sarapan pagi, warung kelontong, warung khusus sembako, warung pernik pernik jilbab dan busana Muslimah, sampai usaha Pakaian Pantas (BJ).

Kedua, sebagai perajin yaitu mereka mengikuti pemilik usaha dalam membantu aktifitas kekhasan usaha, misalnya usaha empek empek dalam mengulek bahan baku



empek empek<sup>185</sup>, menggoreng, menyusun dan menyediakannya untuk konsumen

Partisipasi perempuan juga pada aktifitas rumahan perajin kain songket. Secara umum songket dari kata *sangko* yang berarti saat pertama orang menggunakan hiasan kepala. Dapat juga dipahami dengan bahwa songket ucapan bahasa dari kata *tusuk* dan *cukit* yang kemudian disingkat menjadi *suk-kit*, selanjutnya berubah menjadi *sungkit* dan disebut kemudian oleh orang-orang Palembang dengan nama *songket*<sup>186</sup>. Model kegiatan usaha terbagi dua kelompok,

---

<sup>185</sup> Dalam mencontohkan pembuatan empek empek dan pemilik usaha membutuhkan pengrajin. 1) sisi bahan yang disediakan tepung sagu (kualitas baik), daging ikan tenggiri yang giling halus), serta beberapa bahan lain yang membutuhkan ketrampilan pengolahan seperti penggunaan air dan air es, air bersih, garam, penyedap rasa dan minyak serta alat untuk merebus. Sementara pengelolaan bahan kuah empek empek seperti standar 3/4 liter air bersih, bawang putih yang dicincang halus), air asam jawa, gula merah yang disisir halus, ebi dan cabe rawit, semuanya diolah dengan pengalaman dan profesionalitas. Untuk proses membuat empek empek adalah Siapkan wadah, lalu masukkan ikan, garam, penyedap rasa dan air es, campur dengan daging ikan (sudah digiling), lalu aduk sampai merata. Masukkan tepung sedikit demi sedikit, uleni hingga adonan menjadi pas dan kalis. Ambil secukupnya adonan pempek, lalu bentuklah dengan sesuai dengan ukuran atau selera Anda. Masukkan adonan pempek yang sudah selesai dibentuk kedalam air yang mendidih, tunggu hingga matang (mengapung), lalu angkat dan tiriskan. Siapkan wajan, panaskan minyak goreng, lalu goreng adonan pempek hingga matang (cirinya: bagian kulitnya berwarna kecoklatan). Angkat, lalu tiriskan. Lalu potong-potong pempek goreng tersebut. Empek empek palembang siap disajikan. Sumber <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3637358>

<sup>186</sup>Sukanti, *Tenun Tradisional Sumatera Selatan*, (Palembang: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), 23. Secara umum data sejarah menjelaskan bahwa sejak zaman neolitikum, di Indonesia pada umumnya dan Palembang pada khususnya telah mengenal ragam hias. Hal tersebut dapat diketahui dari penemuan gua, peralatan pertanian, dan peralatan rumah tangga yang terbuat dari bahan batu, kayu, logam dan tekstil. Pada masa itu, hiasan tidak hanya merupakan suatu keindahan yang dipergunakan sebagai hiasan *an sich*, tetapi memberi kandungan makna

*Pertama*, perajin songket tradisional yaitu Perajin yang eksis untuk tetap menjadikan songket apa adanya seperti bentuk masa-masa dahulu, kelompok ini tidak menerima design modifikasi mengikuti pasar. Bagi mereka aktifitas modifikasi menjadikan songket kehilangan ciri khas dan nilai sejarahnya. Mereka berpandangan bahwa lebih baik menjual songket apa adanya, dan jika tidak laku bisa disimpan, daripada harus mengikuti selera pasar.

Kekompok ini berpandangan bahwa melestarikan seni menenun adalah lebih penting daripada merubah ciri khas dengan atas nama mengikuti selera pasar. *Kedua*, perajin songket modernis yaitu perajin yang mau mengikuti selera pasar, mau melakukan modifikasi songket menjadi berbagai bentuk aksesories yang dapat dijadikan cendera mata yang beragam, murah namun tetap tidak menghilangkan ciri khas songket. Bagi kelompok ini, nilai filosofis dan sejarah songket tidak akan hilang maknanya, bahkan dapat semakin membuat terkenal kerajinan tenun songket Palembang

Dalam menenun tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semua bisa melakukan yang penting memiliki kreteria dalam bekerja sepenuh hati. Dalam pandangan Responden mungkin sedikit berbau mistis namun sering terjadi, bila sipenenun sedang marah atau kesal maka benangnya sering putus atau hasil tenunannya kasar dan banyak kesalahan sehingga menurunkan nilai songketnya.

---

yang sesuai dengan pengetahuan dan kepercayaan dan upacara ritual. Karenanya, usaha tenun terutama tenun songket di Tanah Sriwijaya menjadi bagian dari penggalian nilai-nilai seni arsitektur dan budaya masyarakat. Lihat, Suwati Kartiwa, *Kain Songket Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1996), 2; Kiagus Zainal Arifin, *Songket Palembang: Indahnya Tradisi di tenun Sepenuh Hati (Songket Palembang: a Resplendent Tradition Woven With Devout Passions* (Jakarta: Dian Rakyat, 2006), 17

Pekerjaan menenun adalah serangkaian proses yang panjang dan melibatkan banyak orang. Dimulai dari menentukan warna dan deasain, mengelola benang, membuat pola dikertas, menyiapkan peralatan, memasang, benang, barulah kain diangin-anginkan, dan siap dikenakan. Seluruh rangkain ini memakan waktu sekitar 2 minggu hingga 3 (tiga) bulan.

Proses ini juga tidak bisa dikerjakan oleh satu orang tapi merupakan semacam kerja tim. Pekerjaan tenun songket dimulai dengan menentukan warna dasar, jenis lepus atau tawur, polos atau limar dan motif ragam hiasnya. Bila ragam hias belum ada contoh, maka harus digambar pada kertas berpetak sebagai pola atau patoknya. Gambar dibentuk menyerupai sulam *cruisstick*. Pola meliputi motif pinggir, tumpal, dan isian tengahnya. Warna-warna songket Palembang adalah warna yang terang dan kuat seperti merah, anggur, ungu terung, hijau tua, hijau pupus, oranye, biru, dan hitam. Sekarang warna-warna muda dan pastel juga disukai seperti pink, biru muda, ungu muda, krem, dan putih. Dulu warna-warna diperoleh dari tumbuhan yang juga dipakai untuk pewarna batik dan tenun ikat. Sekarang pengrajin lebih banyak memakai pewarna kimia lebih cepat menyerap. Ragam warnanya pun sangat banyak.

Dalam selembar kain bisa ditemukan lebih dari dua kombinasi warna. Bahkan pada kain limar bisa dipakai sampai lebih dari lima warna. Responden juga menilai bahwa ragam hias songket Palembang sangat banyak, namun yang tidak boleh dilupakan adalah tumpal yang bentuk dasarnya adalah pucuk rebung meskipun dibuat dalam berbagai variasi. Pucuk rebung melambangkan bahwa setiap manusia harus berguna sepanjang hidupnya seperti pohon bambu (rebung) yang sejak muda hingga tua dapat dimanfaatkan. dalam mengelola benang pada awalnya dari katun sebagai bahan

baku utama. Kini kain dihasilkan dari berbagai jenis benang, sutera, bulu domba, (wool), serat nanas, polyester, selulosa, dan lycra. Songket Palembang menggunakan benang sutera dengan beragam mutu sesuai dengan target pasar yang akan dituju. Namun umumnya songket menggunakan benang sutera. Benang-benang itu didatangkan dari Cina, Thailand, dan Jepang dalam gulungan besar dan berwarna asli, putih kecokelatan (*broken white*). Benang mentah tersebut kemudian dicelup dalam air tawar biasa sambil pelan-pelan diremas agar benang lebih lembut. Setelah diperas benang siap dicelup. Bila benang sudah siap dan desain sudah ditentukan, tiba saatnya mulai menenun. Alat tenun adalah dari jenis gedongan dimana penenun duduk tegak dilantai dengan kaki lurus kedepan.

Bagian pinggang belakang penenun ditahan oleh sebilah papan yang disebut *por*. Bagian-bagian lain dari alat tenun ini adalah *cakcak* yang bentuknya seperti telinga sebagai kepala *dayan*. *Apit* adalah penggulung hasil tenunan yang sudah jadi, posisinya dekat perut penenun. *Beliro*, sebilah kayu pipih untuk merapatkan benang pakan. *Pemipil*, alat untuk membentuk bunga. *Penyencang* yang berguna untuk membuka katup saat benang pakan dimasukkan. *Lidi* adalah bagian penting untuk membentuk desain atau ragam hiasnya. *Suri* untuk mengatur alur benang lungsi.

Langkah pertama adalah menyiapkan benang lungsi yang panjangnya 20 m. Lalu dimasukkan ke dalam suri yang mirip sisir rapat sekali dari bamboo. Pekerjaan ini dinamakan nyucuk suri. Perlu ketelitian dan ketrampilan yang sangat terlatih untuk memasukkan lebih dari 1000 helai benang dan dibagi dalam kumpulan beberapa helai sesuai dengan kebutuhan desain. Setelah semua siap maka proses menenun pun dimulai. Tahap menenun bagian ragam hias yang

merupakan bagian tambahan dari benang *pakan*. Dalam pembuatan songket biasanya para perajin menggunakan tiga tehnik penyulaman. *Pertama*, dengan satu benang. Jadi satu persatu benang diurai ke kanan dan ke kiri. Tehnik ini merupakan tehnik yang paling lama pengerjaannya. Dan hasilnya tentu paling bagus. Biasanya pembuatan songket dengan menggunakan tehnik ini membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan. *Kedua*, dengan tehnik benang rangkap dua. Ketika menggunakan tehnik ini para perajin menggunakan dua helai benang. Karena benangnya rangkap motif yang dihasilkannya pun terlihat lebih jarang dibanding dengan yang pertama. *Ketiga*, tehnik dengan menggunakan benang rangkap empat. Tentu dengan tehnik inilah, satu kain songket dapat dihasilkan dalam waktu yang cukup singkat. Namun, hasilnya lebih kaku dan motifnya nampak lebih jarang<sup>187</sup>.

Kaki memainkan pedal, kedua tangan menarik beliro dan penyecang dibuka maka benang emas pun disisipkan. Setiap kali beliro ditarik yang disebut menyentek, wajah atau pandangan mata harus dipalingkan ke kanan bawah agar mata tidak silau oleh kilau benang emas. Apalagi bila hasil tenunan sudah mulai banyak dan terbentuk motifnya. Pekerjaan menenun ini bisa diselesaikan dalam waktu 1-3 bulan tergantung kepandaian penenun dan kerumitan motifnya. Songket lepus pasti lebih lama dibandingkan songket tawur. Satu set songket yaitu kain sarung dan selendang bisa dikerjakan oleh dua orang penenun atau sendiri tergantung pada kesanggupan masing-masing. bahkan bila ditengah

---

<sup>187</sup>Wawancara dengan Mariana, Dwi Oktarina, Cek Nah, Kiki, R.M. Basen Fikri, Fahri, Ema, Karni, Isti antara tanggal 22 September hingga 18 Oktober 2010.

pekerjaan sang penenun sakit, pekerjaan ini bisa diteruskan oleh lainnya<sup>188</sup>.

Sepanjang hari suasana di rumah-rumah pengrajin maupun perajin selalu ramai oleh suara gedokan belira dan sentakan diselingi canda para penenun yang rata-rata kaum perempuan paruh baya dan perempuan dan laki laki muda usia putus sekolah. Dalam kelompok pengrajin, para perajin datang dari desa-desa di luar kota Palembang yang memiliki keahlian menenun secara turun temurun. Tidak aneh bila di rumah-rumah pengrajin banyak anak beranak dan kakak beradik bekerja sebagai penenun. Kerajinan ini mampu memberi banyak lapangan kerja terutama para gadis remaja yang putus sekolah dan tenaga kerja sektor informal lainnya seperti tukang celup benang, tukang menggulung benang, pembuat cinderamata barang aksesoris dari tenun songket, penjahit, pengepakan, hingga penjualan.

Satu set sarung dan selendang masing-masing mempunyai lebar 80-90 cm dengan panjang 200 cm untuk sarung (*sewed*) dan lebar 60 cm dengan panjang 200cm untuk selendangnya. Bila songket telah selesai, maka tahap akhir adalah melepas kain dari dayan. Sisa-sisa benang dibuang dan tepi kain dijahit rapi dengan jarum tangan. Agar lebih mewah dan indah selendang bisa tambah dengan renda rajut lebar berwarna keemasan. Untuk busana pengantin masih ditambah dengan taburan payet dan mote. Kain diangin-anginkan sebentar lalu digulung dan dapat disimpan dalam

---

<sup>188</sup> Olah data wawancara dengan Fahri, Ema, Karni, Isti (Kelompok perajin Limbang Jaya dan Tanjungpinang, Kecamatan Tanjungbatu, Kabupaten Ogan Ilir), Murni, Endah, Yuni Kelompok perajin songket di lorong Pisang, Kertapati Palembang. Titi Murni, Nurhayati, Herlina, Maryani, Kiki Maryani, Fahri, Ema, Karni, Isti, Murni, Endah, Yuni, Titi Murni, Nurhayati, Herlina, Maryani, Kiki Maryani, Tanggal 4-18 Oktober, 2010

lemari, tapi harus dijaga jangan sampai terlalu lembab.<sup>189</sup> Setiap kelompok memiliki tim perajin yang menguasai bidang masing-masing. Mereka yang biasa menggulung benang tidak memiliki kapasitas untuk menenun. Para pembuat motif tidak memiliki kapasitas dalam pewarnaan dan penenun. Dari sisi ini, nilai-nilai pembagian tenaga kerja atau spesialisasi kerja (*division of labor*) telah terbangun baik<sup>190</sup>

Dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pembuatan kain songket ini dilakukan melalui tiga tahapan. *Pertama*, pencungkilan, artinya tahap ini merupakan tahap pembuatan motif kain songket itu sendiri. Dengan cara menyilah-milah benang dari benang songket, lama prosesnya tergantung dari kerumitan motif kain songket itu. Motif songket digambarkan dengan tuntunan lidi yang dipasang ditenenan yang disebut sebagai “dayan”. *Kedua*, proses penyambungan, artinya memisahkan benang untuk pakan songket, dengan cara diuraikan untuk persiapan penenunan. Para perajin biasanya menggulung dengan alat yang dinamakan “undaran benang.

---

<sup>189</sup>Songket jangan dilipat karena benang emasnya bisa patah-patah. Tidak boleh juga dicuci apalagi dengan mesin cuci. Bila terkena noda cukup dibersihkan dengan kain basah pada bagian kotornya saja lalu diangin-anginkan. Pada masa sekarang songket bisa dicuci dengan sistem *dry clean* pada binatu modern. Olah data responden dari wawancara dengan Titi Murni, Nurhayati, Herlina, Maryani, Kiki Maryani, 4-18 Oktober 2010. berbagai proses dan alat tenun songket terlampir dalam disertasi ini.

<sup>190</sup>Secara sederhana nilai-nilai *division of labor* yang diusung Adam Smith dalam konsep dan implementasi lihat Rob Paton, James McCalman, *Change Management : A Guide To Effective Implementation* (London : SAGE, 2008), 167-168; Teresa A Daniel and Gary S Metcalf, *The Management of People In Mergers and Acquisitions* (Westport, Conn. : Quorum Books, 2001), 16-18

*Ketiga*, Kreatifitas perajin Kemudian dilanjutkan dengan tahap pencukitan yang mirip dengan proses streamin dalam penyulaman sesuai pola corak dan motif yang sudah didesain. Baru kemudian penenunan dimulai. Alat tenunnya yang berbahan dasar kayu ada berbagai macam. Masing-masing memiliki nama dan fungsi tersendiri seperti dayan, beliro, pelipir, penyincing, tuju bilang, chacha, suri (sisir) buluh bambu, apit, dan pur. Tak hanya perangkat peralatan dan tahapan pembuatannya yang rumit, dalam pola corak warna dan motif benang emasnya pun juga banyak macamnya. Setiap bentang kain ada 4 bagian yaitu pinggiran, tumpal, tengah, dan tretes untuk ujung siku kain. Setiap bagiannya itu motifnya berbeda. Bahkan di bagian Tumpal terdapat 4 jenis motif yaitu ombak, rumpak, carebung, dan tawur. Begitu juga di bagian tengah ada beberapa macam, seperti lepus, tabor, limar, dan bungo Cino.<sup>191</sup>

Kreatifitas songket pun mengalami perubahan-perubahan yang berkembang dari masa ke masa. Awalnya kain ditenun dari benang kapas mentah (*lawe*) dan berubah ketika benang sutera dan benang emas belum dikenal sehingga mutu benang membaik dan sistem pewarnaan lebih menarik. Songket Palembang dari masa ke masa meskipun tetap pada pakemnya mengalami perubahan-perubahan. Pada tahun awal 1900-an banyak songket berbentuk sarung yang menyambung seperti sebuah tabung, tanpa ada sambungan jahitan yang dalam bahasa Palembang disebut *pa ujung pa bongkot* yang merupakan kain limar sumping dengan motif

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan perajin songket tanggal 25 September 2010. lihat juga Yudhi Syarofie, *Songket Palembang: Nilai Filosofis, Jejak Sejarah, Dan Tradisi*, (Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kegiatan Pengelolaan Kelestarian dan Pembinaan Nilai Budaya Sumatera Selatan, 2007), 14-22



tetes mider. Benang yang tipis dan halus sehingga menghasilkan songket yang transparan dapat dilihat pada songket lepus bintang berantai. Kombinasi berbagai warna juga sudah dikenal seperti pada songket lepus bintang berakam. Sarung rumpuk lanang atau sarung untuk pria mendapat pengaruh dari Bugis, Sulawesi Selatan.

Sekitar 1950-an songket Palembang tampak lagi perubahannya. Warna-warna lebih berani dalam bentuk songket limar berantai tampuk manggis, lepus naga besaung dengan kombinasi berani antara merah dan ungu terong, lepus nampan perak yang anggun menunjukkan perkembangan tersebut, meskipun lebar kain sama, hanya 80 cm. bila dikenakan bagian atasnya harus diasmbung kain polos supaya songket mencapai mata kaki. Pakem wajib sebuah songket tetap dipertahankan seperti adanya tumpal pucuk rebung, dan motif pinggir. Yang baru adalah motif tengahnya, seperti kucing, buah anggur, burung kecil, bunga mawar bertangkai, kembang goyang. Benang sutera yang digunakan lebih halus membuat songket ini ringan dan lembut sehingga nyaman saat dikenakan.<sup>192</sup>

Para Responden menyebutkan bahwa umumnya motif yang ditampilkan mirip dengan helaian daun-daun kecil yang panjang atau bulu ayam (*lar*). Sambil ditenun, benang emas pun disisipkan. Kain songket limar bisa berupa songket tawur maupun songket lepus. Hasil karya yang muncul dengan berbagai macam motif yang diambil dari alam sekitar baik flora maupun fauna seperti bunga, dedaunan, sulur daun, kumbang, ikan, burung, dan sebagainya. Warna dasar kain

---

<sup>192</sup>Wawancara dengan Mariana, Basen Fikri, Murni, Endah, 22-28 September 2010, 15-18 Oktober 2010. Lihat juga Ki Agus Zainal Abidin, *Songket Palembang: Indahnya Tradisi di Tenun Sepenuh Hati*, 65-69

yang klasik adalah merah anggur, hijau tua, dan kuning. Tetapi songket sekarang sangat beragam warnanya. Beberapa yang sifatnya klasik namun bukan sebagai penanda si pemakai, salah satunya adalah songket Janda Berhias. Songketnya berlatar merah anggur dengan kombinasi kuning dan hijau. Motif dari benang emas ditambahkan pada kedua ujung secara berserak (*tawur*) dan pada tumbal yang bemothif pucuk rebung, sementara bagian tengahnya dibiarkan polos saja berwarna hijau.<sup>193</sup>

Di era tahun 2000 hingga tahun 2010 aktifitas usaha songket Palembang masih mempertahankan tenun songket dengan memberikan berbagai modifikasi dalam bentuk souvenir.<sup>194</sup> Dari sini pergeseran karakteristik usaha pada penguatan seni. Aktifitas kerja dikembangkan dengan sentra-sentra yang dikembangkan oleh para pengrajin songket Palembang. Hasil wawancara dengan beberapa pengrajin

---

<sup>193</sup>Warna-warna lain yang muncul seperti motif bunga mawar dimaknai sebagai penawar rasa atau sebuah ungkapan mencegah malapetaka. Bunga melati yang putih dimaknakan sebagai lambang kesucian hati dan sikap sopan beradab tinggi. Bunga manggis dimaknakan manisnya kehidupan, bunga tanjung menunjukkan keramahtamahan. Penamaan songket selain mengandung arti juga lebih banyak kepada bentuk yang nampak. Diantaranya binatang berakam, naga besaung, limar bintang berantai, pacar cina, tetes mider, tampuk manggis, limar pulir, tiga negeri, nampam berserak, belah belimbing, kupu-kupu pita, buah cermin, dan seterusnya. Motif-motif ini sampai sekarang masih dipakai dan tetap di kalangan penenun. Responden menyatakan bahwa para penenun profesional yang sudah menenun bertahun-tahun tidak lagi memerlukan pola yang digambar pada sehelai kertas, bahkan hanya dengan melihat contoh perajin tahu bagaimana menghitung benang lungsi dan membentuk motifnya. Sedangkan untuk para pemula pola pada kertas berpetak masih diperlukan. Hasil wawancara dengan Mariana, Basen Fikri, Ana Komari, 22-28 September 2010.

<sup>194</sup>Stephanus Hamy; Debbie S Suryawan, *Chic Mengolah Wastra Indonesia: Batik Jawa Barat* (Jakarta : Gramedia, 2009), 4; Tina Sardadi dan Amy Wira Budy, *Muslimah Berbusana Nusantra* (Jakarta: Gramedia, 2009), 88.

diketahui pergeseran terjadi karena (1) para perajin songket sudah mulai terbuka dengan gerakan persaingan usaha global; (2) adanya berbagai pelatihan yang mengarahkan pada pengembangan songket kedalam berbagai desain, motif maupun pembentukan souvenir yang digemari oleh pasar dan laku terjual.

Dari alat-alat tersebut dibuatlah songket dengan perbedaan dari banyaknya penggunaan benang emas dalam sehelai kain. Ada dua sebutan besar untuk jenis songket Palembang ditambah dengan penamaan motif-motifnya yang semuanya mengacu pada alam sekitar. Responden perajin menyebutkan dari tempat usaha sederhana dan peralatan pembuat songket diarahkan ke songket Tawur adalah jenis songket yang penggunaan benang emasnya tidak banyak dan rapat, namun menyebar dalam motif-motif tunggal. Selain menyebar, benang emas ditambahkan pada motif pinggiran dan tumpalnya. Ada juga songket Lepus adalah jenis songket yang penggunaan benang emas penuh sampai hamper menutupi seluruh dasar kain. Songket Lepus tentu saja lebih mahal dibandingkan songket tawur. Bukan saja banyaknya benang emas yang dipakai tapi juga motif yang dipilih lebih rumit dan rapat.<sup>195</sup> Dari penjelasan kajian atas songket tersebut, maka peran perempuan diranah lokalitas memiliki partisipasi besar.

---

<sup>195</sup>*Hasil observasi dan wawancara* dengan perajin Cek Nah, Kiki, Ainun, (kelompok perajin songket di Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur); Fahri, Ema, Karni, Isti (Kelompok perajin Limbang Jaya dan Tanjungpinang, Kecamatan Tanjungbatu, Kabupaten Ogan Ilir); Murni, Endah, Yuni Kelompok perajin songket di lorong Pisang, Kertapati Palembang. Titi Murni, Nurhayati, Herlina, Maryani, Kiki Maryani. 4-18 Oktober 2010

#### **D. Gerakan Baitul Mal Wa Tamwil untuk Pengembangan Usaha Perempuan Palembang**

Hadirnya Pandemi COVID-19 membuat pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* dan *Work From Home* (WFH) yang bertujuan untuk mencegah penyebaran covid-19, maka masyarakat kembali ke rumah mulai dari aktivitas belajar, bekerja, dan beribadah, kemudian diikuti dengan kebijakan *School From Home* (SFH) menjadikan peran perempuan baik sebagai pekerja atau ibu rumah tangga 1) sebagai pekerja yang menyelesaikan pekerjaan kantor di rumah, atau usaha yang dibangun di rumah; 2) menjadi guru 'dadakan' mendampingi anak-anaknya mengerjakan tugas sekolah, 3) serta memastikan suplai kebutuhan pangan keluarga tercukupi. Sejatinya di masa pandemi ini memberikan lahan yang luas bagi perempuan untuk berperan sebagai ibu yang hebat karena sangat diperlukan keberadaannya dalam mendampingi putra-putrinya. Di sinilah peran ganda ibu pun diuji ketahanannya yang harus tetap tinggal di rumah. Perempuan pekerja atau ibu rumah tangga atau yang merangkap keduanya dituntut untuk lebih bijak dalam mengatur waktu sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan tugas kantor bersamaan.

Rutinitas perempuan berubah drastis selama WFH, di satu sisi harus online meeting secara virtual dengan tempat kerja, atau melakukan aktifitas usaha di rumah di sisi lain harus keluar masuk dapur menyiapkan makanan untuk keluarganya dan memastikan selalu ketersediaan makanan bergizi. Belum lagi harus memastikan tugas-tugas sekolah anak yang secara online juga telah diselesaikan tepat waktu. Perempuan masa pandemi COVID-19 ini juga berimplikasi dari perempuan gagap teknologi, menjadi mampu berdigitalisasi secara perlahan, dari hanya sekedar

berkomunikasi on line kini mampu melakukan transaksi dalam belanja on line. Kualitas waktu bersama dalam keluarga (*quality of time*) semakin kokoh kembali yang selama ini dilupakan karena kesibukan produktif dari sholat berjamaah hingga nonton bersama. Karenanya tatanan kehidupan baru (*New Normal Life*) menjadi sebuah keniscayaan siap ataupun tidak siap.

Dalam berbagai kajian menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur dari tingkat kesejahteraan taraf hidup penduduknya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata<sup>196</sup>. Upaya meminimalisir hal tersebut dengan menguatkan usaha kecil mikro . Secara historis, usaha kecil mikro di Indonesia telah menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi domestik, terutama sebagai penyedia lapangan kerja terbesar sekaligus menjadi sumber utama pendapatan bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Bagi rumah tangga pekebun, usaha rumahan atau petani usaha kecil mikro menjadi alternatif sumber pendapatan<sup>197</sup>.

Menurut data statistik dalam angka departemen koperasi bahwa pada tahun 2012 sektor UKM dari sisi jumlah unit usaha mencapai 99 persen dari total pelaku

---

<sup>196</sup>Tingginya angka kemiskinan menjadi pertanda bahwa masyarakat belum berperan menjadi subjek dalam pembangunan. Menjadi subjek dalam pembangunan bermakna memberikan hak-hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan produksi nasional. Untuk sampai pada tujuan tersebut rakyat harus memiliki modal material dan mental. Hal ini menjadi inspirasi untuk perlunya pemberdayaan ekonomi rakyat yang kemudian berkembang membangun sistem perekonomian bercorak ekonomi kerakyatan.

<sup>197</sup> Data statistic

usaha nasional atau sebanyak 54,559 unit usaha (98,82 persen) di antaranya merupakan usaha mikro dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omset per tahun maksimal Rp300 juta. Sedangkan kontribusi UMKM terhadap penciptaan PDB (Produk Domestik Bruto) nasional menurut harga berlaku mencapai 57 persen dan 43 persen sisanya dikontribusikan oleh usaha besar. Secara rata-rata, kontribusi output UMKM terhadap tingkat pertumbuhan PDB adalah di atas dua persen, Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi usaha kecil dan menengah lebih mendominasi dalam sumbangan PDB. Usaha tersebut semakin berkembang hingga tahun 2022.

Aspek pengelolaan terjadi perubahan yang cukup signifikan, pada awalnya semua dilakukan dengan manual sederhana dan menggunakan manajemen keluarga. Pangsa pasar terbatas dalam runga lingkup wilayah yang diusahakan. Ini artinya ketika usaha dilakukan dalam lingkup X maka pembeli berada dalam lingkaran X saja, ditambah dengan tidak jelasnya pembukuan akibat apa yang dikeluarga, yang masuk bercampur dengan kebutuhan sekolah, makan dan kebutuhan keluarga tidak terduga lainnya. Minimnya informasi, para pelaku usaha masih sulit dalam menyebarkan pasar usaha mereka serta berbagai informasi yang berhubungan dengan pembiayaan maupun pelatihan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Digitalisasi dengan berbagai kemudahan dan kecanggihan system yang dibangun sebagai sarana TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) menyebabkan perubahan yang signifikan walaupun kemudian serbuan pandemic COVID-19 namun perkembangan pola pikir, kreatifitas, dan inovasi semakin kuat. Kemajuan digital dari tahun ke tahun menyebabkan UMKM berkembang dengan

signifikan, pada situasi ini UMKM sangat di perhatikan sebagai pendorong perekonomian Indonesia, apalagi di situasi era pandemic COVID 19. Majunya UMKM di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Beberapa penelitian menunjukkan kalau salah satu faktor yang mendukung perkembangan UMKM adalah karena pemanfaatan sarana TIK (teknologi, informasi dan komunikasi). Para pelaku usaha mulai memanfaatkan sarana teknologi untuk melebarkan pasar usahanya, serta menggunakan aplikasi online dan media sosial untuk memasarkan produk yang dijual<sup>198</sup>.

Data juga menyimpulkan bahwa sistem pembayaran tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan uang digital, hanya mengarahkan smartphone ke QR code yang telah disediakan oleh UMKM, maka pembayaran pun telah selesai dilakukan. Hal ini juga sudah tidak asing di sekitar kita, pelaku UMKM saat ini juga tidak perlu bersusah payah dalam mengelola keuangan, banyak aplikasi yang ditawarkan untuk mencatat serta mengelola keuangan usaha. Bahkan, sudah menjadi target pemerintah untuk membuat pelaku UMKM untuk memanfaatkan dunia digital, seperti e-commerce, untuk menjual dan mengembangkan usahanya. Hal ini membuat pemerintah semakin giat menawarkan pelatihan usaha untuk para pelaku usaha ataupun masyarakat yang ingin memulai membuka usaha.

Upaya semakin meningkatkan kontribusi output perolehan barang dan jasa tentu diperlukan kinerja yang

---

<sup>198</sup> Lihat Affif Biki Anwar, *UMKM Dulu dan Sekarang*, <https://kumparan.com/052-affif-nikki-anwar/perkembangan-umkm-dahulu-dan-sekarang-1wQAxgVONtq/4>

maksimal dengan mencanangkan pengembangan dan pemanfaatan BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil* sejak 7 Desember 1995) sebagai gerakan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan menggali potensi ekonomi di kalangan umat Islam. Progresifnya perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari besarnya porsi masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia. Dari total sekitar 265 juta penduduk, 40% merupakan masyarakat kelas menengah dan 20% digolongkan sebagai kelas bawah, ditambah sebanyak kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk. Berdasarkan angka tersebut maka diperlukan pengembangan ekonomi umat yang sesuai untuk mayoritas masyarakat yang menjadikan keberadaan BMT relevan dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan kuantitas BMT secara khusus belum terditeksi namun angka yang sudah berdiri mencapai sekitar 4.500 unit<sup>199</sup>. BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan

---

<sup>199</sup> “Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”, diakses dari <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform>. Tidak terdatanya pertumbuhan dan persebaran BMT yang luas tidak diimbangi dengan pendataan yang baik. Hal ini berawal dari belum jelasnya pengaturan BMT di Indonesia, dimana regulasi dan pengawasannya masih tumpang tindih antara antar regulator terkait. Lebih jauh terkait hal tersebut, tidak ada kesesuaian data jumlah BMT yang ada di seluruh Indonesia, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif, termasuk mengenai posisi keuangannya masing-masing. Selain itu, banyak juga ditemukan BMT yang tidak dapat mempertahankan performa dan eksistensinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sedang berupaya mendorong pembenahan BMT agar menjadi lebih profesional dan terkelola dengan baik. Langkah awal yang akan dilakukan adalah dengan mengembangkan platform digital berupa core system BMT. Strategi ini diambil oleh KNKS karena faktanya di



kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMK yang dikutip dari [www.Repubik.com](http://www.Repubik.com) menyatakan hingga maret 2015 saja aset BMT mencapai sebesar Rp. 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,6 triliun.

Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT sebagai bagian dari penguatan social ekonomi yaitu: 1) Sistem Bagi Hasil, dimana sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penabung). Bentuk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*; 2) Sistem jual beli dengan *Mark Up* (keuntungan), dimana sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberikan kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (*mark up/margin*). Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagikan juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk

---

lapangan masih banyak BMT yang keuangan dan operasionalnya belum menggunakan digital *core system* padahal dapat memudahkan dan menjadikannya lebih efisien. Harapannya, dengan teraplikasinya sistem tersebut di seluruh BMT di Indonesia, pendataan pun akan jauh lebih baik dan terintegrasi satu sama lain

produk ini yaitu *murabahah* dan *Ba'i Bit'tsaman Ajil*; 3) sistem *Non Profit*, atau disebut juga dengan pembiayaan kebajikan atau lebih bersifat sosial. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak memerlukan biaya.

Pendirian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berada pada mayoritas umat Islam. Gerakan lembaga keuangan pada tingkat bawah ini relatif mampu mengurangi ketergantungan masyarakat lapisan bawah dari cengkeraman rentenir. Lembaga ini (BMT) terdiri dari dua divisi yaitu; pertama, divisi *baitul maal* yang mengelola zakat, infaq dan sadaqah (ZIS). Kedua, divisi *baitul tamwil* yaitu menggerakkan simpanan dan penyaluran dana (pembiayaan modal) dengan sistem bagi hasil. Diharapkan dengan sistem ekonomi Islam, masyarakat termasuk umat Islam mampu menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Untuk dasar hukum di Indonesia BMT paling mendekati dengan badan hukum koperasi, baik serba usaha (KSU), maupun simpan pinjam (KSP) Konsep Baitul Maal Tamwil sudah dijelaskan dalam Alqur'an Surath al-Baqarah: 261<sup>200</sup>

---

<sup>200</sup>*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. ( Al-Baqarah ayat 261).*

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي  
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Lembaga Baitul Maal Tamwil terciptanya adanya kesadaran umat yang juga berfungsi untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Peran umum *Baitul Mal Wa Tamwil* adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syari'ah yang menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat<sup>201</sup>. Dalam konstruksinya BMT memiliki ciri-ciri 1) berbadan hukum koperasi; 2) bertujuan menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan dan memajukan usaha bagi anggotanya; 3) skala produk dan pendanaan yang terbatas menjadi prinsip dan pembeda dengan lembaga keuangan lainnya, sedangkan mekanisme dan transaksinya hampir sama dengan perbankan syariah non riba.

Sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi pada kelompok *grass root* berperan aktif dan maksimal untuk ikut menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Beberapa peran yang dimainkan oleh BMT dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama antara:

*Pertama*, Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha

---

<sup>201</sup> M.Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, 431

kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung; *Kedua*, Sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis. *Ketiga*, Sektor religious, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah<sup>202</sup>.

Eksistensi BMT sebagaimana dikutip dari Sudarsono yaitu 1) Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkolerasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. Upaya meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non formal, karenanya kerja sama BMT dengan lembaga-lembaga pendidikan atau bisnis Islami; 2) strategi pemasaran yang berorientasi meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, guna memperkenalkan eksistensi BMT ditengah-tengah masyarakat; 3) inovasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, oleh karena kadangkala BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab, timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syari'ah, memahami produk BMT hanya seperti yang ada, dan upaya meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategis dalam bisnis<sup>203</sup>. Hal ini diperlukan untuk memungkinkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan dengan beberapa Langkah:

---

<sup>202</sup> Wahyu Dwi Agung, "*BMT Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*", 6

<sup>203</sup> Sudarsono ; *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. 2003.

- a. Pengembangan aspek paradigma, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis Islami dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
- b. Sesama BMT sebagai mitra dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, demikian antar BMT dengan BPR syari'ah ataupun bank syari'ah merupakan satu kesatuan dengan lainnya yang memiliki tujuan meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.
- c. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT.

Sebagai lembaga keuangan non bank, BMT telah berperan aktif dan maksimal untuk ikut menggerakkan dan memberdayakan kaum perempuan. Beberapa peran yang dimainkan oleh BMT dalam membantu memberdayakan perempuan dan sosialisasi sistem syariah secara bersama pada sector finansial dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha perempuan dengan konsep syariah, serta mengaktifkan mereka untuk yang surplus dana untuk menabung.

BMT juga berperan membina pengusaha perempuan dari sisi manajemen teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis. Serta menghimbau kaum perempuan pengusaha untuk memiliki nilai nilai ubudiyah yang komprehensif.<sup>204</sup>. Dari sisi

---

<sup>204</sup> Wahyu Dwi Agung, "BMT Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", 6

permodalan dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan UKM merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dielakan oleh pelaku UKM, disisi lain untuk mendapatkan pembiayaan bank baik dari lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah dibutuhkan administrasi yang harus disiapkan oleh pelaku usaha.

Kondisi seperti tersebut perlu diatasi dengan solusi sosialisasi tidak hanya terkait masalah pengelolaan UKM tapi juga harus sudah terbiasa dengan penyiapan administrasi melalui pendampingan suatu organisasi atau lembaga yang bisa menjembati masalah dasar terkait legalitas, kemampuan sdm UKM untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Asumsi yang didasarkan pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UKM pada tahun 2019 sebanyak 59,2 juta unit (CNN Indonesia/Safir Makki). dengan terbagi sebagai berikut 58.553.525 unit Usaha Mikro, 602.195 unit Usaha kecil dan 44.280 unit Usaha Menengah, Unit-unit tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,24 persen. Namun demikian perkembangan UKM perempuan umumnya masih mengalami berbagai masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, Masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha UKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UKM perempuan mengakses sumber permodalan. Dalam tingkat kabupaten kota, khususnya kota Palembang Jumlah pasar dibawah pengelolaan pemerintah daerah sampai akhir tahun 2019 terakhir berjumlah 19 pasar tradisional dan 25 pasar swasta

(terdiri dari kurang lebih 12 ribu pedagang dengan jumlah 10 ribu lebih petak atau kios yang digunakan sebagai tempat berjualan<sup>205</sup> .

sepanjang tahun 2019 menyatakan bahwa ada 37000 UKM tercatat oleh Dinas Koperasi dan UKM Palembang. Target binaan sepanjang tahun 2019 sebanyak 4000 pelaku Usaha mikro kecil dan menengah kota Palembang namun, tidak lebih dari 50% yang bisa langsung dibina dan sisa target binaan sekitar 2000 UKM lebih belum sama sekali tersentuh. Salah satu bentuk binaan terhadap pengembangan UKM kota Palembang ini adalah dengan penyaluran dana pinjaman modal usaha tanpa agunan sebesar Rp. 3.000.000,-. Kemudahan perizinan, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha yang dijalankan.

Melihat kondisi masyarakat yang ada sebagai mayoritas muslim, dan kelompok perempuan pada usaha mikro sistem pembiayaan ekonomi Islam akan menjadi solusi yang dapat membantu dan menjawab keluhan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan kehidupan ekonomi dan sosial khusus untuk pengembangan UKM kedepan berbasis keadilan Kelompok UKM kota Palembang dihadapkan pada rendahnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan yang potensial terbukti dengan target rencana pembinaan UKM tahun 2019 sebanyak 4000 UKM dengan program salah satunya penawaran pinjaman tanpa agunan jumlah keterlibatan UKM terhadap program ini tidak sampai 50%.

Disisi lain Kota Palembang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari kegiatan ekonomi yang ada, tingkat kesejahteraan rakyatnya pun nampak mulai terlihat

---

<sup>205</sup> Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM dan Informasi Direktur PD Pasar Kota Palembang <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel> tanggal 11 oktober 2019

jika dinilai dari kepadatan yang ada. Pertumbuhan lembaga keuangan pun tampak jelas berkembang, fenomena ini menjadikan keberadaan lembaga keuangan berupa Koperasi pun yang telah lama menjadi sahabat masyarakat pun juga semakin banyak. Telah muncul dan terdata sebanyak 689 koperasi yang ada di Dinas koperasi kota Palembang dan dari jumlah yang ada tersebut terdapat didalamnya hanya 8 koperasi berbasis syariah<sup>206</sup>.

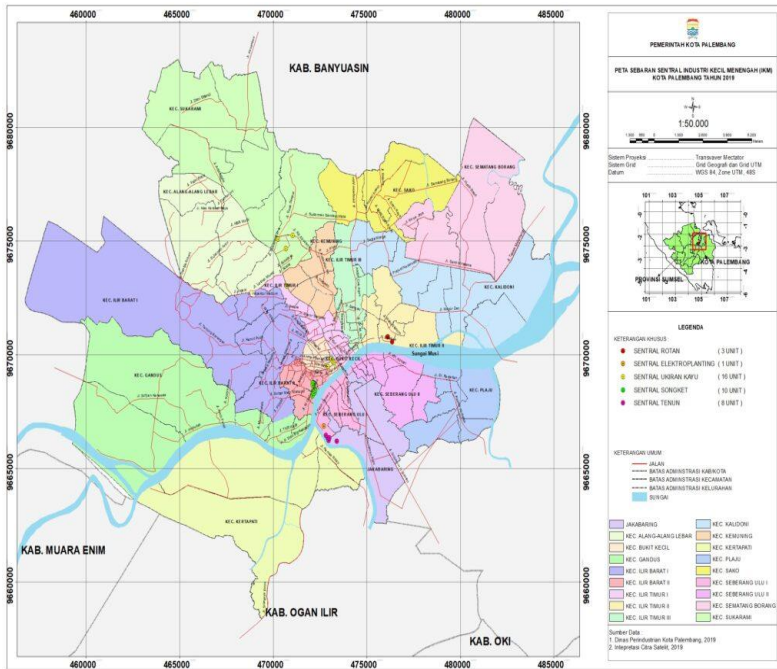
Candra dalam Perkembangannya menyebutkan bahwa peran lembaga pembiayaan syariah non bank terhadap UKM ini tentu ada yang berhasil maupun tidak, tapi secara prinsip kebutuhan akan modal untuk operasional maupun pengembangan UKM kedepan masih sangat dibutuhkan oleh pelaku UKM sendiri. Disisi lain perbaikan terhadap manajemen pengelolaan UKM dan legalitas usaha pengajuan pembiayaan itu sendiri harus dilakukan<sup>207</sup>.

---

<sup>206</sup> Sumber: <http://nik.dekop.go.id/>).

<sup>207</sup> Chandra Satria, <https://www.stebisigm.ac.id/berita501-Perkembangan-Dan-Pembiayaan-UKM--Pemerintah-Pusat-dan-Kota-Palembang.html>





Seperti dikaji sebelumnya bahwa Kewirausahaan menjadi topik menarik dalam kancah ekonomi nasional. Perannya ketika terjadi krisis ekonomi menyadarkan banyak pihak bahwa kewirausahaan mampu menjadi penyelamat keterpurukan ekonomi Indonesia. Saat krisis telah berlalu kewirausahaan tetap menjadi tumpuan harapan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mengalami stagnan di angka 5%. Namun, masih sedikit yang mengetahui bahwa pelaku ekonomi (wirausaha) yang sangat berjasa dalam menghadapi krisis maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebagian besar (60%) adalah perempuan<sup>208</sup>

<sup>208</sup> Agung Feryanto, *Belajar Mengelola Uang Dengan Koperasi*, Jogjakarta: Permata Equator Media, 2008

Perempuan wirausaha telah membuka usaha dua kali lebih banyak dari laki-laki. Meskipun sebagian besar (85%) usaha yang dikelola perempuan berstatus usaha mikro dan kecil tetapi dampaknya sangat besar. Perempuan wirausaha yang ada di Indonesia telah mempekerjakan sebanyak 15 juta karyawan, artinya perempuan wirausaha dapat dikatakan agen perubahan karena dapat menjadi sumber kegiatan ekonomi berupa penciptaan lapangan kerja. Kelebihan lain, perempuan wirausaha memiliki daya hidup lebih tinggi daripada usaha yang dikelola laki-laki. Perempuan wirausaha dewasa ini telah begitu berkembang merambah dunia bisnis yang biasa banyak di kelola laki-laki seperti pengelolaan pabrik, konstruksi, transportasi, dan pertanian

Para perempuan pengelola usaha mikro dan kecil juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu pertama, sikap perempuan yang kurang tegas dan kurang percaya diri dapat menjadi hambatan untuk pengambilan risiko. Kedua, Status dalam struktur sosial menjadikan perempuan tergantung pada pria (keluarga). Ketiga, Akses pendidikan dan pelatihan yang kurang bagi perempuan, dan yang keempat akses dana dan kredit yang sulit bagi perempuan. Kendala-kendala ini, bagi perempuan wirausaha di Indonesia menjadi dasar bagi perempuan dalam pemilihan bidang usaha<sup>209</sup>.

Perempuan wirausaha juga dihadapkan pada situasi yang menghambat atau menyulitkannya selama membangun usaha yang sukses. Kesulitan ini akan menjadi kelemahan bagi individu yang berwirausaha yaitu ketidakpastian pendapatan, risiko kehilangan seluruh investasi, dan

---

<sup>209</sup> Saputri, R. K., & Himam, F. (2015). Mindset Wanita Pengusaha Sukses. *Jurnal. Psikologi* V.42, No. 2. 157-17

tanggung jawab<sup>210</sup> Peran penting perempuan wirausaha dan kelemahan serta kendala yang dihadapi, konsep intensi berwirausaha sering kali menjadi jalan keluar dari eksistensi seorang perempuan wirausaha. Membuka usaha sendiri membutuhkan waktu yang artinya tidak bisa instan karena harus dilalui oleh banyak proses. Mulai dari memikirkan ide awal, membuka, memperkenalkan dan mempromosikan usaha tersebut. Dalam proses ini, banyak sekali tantangan dan rintangan, baik dari internal maupun eksternal. Tantangan ini tidak jarang menyebabkan para wirausahawan mundur. Tidak kuat dan stres melihat usaha yang dibangun lambat tumbuh, penjualan seret, sementara dana dan tenaga sudah banyak dicurahkan dan akhirnya memilih mundur dan menyerah.

---

<sup>210</sup> Purnomo, "Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Desa Karangmekar Melalui Women Empowerment Dan Social Media Marketing"; Putri, "Perbedaan Kepercayaan Diri Ditinjau Dari Jenis Kelamin Pada Remaja Yang Mengalami Jerawat Nodule."

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Partisipasi Perempuan dalam Pengembangan Usaha Produktif Era *New Normal Life* di Kota Palembang**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) untuk menjangkau berbagai informasi yang berhubungan dengan sub judul dengan melakukan wawancara dengan 4 kriteria Responden yaitu:

1. Akademisi Penggiat Gender
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan
3. Pengurus BMT
4. Pengusaha Perempuan

Secara umum pertanyaan yang dibangun berdasarkan konstruksi sub judul melalui penilaian kompetensi Responden. Hasil penelusuran data sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

##### **1. Akademisi Penggiat Gender**

Para akademisi yang terpilih adalah para dosen yang memiliki pemahaman tentang kajian ekonomi gender. Pertanyaan awal yang meminta pengalaman penggiat gender pada varian usaha produktif yang dibangun perempuan di kota Palembang. Mereka memiliki beberapa varian jawaban yang terbagi dalam beberapa pandangan. *Pertama*, perempuan yang bekerja sebagai perajin songket. Mereka pada umumnya kelompok usia diatas 40 tahun yang memiliki ketrampilan membuat tenunan dengan ATBM (Alat Tenung Bukan Mesin).

Menurut penggiat gender aktifitas yang dilakukan biasanya berkelompok dari ibu ibu rumah tangga yang berdekatan rumah yaitu 1) perempuan yang bertugas mencelup benang dengan warna kain tekstil yang dikehendaki. Menjemur dan mengeringkan; 2) Perempuan yang melerai benang dimana pelenting akan digunakan sebagai pelilit benang yang sudah diwarna, kelompok perempuan ini sangat mahir menggunakan alat bantu berupa alat Darwin dan alat pemutar rahat; 3) perempuan menganeng benang dengan ketrampilan merenggangkan benang di atas alat penenun dan biasanya menggulung benang. Dalam proses menggulung benang, benang-benang yang sudah direnggangkan tadi akan digulung dengan menggunakan sekeping papan loseng;

Selanjutnya 4) kelompok perempuan yang menyapuk benang: sebuah proses pembuatan kain di mana salah satu benang loseng dimasukan ke dalam sikat jentera atau gigi alat tenun, kemudian mengarak benang. Dalam proses mengarak benang, anda akan memasukan benang asing yang sudah digelung dan anda akan menjumpai bahwa benang loseng mempunyai rangkap ganjil dan genap yang nantinya akan digerakan naik turun selama proses penenun. Menyongket benang, proses berikutnya, di mana anda akan menggunakan sebuah alat yang diberi nama lido yang akan digunakan untuk menyongket benang loseng tiga sampai lima lembar.

Pada bagian lain perempuan yang menenun benang. Alat torak diisi dengan benang emas atau benang pakan yang dimasukan ke bagian kiri dan kanan diantara celah benang loseng yang nantinya akan mengikat corak yang dikehendaki oleh si penenun hingga menjadi selembar kain songket<sup>211</sup>.

---

<sup>211</sup> Deskripsi wawancara dengan penggiat gender tanggal 21 September 2021

Usaha produk lain yang dilihat oleh pada penggiat gender adalah usaha membuat batik jumputan. Perempuan yang andil dalam pembuatan batik ini adalah 1) perempuan yang menentukan motif kain jumputan dan mengatur zat warna sesuai dengan motif yang diinginkan; 2) Kelompok perempuan yang mengikat kain dengan cara sederhana seperti dibungkus kelerang, batu batuan dan uang logam dan kemudian zat pewarna dengan plastic; 3) Kelompok perempuan yang mencelup kain kedalam warna warni yang sudah disiapkan; 4) kelompok perempuan yang khusus mencelupkan ke dalam air panas, meniriskan, membuka iakatan dan menjemur; 5) kelompok yang khusus menyeterika dengan ketrampilan karena harus diatur dalam suhu yang tepat hingga menjadi batik dengan warna yang ditentukan<sup>212</sup>.

Disamping itu kaum perempuan juga melakukan kegiatan komunitas perempuan usaha warung sembako, warung tekwan model, dan warung gerobak maupun mobil nasi keliling. Perempuan yang bergerak dibidang usaha sarapan pagi, Perempuan Penjual keliling khas Palembang (empek-empek, laksan, burgo, naga sari, dan kue khas lainnya). Usaha daur ulang kain perca untuk masker dan aksesoris lainnya, termasuk sewa menyewa alat pelaminan

Ada juga usaha rumahan seperti membuat beberapa ketrampilan dengan mesin jahit. Seperti kelompok perempuan yang mendaur ulang kantong terigu dari PT. Indofood yang berada di wilayah jalan Sambu Kapten A. Rivai Palembang. Kelompok Perempuan ini membeli kantong kantong terigu yang kemudian dilakukan proses dari

---

<sup>212</sup> Deskripsi wawancara dengan penggiat gender tanggal 21 September 2021

1) mencuci; 2) membuat pola; dan 3) menjahit. Hasil nya seperti sarung bantal, guling, taplak meja hingga spre<sup>213</sup>.. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat usaha produktif hingga masa pandemic COVID-19 dalam tabel berikut

**TABEL 4.1**

**Usaha Produktif Perempuan Sampai Masa *New Normal* Life (Pandemic Covid-19)**

No	Usaha	Jenis
1	Warung	1. Kelompok Kebutuhan sehari hari dan jajan
		2. Kelompok menjual Laup pauk
		3. Kelompok Menjual Empek Empek dan sejenisnya
		4. Model dan tekwan
2	Warung Dadakan	Menyediakan sarapan pagi yang biasanya digelar di pinggir jalan atau ditempat tempat strategis dengan satu meja atau lebih antara jam 06.00-09.00 pagi
3	Mobil keliling dan gerobak	Nasi dan lauk pauk
4	Songket	1. Kelompok perempuan mencelup benang dengan warna kain tekstil
		2. Kelompok perempuan yang meleraikan benang, alat bantu dan alat pemutar rahat
		3. Kelompok perempuan menganang benang, merenggangkan benang di atas alat penenun dan menggulung benang pada sekeping papan loseng;

---

<sup>213</sup> Deskripsi wawancara dengan penggiat gender tanggal 25 September 2021

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kelompok perempuan yang menyapuk benang</li> <li>5. Kelompok penenun</li> </ol>
5	Jumputan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok perempuan desain motif jumputan</li> <li>2. Kelompok perempuan yang mengikat kain</li> <li>3. Kelompok perempuan yang mencelup kain kedalam warna warni</li> <li>4. Kelompok perempuan mencelupkan ke dalam air panas, meniriskan, membuka ikatan dan menjemur</li> <li>5. Kelompok Perempuan yang khusus menyeterika</li> </ol>
7	Batik Kain Prada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok pengontrol bahan baku, peramu bahan, pengatur alat centang Lukis</li> <li>2. Kelompok Pelukis</li> <li>3. Kelompok Penyetrika hasil lukisan</li> </ol>
6	Penjual Keliling	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kelompok Makanan khas Palembang</li> <li>5. Kelompok Kemplang Krupuk</li> <li>6. Kelompok perabotan rumah tangga</li> <li>7. Kelompok Sayur Sayuran</li> <li>8. Kelompok kue kue kering</li> </ol>

Sumber: Olah Data 2021

Dari pertanyaan untuk menilai perbedaan antara aktifitas sebelum dan sesudah masa Pandemic COVID-19, para Responden penggiat gender menilai dengan beberapa indikasi. Mereka menilai perbedaan pada perubahan aktifitas. Perempuan yang pada awalnya banyak berada di luar aktifitas



rumah (ranah publik) sekarang kembali ke ranah domestic dengan merubah pola kerja.

Selama ini saya menilai perempuan sudah keablasan memahami kesetaraan gender, sehingga ranah dometik yang seharusnya menjadi bagian penting, makin terabaikan. Ini terlihat dari rumah rumah penitipan anak yang semakin berkembang, pembantu rumah tangga yang sudah memiliki kekuasaan dalam tanggung jawab dalam rumah, hingga urusan anak sehingga anak lebih mempercayai pembantu dibandingkan ibunya sendiri, dan anak yang lebih senang mencari perhatian kepada pembantu dibanding ibunya sendiri. Pandemic COVID-19 yang membangun new normal life mengembalikan perempuan ke ranah domestic dengan mengatur pola kerja masing masing, dengan demikian aktifitas mereka bekerja produktif tidak menjadi maksimal<sup>214</sup>.

Responden lain menilai bahwa tidak ada perbedaan dalam aktifitas, malah terjadi penambahan kerja bagi perempuan berkeluarga. Menurut Responden, dampak dari kebijakan pemerintah dalam meminimalisir pandemic mengharuskan sebagian besar kegiatan di ruang publik harus dilakukan di dalam rumah. Kaum perempuan mendapatkan peran lebih ekstra dari biasanya, selain ikut memikirkan bagaimana mendapatkan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, peran sebagai guru pun harus dilakukan untuk mengajar anak yang kegiatan belajarnya dialihkan ke rumah, melayani berbagai kebutuhan suami, memastikan kebutuhan rumah tetap tersedia untuk anak dan suaminya.

---

<sup>214</sup> Transkrip wawancara dengan Abdul Hadi, salah seorang responden penggiat gender tanggal 27 September 2021

Ketakutan atas penularan pandemic membuat para pengurus rumah dan pengurus anak-anak diliburkan tanpa batas waktu bahkan diberhentikan untuk menjaga sterilisasi rumah tangga. Perempuan belajar ekstra menyesuaikan diri ketika bekerja dari rumah, mulai dari mengubah metode mengajar hingga menyiapkan perangkat mengajar jarak jauh sembari mengerjakan tugas-tugas domestik. Akibat dari hal tersebut, perempuan yang biasanya melakukan kegiatan produktifnya 5 jam berkurang menjadi 2 sampai 3 jam dan ini berimplikasi pada produk yang mereka hasilkan

Berdasarkan hal tersebut, maka perbedaan yang signifikan aktifitas wirausaha perempuan sebelum dan setelah *new normal life*. Sejalan dengan hal tersebut dari sisi manfaat dinilai oleh respon penggiat gender dari sisi kualitas dan kuantitas hasil. Menurut Responden dari sisi positif perempuan yang biasanya tidak perhatian pada aktifitas teknologi gudget mulai belajar untuk hal tersebut terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha yang mereka jalankan. Sementara dari sisi negatifnya, perempuan mengalami kehilangan waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Sementara Responden menilai manfaatnya dari sisi *quality time* terhadap keluarga setelah perempuan kembali ke ranah reproduktif. Dari sisi negatif kaum perempuan mengalami kendala mendapatkan bahan baku usaha yang mereka geluti akibatnya usaha produktif yang mereka lakukan tidak selancar seperti biasanya, dan semaksimal produk yang dihasilkan<sup>215</sup>.

---

<sup>215</sup> Deskripsi wawancara dengan penggiat gender, 26 September 2021

**TABEL 4.2**  
**Perbedaan Perempuan dalam Aktifitas Produktif**  
**Sebelum dan Sesudah New Normal Life**

No	Sebelum New Normal	Era New Normal
1	Aktifitas perempuan berkembang di ranah publik	Aktifitas perempuan kembali ke ranah domestik
2	Domestikasi perempuan pada alur Kasur, dapur, sumur	Domestikasi perempuan dengan penambahan menjadi guru anak <i>off line</i> , memprioritaskan kebutuhan suami
3	Usaha rumahan tidak menjadi bagian penting dan dianggap perempuan tidak memberikan keuntungan maksimal	Usaha rumahan menjadi prioritas dan berguna membantu ekonomi keluarga dengan keuntungan yang didapat

Sumber: Olah Data, 2021

Responden menilai upaya meningkatkan usaha produktif dimasa Pandemic Covid-19 dengan berbagai cara. Responden penggiat gender menilai dari sisi “bangun kebersamaan”. Artinya perempuan yang memiliki usaha berusaha melakukan aktifitas Kerjasama dalam melakukan produk mereka. Responden yang lain melihat dari upaya melakukan pendekatan dengan dunia keuangan (perbankan dan non perbankan) untuk dapat membantu memberikan pembiayaan pada usaha yang mereka lakukan agar tetap berjalan<sup>216</sup>. Para penggiat gender menilai partisipasi

---

<sup>216</sup> Deskripsi wawancara dengan penggiat gender, 26 September 2021

perempuan dalam pengembangan usaha produktif tersebut dapat menjadi pertimbangan sebagai akses untuk mendapat bantuan pembiayaan pada produk koperasi dan BMT. Alasan yang mereka sampaikan dalam beberapa pandangan yang dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Perempuan memiliki komitmen, perhatian dan tanggung jawab, sehingga kelemahan mereka dari beberapa administrasi yang harus dimiliki bisa diadakannya. Seperti proposal *bisnis plan*, laporan keuangan, laporan rugi laba sederhana.
- b. Perempuan pada prinsipnya memiliki kemampuan untuk maju, kebersamaan dalam keluarga dimana suami dan anak-anak yang sudah memiliki kemampuan membantu dapat ikut dan menyadari pentingnya membantu perempuan mengembangkan usaha mereka
- c. Keyakinan dan kesadaran Lembaga keuangan (BMT ataupun koperasi) untuk memberikan pembiayaan yang komprehensif menjadi bagian penting dalam menguatkan perempuan dalam melakukan usaha produktif mereka<sup>217</sup>.

Adanya ketidakpercayaan Lembaga keuangan atas aktifitas produktif kaum perempuan disebabkan adanya asumsi negatif yang menilai bahwa intervensi keluarga dan ketidakberdayaan mereka memutuskan persoalan menjadi dasar utama lembaga keuangan memiliki standar kelayakan rendah untuk membantu pembiayaan mereka<sup>218</sup>. Para penggiat gender yang menjadi Responden memberikan rekomendasi atas pemberdayaan perempuan agar benar-benar menilai perempuan yang membutuhkan sehingga program

---

<sup>217</sup> Rekapitulasi wawancara dengan penggiat gender, 26 September 2021

<sup>218</sup> Deskripsi wawancara tanggal 26 September 2021

yang didasari atas kebutuhan masyarakat akan lebih mempengaruhi masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya. Rekomendasi yang lain agar dilakukan selalu proses sosialisasi secara masif dalam membangun adaptasi dengan pandemic COVID-19<sup>219</sup>.

Berdasarkan pemahaman penggiat gender perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan. Kecerdasan serta kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia, khususnya, tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan sebelum new normal. Dari data bidang perikanan misalnya, pada tahun 2015 perempuan mengerjakan 70% pekerjaan produksi perikanan dengan waktu kerja hingga 17 jam. Mulai dari menyiapkan bahan bakar, perbaikan alat menangkap ikan, memasak bahan makanan untuk nelayan laki-laki. Setelah ikan tiba di dermaga, perempuan kemudian berperan sebagai penjual atau pengupas kerang. Mereka juga ahli dalam mengolah ikan menjadi makanan siap saji, seperti tekwan, sambal, ataupun kerupuk sehingga harga jual produk ikan menjadi naik.

Dari sisi politik Pemerintahan era 2014-2019 era Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla perempuan semakin diberdayakan dengan ditetapkannya peraturan mengenai kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik. Dari sisi ini perempuan aset, potensi, dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Ini artinya pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa.

---

<sup>219</sup> Deskripsi wawancara tanggal 26 September 2021

Mengingat, perempuan adalah pendidik pertama di dalam keluarga<sup>220</sup>.

Rekomendasi lain yang diberikan agar di sector pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan di era new normal seiring dengan perkembangan masa menjadi prioritas dengan memberikan berbagai pelatihan dan mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun. di sektor Kesehatan difokuskan memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga yang terencana.

---

<sup>220</sup> Berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 lalu, populasi Indonesia pada 2018 mencapai tak kurang dari 264,2 juta jiwa atau 50,2% adalah laki-laki sementara 131,5 juta jiwa atau 49,8% adalah perempuan. Sedangkan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia diketahui mengalami kenaikan dari 90,82 pada 2016 menjadi 90,99 di 2018. IPG yang mendekati 100 itu secara jelas mengindikasikan bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia ikuttercatat naik dari 71,39 pada 2016 menjadi 71,74 di 2017. IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Satu hal yang perlu digarisbawahi, tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih tinggi dari laki-laki. Akan tetapi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan justru sebaliknya lebih rendah dibanding TPAK laki-laki yakni hanya di angka 55%. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 yang dirilis oleh BPS, proporsi laki-laki dalam sektor kerja formal hampir dua kali lipat dibanding perempuan. Mirisnya, dalam 10 tahun terakhir, tren proporsi tersebut cenderung stagnan dan bahkan perempuan bekerja masih sangat rentan untuk terpapar economic shocks. data BPS, sekitar 26% pekerja perempuan adalah pekerja sektor rumah tangga, selain itu, sebagian besar pekerja perempuan adalah pekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah yang proporsinya mencapai 89% atau sekitar 43,8 juta jiwa.

Dalam bidang ketenagakerjaan pemerintah memperluas kesempatan perempuan untuk berdaya melalui usaha produktif. Pada akhirnya *new normal* memberikan berbagai perubahan maka pencegahan kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan.

## **2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan**

Hasil wawancara dengan Responden dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa usaha produktif yang biasa dilakukan oleh Para Perempuan di kota Palembang dikhususkan pada usaha industry rumah tangga seperti memasak kue basah, membuat pempek, menjahit, membuat juputan, merajut, dan menjahit pakaian<sup>221</sup>

Perempuan Palembang adalah perempuan yang setia dalam membangun keluarga Bahagia, karenanya mereka tidak segan dan malu untuk bekerja dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan penghasilan halal. Pengalaman yang saya lihat perempuan mau melakukan daur ulang barang sampah, mengambil barang kemudian menjualnya lagi baik dari rumah kerumah maupun menggelar lapak ditempat yang dianggap strategis. Usaha jualan baju bekas (BJ) juga dilakukan perempuan<sup>222</sup>

Perbedaan yang paling signifikan dalam aktifitas wirausaha perempuan dan setelah *new normal* Pada saat

---

<sup>221</sup> Deskripsi wawancara dengan responden pada 5 Oktober 2021

<sup>222</sup> Transkrip wawancara dengan responden pada 5 Oktober 2021

sebelum pandemic COVID-19 perempuan menawarkan dagangannya langsung ke masyarakat, tapi setelah adanya wabah, aktivitas masyarakat diluar dikurangi dan juga membatasi pertemuan dan perkumpulan, sehingga diharapkan mereka dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi yakni menawarkan dagangannya melalui media sosial. Baik itu melalui akun pribadi maupun membuka merk dagang/usaha biar lebih dikenal masyarakat luas bukan hanya di lingkungan sekitar mereka saja.

Responden lain menjelaskan perbedaan pada pola pikir, sebelum pandemic perempuan banyak yang berkerja maksimal di luar namun setelah pandemic COVID-19 mereka berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan dan suasana berdasarkan kebijakan pemerintah Indonesia dan lebih banyak menahan keinginan demi keselarasan rumah tangga maupun pada perusahaan atau usaha yang dibangun.

Manfaat bagi perempuan dalam upaya mengembangkan usaha produktif Dalam mengembangkan usaha yang selama ini hanya terpaku menawarkan usahanya hanya dalam skala kecil di lingkungan sekitar, sekarang mereka dapat menawarkannya melalui media social, dimana lebih banyak dikenal luas oleh orang lain, sehingga meningkatkan produktivitas usahanya dan dapat mengajak orang lain untuk membantu sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan lainnya.

Sejalan dengan upaya usaha produktif, partisipasi yang dilakukan kaum perempuan dalam mengembangkan usaha produktif adalah dengan cara lebih aktif dalam perkumpulan para perempuan lainnya, saling sharing ide, saran dan sehingga dapat saling bekerjasama dan lebih meningkatkan hasil dalam produktivitas mereka masalah.



Selanjutnya dalam pengembangan usaha produktif dapat menjadi akses mendapatkan pembiayaan pada produk BMT. Hal tersebut dikarenakan para perempuan yang mempunyai usaha yang lebih luas maka kemungkinan besar mereka dapat meningkatkan produktivitas mereka, permintaan meningkat bukan hanya dari lingkungan sekitar, akan tetapi juga dari orang lain yang jauh dari tempat usaha mereka. Dengan begitu mereka dapat memperoleh bantuan dari BMT untuk tambahan modal usaha dengan melampirkan transaksi yang ada di usaha mereka yang baik.

Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengembangan usaha produktif di era new normal life agar dapat berkualitas dan meningkatkan kuantitas melalui BMT adalah Agar para pengusaha perempuan terutama dalam industri rumah tangga agar dapat lebih meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing dengan hasil produk dari pabrik/ perusahaan besar. Sehingga dengan adanya jaminan tersebut, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan pinjaman melalui koperasi/BMT.

### **3. Pengusaha Perempuan**

Pertanyaan pertama kepada Responden yang melatarbelakangi usaha yang dilakukan didasarkan sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Perempuan membangun usaha dari jiwa mereka yang memiliki kemandirian sejak remaja, ide ide kemandirian kemudian dikembangkan dengan membangun usaha sesuai kemampuan yang dimiliki.
- b. Membantu suami dalam menyelesaikan persoalan ekonomi terutama di masa masa sulit era pandemic COVID-19, disamping untuk tetap menjaga

- keharmonisan, kesetaraan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan standar masing masing
- c. Faktor *single parent* akibat perceraian, kematian suami yang menanggung anak anak dalam masa sekolah;
  - d. Mendayagunakan uang dari warisan orang tua dan mendayagunakan rumah peninggalan orang tua untuk *family bisnis*” yang dibangun dengan menggunakan ruangan kosong seperti garasi rumah, halaman yang strategis dilalui masyarakat

Setelah memasuki *era new normal* Pandemic COVID-19 berbagai pernyataan usahawan perempuan atas perbedaan perkembangan usaha mereka.

Terasa sekali masa pandemic pada usaha kami mengalami penurunan penjualan yang luar biasa. Sebagai salah seorang yang membuka usaha rumahan dengan menjual empek empek, lisol dan sejenisnya biasanya selalu habis apa yang dijual sampai pukul 09.00 pagi, sekarang sampai sore tidak pernah habis, bahkan ketika dijual kembali besoknya malah tidak disentuh pembeli...sedih karena banyak yang dijual terbuang atau diberikan saja kepada tetangga dengan Cuma Cuma padahal selama ini mereka membeli...saya yakin semua usaha mengalami penurunan, sampai ada yang punya lapak membongkar lapaknya karena tidak ada lagi pembeli maksimal pada usaha yang dibuatnya.

Responden juga memberikan berbagai pernyataan pada beberapa aspek penting dalam proses usaha mereka dalam bahan baku, seperti membeli bahan baku untuk bahan baku membuat batik jumputan atau membuat bahan

baku untuk membuat prada<sup>223</sup>. Termasuk bahan bahan untuk pembuatan makanan khas Palembang. Hal tersebut juga terjadi pada proses penjualan yang harus mengatur waktu karena kebijakan PSBB<sup>224</sup>.

Selama pandemic usaha rumahan yang dibangun selama ini dengan susah payah dan sangat membantu

---

<sup>223</sup>Prada merupakan cara menghias batik menggunakan warna keemasan dalam bentuk lapisan. Dipakai untuk pembuatan baju pengantin. Secara umum, proses produksi batik prada dimulai dengan membuat motif yang diinginkan diatas permukaan bahan kain batik. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pemberian warna emas pada setiap ornamen-ornamen yang diinginkan. Teknik pembuatan motif batik prada ini menggunakan teknik prada. Batik yang sudah ada motifnya tersebut kemudian diberi lem pada setiap motif dan corak yang akan diberi bubuk emas tersebut. Lem yang biasa digunakan dalam membuat batik prada ini adalah lem kayu. Karena pada dasarnya lem kayu ini memiliki kekuatan perekat yang cukup baik ketika diterapkan diatas kain. Pemberian lem tersebut sama dengan teknik batik tulis, jika batik tulis menggunakan malam, sedangkan batik prada ini yang digunakan adalah lem. Setelah semua motif yang diinginkan sudah diberi lem, diamkan beberapa saat agar lem sedikit mengering kemudian pewarna semacam glitter atau pasta prada ditaburkan diatas motif yang sudah diberi lem tersebut. Cara meratakan glitter tersebut menggunakan kuas, dengan cara ini glitter akan menempel dengan baik dan merata sesuai dengan motif yang sudah diberi lem. Namun cara menguasnya harus hati-hati, agar lem tidak sampai keluar dari arena motif. Proses pelekatan pewarna pada kain tersebut sebaiknya dilakukan dengan merentangkan kain diatas alas, agar pewarna tersebut bisa meresap di permukaan kain dan tidak menyebabkan kusut pada kain. Motif yang dihasilkan dari batik prada ini nantinya akan menjadi motif timbul, karena pengaruh dari lem yang digunakan untuk menempelkan pewarna tersebut. Langkah berikutnya yaitu penjemuran kain yang sudah diberi warna. Penjemuran ini berfungsi untuk mengeringkan lem tersebut dan glitter bisa menempel dengan sempurna. Dengan proses produksi batik yang membutuhkan penjemuran tersebut, tentu cuaca sangat berperan penting dalam hal itu. Jika cuaca panas dan terik, proses produksi hanya memerlukan waktu dua hari saja. Namun jika cuaca tidak mendukung, prosesnya bisa sampai tiga hari. Apabila warna prada tersebut sudah mengering, sudah bisa dicuci dan disetrika untuk mendapatkan daya lekat warna prada agar tidak mudah terlepas. Sumber <https://www.bahankain.com/2020/07/23/proses-pembuatan-batik-prada>

<sup>224</sup> Deskripsi wawancara tanggal 9 Oktober 2021

kehidupan drop drastis dari sisi omzet, ditambah bahan baku yang harus membeli keeceran sebab PSBB, modal terus menipis dan tidak berdaya dengan keadaan...pasrah sekaligus berdoa untuk perubahan kembali seperti masa lalu...” Penjual Keliling Makanan Khas Kota Palembang harus beralih profesi menjadi penjualan batu es. Penjual sayur mayor keliling, semenjak masa pandemic para ibu-ibu yang biasa membeli sayur kepada dia enggan untuk keluar rumah karena wabah pandemic, sehingga ia harus memutar otak berjual pakaian online.

Beberapa Responden usaha mikro melakukan perubahan dari seorang penjual sapu dan perabotan rumah tangga, dimasa pandemic ini lebih dimanfaatkannya untuk berjualan masker, *faceshield*, *handsanitizer* dan keperluan lainnya untuk melindungi diri dimasa pandemic dan dengan bantuan anak anak dari generasi “Z” membangun penjualan online.

Pertanyaan yang diarahkan pada persoalan pada partisipasi perempuan dalam upaya pengembangan usaha produktif. Di ranah sosial para Responden memiliki berbagai pengalaman sendiri. Seorang Responden usaha rumahan yang memiliki suami sebagai ASN mendapatkan “olokan” karena dianggap tidak bersyukur dan kemudian membuka usaha seperti ingin menyaingi usaha mikro yang juga berjualan yang sama

Sedih rasanya tetangga yang begitu sinis ketika saya membuka usaha rumahan berdasarkan keinginan mengisi luang sekaligus mengajak beberapa remaja yang menganggur untuk bekerja bersama saya, kesinisan mereka awalnya sekedar olokkan “seperti kekurangan uang saja, padahal suami sudah memiliki penghasilan lebih”, kemudian menjadi gosif berkepanjangan karena dianggap mematikan usaha

lain yang berdekatan...saya ajak untuk bekerja bersama mereka sepertinya tidak terlalu simpatik.....satu sisi saya ingin mengisi kekosongan waktu dengan mengembangkan apa yang dimiliki, satu sisi masyarakat sekitar tidak terlalu menerima, diajak bersama sama mereka juga menjauh<sup>225</sup>

Di ranah ekonomi maupun dari sisi kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun pemerintah kota Palembang secara umum mereka tidak mengalami kendala kecuali bagaimana kokoh dengan melakukan kreatifitas dan inovasi karena dunia ekonomi adalah untuk mendapatkan laba dan kebijakan pemerintah tidak menghalangi kecuali aturan aturan dalam menimalisir penyebaran pandemic COVID-19

Dari sisi pembiayaan dengan pertanyaan “Apakah ibu pernah atau sedang atau mau meminta bantuan dalam bentuk pembiayaan, hibah dan atau sejenisnya untuk pengembangan Usaha Ibu melalui BMT sebagai Lembaga micro syari’ah?” jawaban Responden dari usahawan Responden terbagi dalam 3 informasi.

*Pertama*, mereka yang sudah sejak awal usaha didasarkan dari hasil komunikasi, pelatihan dan bantuan dari BMT. Bagi Responden BMT menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan bantuan pembiayaan yang tidak terlalu sulit dengan berbagai persyaratan sebagaimana dalam dunia perbankan. Menurut mereka kunci dari kebersamaan dengan BMT adalah komitmen untuk menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan akad dan selalu berkomunikasi dengan tim BMT terkait dengan usaha yang dijalaninya.

Usaha saya adalah perajin kain prada dengan membangun kegiatan di rumah, persoalan bahan baku

---

<sup>225</sup> Transkrip wawancara tanggal 13 Oktober 2021

dan pembiayaan sering menjadi “ngurut dada” karena menghadapi kendala dalam mengakses berbagai program pendanaan perbankan, hadirnya BMT dengan memberikan bantuan pembiayaan Rp 5 juta sangat membantu, bagi pengusaha besar uang tersebut pasti tidak seberapa, tapi bagi kami dan atau semua usahawan mikro ini sangat berarti, bahkan ada teman yang berjualan sarapan pagi mendapat bantuan pembiayaan Rp 2. Juta sangat berguna untuk talangan dana usaha yang dibangun dengan susah payah<sup>226</sup>

*Kedua*, Mereka yang tidak mendapatkan pembiayaan dari BMT karena memiliki satu persepsi bahwa BMT sama dengan Lembaga perbankan lainnya, sehingga mereka kemudian tidak berkeinginan untuk berusaha mendapatkan pembiayaan dari BMT, ditambah lagi isu isu yang mereka dengar bahwa BMT memiliki banyak masalah sehingga banyak gulung tikar<sup>227</sup>.

*Ketiga*, kelompok Responden yang belum mengenal BMT serta produk yang ada di BMT, walaupun mengenal baru sampai batas pemahaman dari mulut kemulut dengan penjelasan yang banyak mereka tidak pahami terutama yang berhubungan dengan nama nama kesyari’ahan, seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, pembiayaan ijarah atau istilah istilah seperti simpanan tawakal<sup>228</sup>

Saya ini hanya berpikir bagaimana ekonomi keluarga sedikit banyak tidak terguncang, sehingga saya tidak ada waktu mengenal bahasa pembiayaan yang pernah disampaikan kepada saya yang banyak menggunakan Bahasa Arab, walaupun diterangkan, saya tidak juga paham paham, sehingga saya ragu untuk ikut

---

<sup>226</sup> Transkrip wawancara tanggal 15 Oktober 2021

<sup>227</sup> Deskripsi Wawancara tanggal 12 Oktober 2021

<sup>228</sup> Deskripsi Wawancara tanggal 12 Oktober 2021

## pembiayaan BMT<sup>229</sup>

Mereka yang sudah bermitra dengan BT merasakan beberapa manfaat, Responden menyampaikan beberapa tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Perubahan pola manajemen keuangan yang dibangun membuat profesionalitas usaha semakin kokoh dan bisa dievaluasi setiap bulan
- b. Mereka belajar membangun sistem kebersamaan yang selama ini mereka merasa tidak pernah merasakan adanya kebersamaan yang ditunjukkan dengan perhatian para pendamping yang tulus dan memberikan banyak pengetahuan;
- c. Memberikan solusi dengan membantu pemasaran atau mempromosikan produk kepada kolega mereka<sup>230</sup>

Responden disampaikan adanya informasi bahwa “sulit untuk mendapat pembiayaan dengan Lembaga keuangan mikro syari’ah. Mereka memberikan pernyataan yang berbeda.

Sulit itu karena mereka tidak memahami istilah istilah dalam ekonomi syari’ah dan tidak mau bertanya. Padahal yang ditawarkan mereka sangat mudah, lebih fleksibel dan tidak banyak aturan sebagaimana di bank...kami yang usaha kecil sulit sekali untuk diterima untuk pembiayaan karena aturan aturan yang ada...kami perempuan sebenarnya bisa dibimbing dan siap untuk bekerjasama, asalkan kami diberi kesempatan....untuk program pemerintah, kami tidak bisa ikut karena tidak tahu caranya, kadang kadang sesame kami tidak saling memberikan informasi<sup>231</sup>

---

<sup>229</sup> Transkrip wawancara tanggal 12 Oktober 2021

<sup>230</sup> Deskripsi wawancara tanggal 13 Oktober 2021

<sup>231</sup> Transkrip wawancara tanggal 13 Oktober 2021

Responden juga memberikan pernyataan bahwa tidak adanya kebersamaan dalam memberikan informasi sesama usahawan, sedikitnya informasi serta kurangnya pengetahuan tentang istilah ekonomi syari'ah kami menjadi penyebab isu yang dikembangkan bahwa sulit mendapatkan pembiayaan dari Lembaga keuangan mikro syari'ah<sup>232</sup>.

Sejalan dengan hal tersebut para perempuan usahawan menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak BMT sangat minim, mereka menilai seperti Lembaga BMT tidak memiliki pola bagaimana melakukan aktifitas mereka.

Kami menemukan pengurus BMT yang menawarkan produk lembaganya tidak memahami secara baik apa yang mereka jelaskan, seperti ketika menjelaskan produk pembiayaan mudharabah, mereka cuma menjelaskan bahwa mudharabah itu adalah pembiayaan bagi hasil. Penjelasan istilah bagi hasil tidak mereka tuntaskan, seperti adanya kesan mereka cuma ingin menawarkan kepada orang-orang tertentu, dan tidak bagi usaha kecil. Paling banyak mereka menjelaskan bagaimana kemudahan membayarnya. Sehingga kami memberi kesan bahwa sosialisasi yang diberikan tidak dilakukan oleh pengurus yang benar-benar paham terhadap produk mereka sendiri

Berdasarkan jawaban Responden dari usahawan perempuan yang mendapatkan pembiayaan BMT mengalami perubahan sebagaimana dalam tabel berikut:

---

<sup>232</sup> Deskripsi wawancara dengan para responden tanggal 13 Oktober 2021



**TABEL 4.3**  
**Perbedaan Sebelum dan Sesudah Mendapat Pembiayaan**  
**Bmt**

NO	SEBELUM	SESUDAH
1	Produk terbatas	Produk berkembang/bertambah
2	Tidak memiliki catatan keuangan	Memiliki catatan keuangan sederhana
3	Jaringan terbatas	Jaringan berkembang
4	Tidak ada perhatian	Pendampingan terbatas
5	Usaha apa adanya yang penting jalan	Usaha dilakukan dengan proses perencanaan

Sumber: Olah Data, 2021

Saran yang diberikan oleh Responden usaha perempuan kepada BMT sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut: 1) agar BMT memeberikan sosialisasi kepada semua usaha mikro di Palembang; 2) agar BMT memiliki pola yang dapat menjelaskan kepada usaha mikro secara baik, jelas dan mudah dipahami; 3) memberikan model BMT yang dapat dipahami oleh semua dan dapat dipahami dan diimplementasikan; 4) BMT harus mampu pro kepada usaha mikro yang dijalankan kaum perempuan<sup>233</sup>

#### **4. Pengurus Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)**

Dari Responden pengurus Baitul Mal Wa Tamwil di kota Palembang memberikan pernyataan atas produk produk yang dibangun dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk

---

<sup>233</sup> Deskripsi wawancara tanggal

pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil penelahaan data wawancara diketahui secara umum produk yang dibuat dalam 4 komponen yaitu:

1. *Funding* atau produk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berdasarkan akad mudharabah yang tidak diperjanjikan dimuka, dan akad *wadhiah al-dhamanah*. Dari simpanan mudharabah, nasabah dan BMT berpeluang mendapatkan penghasilan yang besarnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan di awal akad
2. *Lending* atau produk penyaluran dana dengan akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad bagi hasil, dan akad pinjam meminjam. 1) Jual Beli Jual merupakan akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana obyeknya adalah barang dan harga. 2) Murābahah, adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. 3) Salam, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. 4). Istishnā, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
3. *Servicing* atau Produk layanan yang dilakukan paling banyak ada pada penerapan bagi hasil sebagai pengganti bunga. Dan akad ini sebagai landing dan juga sebagai funding.
4. *Sosializing* atau Produk Sosial yang dibentuk dalam produk tabarru; zakat, wakaf, infaq dan shadaqah<sup>234</sup>

---

<sup>234</sup> Rekapitulasi deskripsi wawancara dengan responden pengurus BMT, 2021. Secara khusus konstruksi normative produk hampir sama dengan BMT lainnya. 1) Pembiayaan bersama bagi hasil (Musyarakah). Akad kerjasama diantara pemilik modal yang

Dalam hubungan dengan usaha produktif yang dilakukan oleh kaum perempuan di kota Palembang, Responden menilai dari sisi 4 yaitu:

1. **Aspek Kelayakan** semua aktifitas produktif perempuan memiliki dampak pada tambahan penghasilan bagi keluarga dan sekaligus kemampuan mereka mengatur waktu untuk keluarga. Aktifitas tersebut menghilangkan pencitraan perempuan yang lemah yang hanya “meminta belas kasihan suami”, bergantung pada gaji dan pemberian suami;
2. **Kelebihan** usaha produktif perempuan pada sisi kualitas yang selalu diupayakan menjaga produk usaha mereka.

---

mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan dengan prinsip bagi hasil, yang persinya disesuaikan dengan penyertaannya. Jenis pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang telah memilih usaha dan bermaksud mengembangkan usahanya, tetapi masih kekurangan dana untuk mengembangkan usaha tersebut. 2) . Pembiayaan pembelian barang bayar jatuh tempo (Murabahah). Akad jual beli barang atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad ini, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. 3) Pembiayaan pembelian barang bayar angsuran (Bai' Bitsaman 'Ajil). Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Atau dengan kata lain, pembiayaan murabahah ialah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak lain selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini diperhitungkan dan dicatat sebagai piutang bank kepada nasabah. Pembiayaan ini sangat cocok bagi nasabah yang membutuhkan asset, namun kekurangan dana untuk melunasinya. Diakses dari Miswaton Khasanah Hidayat, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Sebagai Alternatif Pembiayaan, diakses dari [BMT%20\(BAITUL%20MAAL%20WA%20TAMWIL\)%20SEBAGAI%20ALTERNATIF%20PEMBIAYAAN](#)

Perempuan dalam melakukan usahanya tekun dan berupaya memegang kualitasnya. Saking kokohnya mereka selalu mengomel jika ada produk yang dibuat memiliki kekurangan. Disamping itu mereka bersandar lebih baik produk dihentikan jika bahan bakunya kurang atau tidak sesuai dengan yang diinginkan mereka.

3. **Kekurangan** pada persoalan otonomisasi perempuan yang masih dikontrol oleh suami, sehingga setiap kreatifitas mereka sering terhambat dengan berbagai persoalan kebutuhan keluarga. Kebutuhan tersebut diambil dari hasil usaha yang dibangun perempuan. Pembagian peran dalam keluarga yang merupakan bentukan budaya memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, sehingga perempuan tetap mempunyai tugas-tugas pekerjaan domestik dalam rumah tangga walaupun perempuan juga mencari nafkah dengan berusaha. Hal ini juga menyebabkan perempuan usaha kecil mempunyai alokasi waktu kerja yang lebih panjang dan beban yang lebih berat
4. **Prospek** dari usaha produktif perempuan dari sisi keinginan mereka untuk maju. Hal tersebut menjadi modal mereka untuk mampu berkembang. Berdasarkan data memperlihatkan perempuan merupakan merupakan actor penting dalam membangun peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perempuan juga mau dan siap aktif untuk kegiatan agar dapat berperan lebih besar dari sekedar ibu rumah tangga

Dalam pandangan Responden menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengembangan usaha produktif tersebut dapat menjadi pertimbangan sebagai akses untuk

mendapat bantuan pembiayaan pada BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) dengan beberapa filosofis yaitu bahwa ruh BMT adalah koperasi yang memiliki spririt kesejahteraan komunal (*taawun*). Dari sisi pembiayaan perempuan lebih memiliki rasa tanggung jawab untuk selalu menyisihkan keuntungan untuk membayar apa yang menjadi tanggu jawabnya atas pembiayan yang sudah diterimanya, Jika dalam perjalananya terjadi hambatan maka nilai nilai kesejahteraan komunal yang akan dilakukan dengan model terbaik dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan<sup>235</sup>.

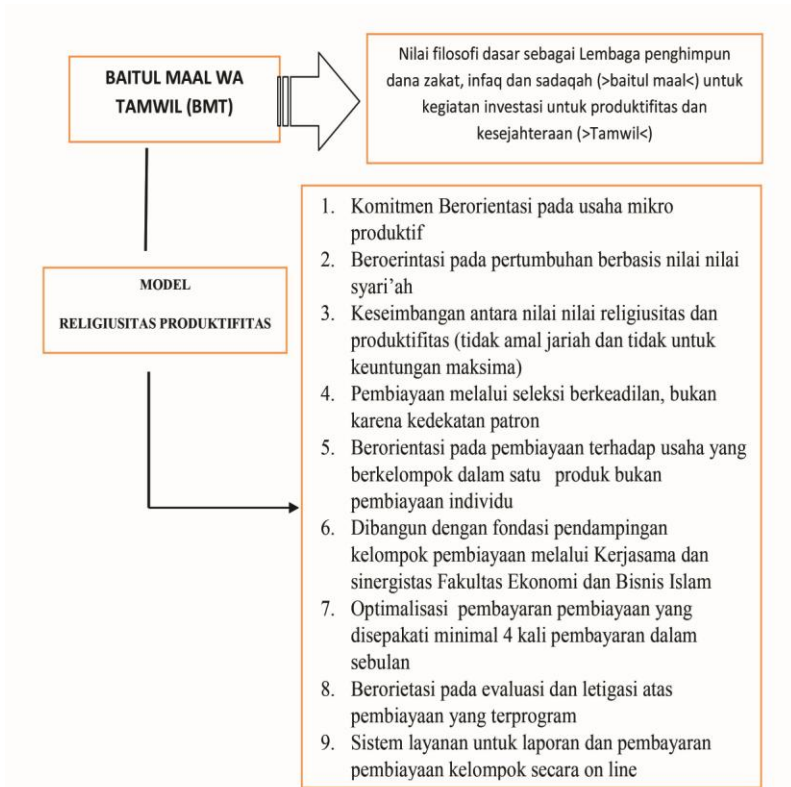
Berdasarkan hasil penelaahan lapangan memperlihatkan adanya beberapa indicator yang bisa menyatukan produktifas perempuan dengan BMT. Dimana konstruksi yang dibangun adalah adanya perhatian semua dalam meingkatkan kebersamaan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

---

<sup>235</sup> Deskripsi wawancara dengan responden, 14 Oktober 2021

## GAMBAR 4.1

### Rangkuman Hasil Penggalian Data dengan Responden Atas Perempuan dan Baitul Mal Wa Tamwil



### **B. Sinergistas antara Perempuan Palembang dan Baitul Mal Wa Tamwil untuk Usaha Produktif di Palembang**

Kiprah perempuan dalam perekonomian keluarga dan nasional menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan secara keseluruhan. Seiring dengan bertambahnya pendapatan perempuan atau akses perempuan terhadap sumber-sumber daya ekonomi melalui usaha, maka kemampuan dan kesempatan mereka untuk bernegosiasi dalam rumah tanggapun meningkat. Posisi tawar mereka

berubah dan pendapat mereka mulai diperhitungkan dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Kualitas partisipasi perempuan untuk pengembangan usaha akan mengalami berbagai cobaan yang diistilahkan ” *triple burden of women*”, yaitu mereka diminta menjalankan fungsi reproduksi, produksi, sekaligus fungsi sosial di masyarakat pada saat yang bersamaan. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas. Kendala yang dihadapi perempuan adalah pandangan bahwa sektor pekerjaan tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan keterampilan spesifik. Perubahan strategi harus sejalan dengan lembaga yang berkepentingan dengan perempuan. BMT harus mampu bersinergi dengan model yang tepat dalam membangun hal tersebut.

Problem “trust” dan rendahnya pemasukan yang didapat perempuan menjadi salah satu penyebab dari aspek pembiayaan selama ini akses yang lebih kecil dari laki-laki. Sementara satu sisi yang lain porsi perempuan di dalam usaha kecil ini sangat menonjol, maka peningkatan ekonomi perempuan dilakukan antara lain melalui upaya berupa program atau kegiatan penguatan usaha sekaligus menyelesaikan problem teknis usaha dan problem struktural. Hambatan mendapatkan akses pembiayaan dan partisipasi luas mengembangkan usaha maupun kelompok kerja bersama menjadi problem tersulit bagi usaha perempuan dibidang tehnik usaha, terbatasnya jejaring, terbatasnya keterampilan manajemen dan penguasaan keterampilan teknis produksi, serta terbatasnya kemampuan pengembangan desain. Dari sisi problem structural berhubungan dengan peraturan yang masih “bias gender”.

Undang Undang Republik Indonesia tahun 1945 membangun tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tersurat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*. Pokok-pokok pikiran tersebut secara terinci ditegaskan dalam Pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini artinya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>236</sup>.

Ekonomi kerakyatan dalam peristilahan tidak mempertentangkan apa yang menjadi kajian terdahulu, terutama sebutan antara konsep ekonomi kerakyatan ataupun ekonomi Pancasila.<sup>237</sup> Konsep ini juga tidak bermaksud

---

<sup>236</sup> Beberapa ilmuwan menilai bahwa Negara menjamin hak setiap warganegara untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya, seperti yang tertuang di dalam UUD 1945 tersebut bahwa jelas hak yang sama diberikan kepada seluruh rakyat baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, politik maupun kesempatan terhadap lapangan pekerjaan. Dalam pengertian ini tidak ada lagi pengecualian wilayah, artinya diperuntukkan bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia

<sup>237</sup> Konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan Mubyarto dan Sri-edi Swasono (1981) misalnya walaupun memiliki ciri dan penggambaran yang berbeda, Mubyarto melalui analisis sosialis, dan Sri-edi Swasono lewat penggambaran nilai-nilai Pancasila dan Syari'ah Islam namun arahnya untuk membangun ekonomi kerakyatan di Indonesia berdaya guna lewat payung UUD 1945 terutama pasal 33 dan menegaskan komitmen untuk menolak *self-interest* dan konsep *homo-*



mempertentangkan ekonomi besar dengan ekonomi kecil, atau bagaimana usaha kecil, menengah, dan usaha mikro dilindungi. Ekonomi kerakyatan bukan ekonomi penyantunan kepada kelompok masyarakat yang kalah dalam persaingan. Tetapi, ekonomi kerakyatan adalah tatanan ekonomi dimana aset ekonomi dalam perekonomian nasional didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara.<sup>238</sup> Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk: (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, (3) melindungi yang lemah dalam menghadapi yang kuat.<sup>239</sup> Ada tiga dasar yang melandasi konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu: *Pertama*, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga, dan

---

*economicus* Adam Smith mengikuti pemikiran Muhammad Hatta. Lihat, Sri-edi Swasono, *Tentang Demokrasi Ekonomi dan Pasal 33 UUD 1945* (Jakarta: BAPPENAS, 2008), 8-9

<sup>238</sup>Herman Haeruman J. S. dan Eriyanto, *Kemitraan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal: Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota: Business Innovation Center of Indonesia, 2001), 16; lihat juga H Moh Ali Aziz; Rr Suhartini; A Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren atas Kerjasama dengan Dakwah Press, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya: Distribusi, LKiS Pelangi Aksara, 2005), 55-56.

<sup>239</sup>Masaaki Satake, *People's Economy: Philippine Community-Based Industries and Alternative Development* (Manila, Philippines: Solidaridad Pub. House, 2003), 22-23. Lihat juga Adi Sasono dan Achmad Rofi'ie, *People's Economy* (Jakarta: Southeast Asian Forum for Development Alternatives, 1988), 69-70.

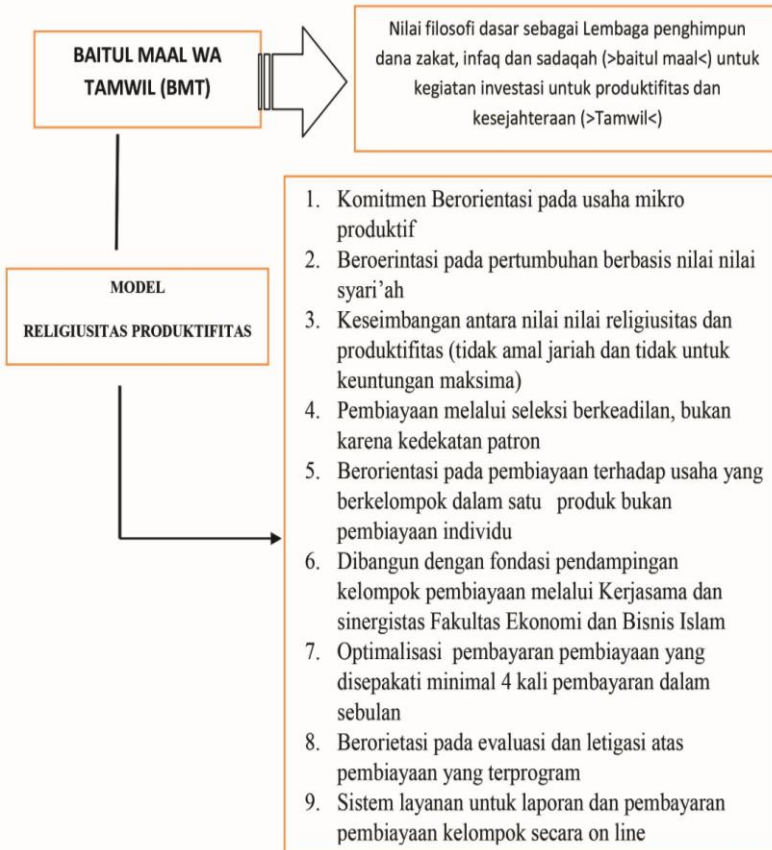
komunitas. Realitas di era pasar global orientasi industrialisasi berbasis pada modal besar dan teknologi tinggi, namun kurang berdasar atas kekuatan ekonomi rakyat.

Upaya meningkatkan produktivitas usaha kecil yang memiliki banyak keterbatasan dan hambatan dalam melakukan kegiatan usahanya sendiri, maka pola kemitraan diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Pola kerjasama itu harus melihat potensi yang dimiliki oleh Usaha kecil. Bukan sebaliknya melihat kelemahan dari usaha kecil karena akan mempersulit pola kemitraan yang akan dijalankan. Apabila potensi yang ada bisa dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kinerja usaha dari pengusaha kecil dengan menghilangkan kelemahan yang ada, setidaknya langkah awal yang baik dalam memulai pola kemitraan dengan BMT.

Salah satu contoh di Jepang ada lembaga *National Life Finance Corporation-NLFC* yang sudah berdiri sejak 1 Juni 1949. lembaga inilah yang menyediakan pinjaman awal bagi pengusaha pemula dengan hanya menunjukkan rencana bisnis yang akan dikembangkan. Di Jepang, bisnis pemula yang biasanya dibiayai oleh NLFC ini adalah usaha yang berbasis IPTEK dan memperhatikan aspek kesehatan serta bisnis yang mau melakukan modernisasi. Dalam kaitan ini, setiap pelaku bisnis yang ingin mendapatkan pinjaman dari NLFC harus mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan setempat. Sementara BMT sudah menjadi Lembaga yang diakui dan memerlukan model yang dapat digunakan.

Hasil analisis lapangan dapat diberikan 2 model yang dapat menjadi dasar pengembangan BMT kedepan dalam melakukan sinergistas dengan perempuan. Model tersebut sebagaimana dalam gambar berikut:

**GAMBAR 4.2**  
**Model Baitulmaal Wa Tamwil Prospektif**



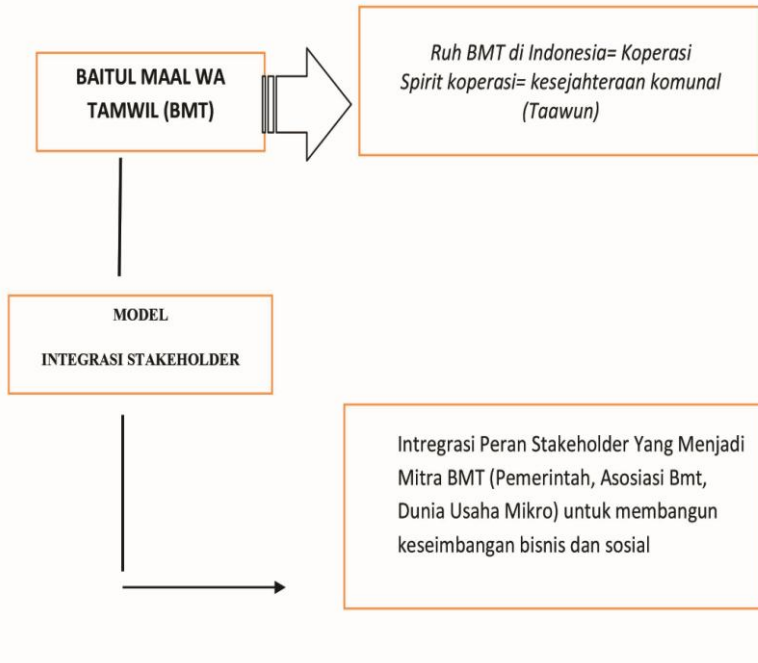
Sumber: Analisis Data, 2021

### GAMBAR 4.3

#### Model Baitulmaal Wa Tamwil Prospektif

GAMBAR 43

#### MODEL BAITULMAAL WA TAMWIL PROSPEKTIF



Antara 2 model tersebut menunjukkan suatu kesamaan dimana satu sisi membangun BMT religiusitas produktif dan sekaligus inegrasi stakeholder. Ini artinya secara internal terbangun komponen visi yang lebih realistis dan diterima semua, di sisi lain, BMT harus mampu melakukan kebersamaan dengan para stakeholder yang menopang aktifitas mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Barnard dan J. Spencer (peny.) *Encyclopedia of Social and Cul- tural Anthropology*. New York: Routledge. 1996
- A. Fitri Balasong, *Imaji; Sketsa Pergolakan Batin Perempuan*. Makassar: Pustaka Sawerigading, Cet. I. 2008
- A.Djazuli dan Yadi Yanwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat: Sebuah Pengenalan*, Jakarta:Rajawali Press, 2002
- A.S. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary Of Curent English*, London: Oxford University Press, 1974
- Abdul Djamil, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Semarang: PSJ Walisongo dan Gama Media, 2002.
- Abdul Hadi Adjin, et el (edit), *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung 1924-1950*, Tanjung Pandan: Pemda Tk II Belitung, 2000
- Abdul Hamid, et el, *Sejarah Umum*, Jakarta: Depdikbud, 1979
- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Abu Ridha, "Problematika Dakwah (Problema Visi dan Implikasinya)", dalam Adi Sasono, et el (ed), *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)*, Jakarta: Gema Insani press, 2000
- Achmad Hidir,. "*Bias gender dalam infertilitas*". Diakses [www.kompas.com](http://www.kompas.com) tanggal 31 Agustus 2021
- Agatha Olivia Victoria, "*Kontribusi Perempuan ke Ekonomi Indonesia Bisa Rp 1.957 T pada 2025*", diakses dari <https://katadata.co.id>, Tanggal 30 Agustus 2021
- Agatha Olivia Victoria, "*Kontribusi Perempuan ke Ekonomi Indonesia Bisa Rp 1.957 T pada 2025*", diakses dari

- <https://katadata.co.id>, Tanggal 30 Agustus 2021
- Agung Feryanto, *Belajar Mengelola Uang Dengan Koperasi*, Jogjakarta: Permata Equator Media, 2008
- Agus Puji Prasetyono, “Persaingan Di Era Globalisasi Dan Ekonomi Digital”, opini Badan Riset dan Inovasi Nasional, <https://www.brin.go.id/>, diakses tanggal 21 Agustus 2021
- Ahmad Dimiyadhi, *Islam dan Koperasi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004
- Amri, “Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Islamic Banking*, <https://doi.org/10.1111>
- Antho Mudzhakar, et,el, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. 2001
- Ara, Faisar Ananda, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Ardyan Muhammad, “*Daftar Perempuan Indonesia Berpengaruh dalam Perekonomian Dunia*, diakses dari <https://www.merdeka.com>, Tanggal 30 Agustus 2021
- Asfino, A. A., dan Prabowo, P. S. (2019). “Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM”, <http://diskopukm.jatimprov.go.id>
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Jogjakarta: Benteng, 2001
- Asghar Ali Engineer,, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Jogjakarta: Benteng, 1990
- Ashraf, B. N. Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. *Journal of*

- Behavioral and Experimental Finance*, 27, 100371.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371>, 2020
- Azita Berar Awaad dan Frank Hagemann, *Promoting youth employment and empowerment of young women in Jordan (An assessment of active labour market policies)*, International Labour Office, Impact Report Series, Issue 9. Geneva: 2017
- Bagus Aryo, “Dampak Covid-19 Bagi BMT”, Media Republika, 15 April 2020
- Bainar, *Perempuan Keindonesiaan dan Kemodernan*, Jogjakarta: Pustaka Cidesindo, 2009
- Bambang Tri Cahyono, *Manajemen pemasaran : Analisis Agribisnis dan Industri*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Program Magester Manajemen, 2000
- Bandingkan pemikiran Hussein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Carmen Friedric, Henriette Engelhardt dan Florian Schulz, “*Women’s Agency in Egypt, Jordan, and Tunisia: The Role of Parenthood and Education*”, diakses dari [link.springer.com/article](http://link.springer.com/article), 2020
- Christina S Handayani; Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, Yogyakarta : LKiS : Distribusi, LKiS Pelangi Aksara, 2004
- Clifford Geertz, *Local knowledge: Further Essays In Interpretive Anthropology*, USA: Basic Books, 2008
- D. Levinson dan M. Ember (peny.) *Encyclopedia of Cultural Anthropology* Vol. 2. New York: Henry Holt and Co. 1996
- Dadang Juliantara, *Pembaharuan Kabupaten*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2004

- Denys Lombard, *Nusa Jawa : Silang Budaya : Kajian Sejarah Terpadu*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Dinas Koperasi dan UMKM dan Informasi Direktur PD Pasar Kota Palembang  
<https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel> tanggal 11 oktober 2019
- Djnenen Bale, *Peta Suku Bangsa di Pulau Sumatera*, Depdikbud, Ditjen. Kebudayaan, Direktorat Jarahnitra Sub dit Limngkungan Budaya, 1989
- Donthu, N., & Gustafsson, A. Effects of COVID-19 on business and research. *Journal of Business Research*, 117(June), 2020
- Dwi Listia Rika Tini, “*Pengembangan Program Usaha Ekonomis Produktif Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Sumenep*”, JISOP (Jurnal Inovasi Sosial Politik), Vol. 1 No. 2 Oktober 2019
- Dwiyanto, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Eva Lidya, “*Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berwawasan Gender*”, Artikel Umum, Bulletin Bakohumas Kota Palembang, 2003
- Faisal Basri, *Peta Perekonomian Indonesia Memasuki Era Digital*, Development, ICT, Theguardian.com, 2017
- Fatima Mernisis,, *Beyond The Veil, Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria dan Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*, Surabaya: al-Fikr, 1997
- Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Mary Jo Lakeland (trans.), Oxford: Basil Blackwell, 1991
- Gherardi, *Gender, Symbolism, and Organizational Cultures*, London: Sage, 2000
- H. Brown, *Women Organising*, London: Routledge, 1992



- Hamdi, *Energi Terbarukan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Hamka. *Sejarah Umat Islam*, Jilid IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Hendro, *Dasar-dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk. Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011
- Heri Junaidi, *Efisiensi Berkeadilan Pada Kasus Usaha Songket Palembang*, Palembang: P3RF, 2010
- Heri Junaidi, *Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Pesisir Laut Sungsang, Kabupaten Banyu Asin II Sumatera Selatan*, Palembang: Rafah Press, 2019
- Heri Junaidi, *Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga pada Masyarakat Pesisir Laut Sungsang Kabupaten Banyu Asin II*, Palembang, LP2M, 2017
- Herman Saksono, *Pusat Studi wanita*, <http://www.yoho.com>, diakses tanggal 12 Agustus 2021)
- Ingrid Rudie, *Visible Women in East Coast Malay Society*, Oslo: Scandinavian University Press, 1994
- Irwanuddin, *Peranan Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan ( Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar)*, Jurnal Laa Maisyir, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017, h. 57-80
- Irzum Farihah, “*Etos Kerja Dan Kuasa Perempuan Dalam Keluarga: Studi Kasus Keluarga Nelayan, Di Brondong, Lamongan, Jawa Timur*”, Jurnal Palastren Vol. 8, no. 1, Juni 2015
- Janet Carsten, *Money and Morality of Change*, Australia: Cambridge University, 1989
- Jim Ife, dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Cet ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

- Joachim Funke, "Dynamic systems as tools for analysing human judgement". *Heidelberg University, Germany. Volume 7*, 2001
- Jorge López, Alicia Ramírez, Pilar Casado, "Modelling Entrepreneurial Attitudes in Women Entrepreneurs with Bayesian Networks", *Journal Psychology*, Vol.3 No.3, March 20, 2012
- K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Jogjakarta: IRCISOD, 2019
- Kai Spratt, Dima Toukan, Summer Lopez and Namar Kayed, "Women's Leadership As A Route To Greater Empowerment (Jordan Case Study)", USA: Management Systems International Corporate Offices, Usaid
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Maju, 1989
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK*, Jakarta: Permata Puri Media, 2012
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, *Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di 9 Sektor Pembangunan*, Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006
- Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women*, Oxford: Oneworld, 2001
- Kustoro Budiarta, *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2009
- Kuswana N, Hamzah dan Aziz, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2016
- Leila Ahmad, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, New Haven and London: Yale University Press, 1992.

- Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius. 1997
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-lughah*, Libanon: Dar al-Masriq, 1975
- Lukman Ali, et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1054
- Lukman Ali, et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- M. Amin Azis, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT (Baitul Maal wat. Tamwil)*. Jakarta: PINBUK, 1999
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- M.Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000
- M.Jafar Hafsah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. (UKM), Infokop Nomor 25 Tahun 2004
- Ma'moen Abdullah, *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, Palembang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai Nilai Budaya, 1992
- Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Maftukhasholihah, Dwi Budiarto, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender dan Ekonomi" Studi Kasus Pengusaha UMKM Perempuan Terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah BMT Palembang", *Jurnal i-finance*, Vol. 05, Nomor 01, 2019
- Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 200
- Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial Cet. IX*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Marla Mies, *Patriarchy And Accumulation On a World Scale: Women In The International Division Of Labour*, Avon: The Bath Press, 1986

- Marla Mies, *Patriarchy And Accumulation On a World Scale: Women In The International Division Of Labour*, Avon: The Bath Press, 1986
- Marthalina, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, , Vol. 3, No. 1, Juni 2018
- Masrizal, Bahrein T. Sugihen, Hasanuddin, *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019
- Mayling Oey-Gardiner et el, *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997
- McGee, R.J. dan R.L. Warms, *Anthropological Theory: An Introductory History*. London: Mayfield Publishing Com- pany. 1996
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Muhammad Umer Chapra, *Islam dan tantangan ekonomi*, Jakarta, IIIT, 1996
- Mujahidah, “Dinamika Gender Dan Peran Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8 No. 2 Juli-Desember 2015
- Muntaha Banihani, “Empowering Jordanian Women Through Entrepreneurship”, *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship* · May 2020
- Murtadlo Muthahari. *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995
- Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *IPS terpadu: Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah*, Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2006
- Nasaruddin Umar, et el, *Membangun Kultur Ramah Perempuan: Reinterpretasi dan Aktualisasi Pesan Kitab Suci*, Jakarta: Restu Ilahi, 2004
- Neni Sri Imanayati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal*

- wat *Tamwil*), Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010
- Ninik Sri Rahayu, “*Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Bmt Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)*”, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Volume 4, No. 3, September 2015
- Nur Fitri Mutmainah, *Peran Perempuan Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Kegiatan UMKM Di Kabupaten Bantul*, Jogjakarta: Universitas Aisyiyah, 2020
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2002
- Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adi citra Intermedia, 2011
- Nurul Ilmi Idris, “*Antropologi Feminis: Etnografi, Relasi Gender dan Relativisme Budaya di Indonesia*”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Volume, 30. Nomor 3, 2006
- Peggy Antrobus, *The Global Women’s Movement: Origins, Issues, and Strategies*, London: Zed Books, 2004
- Peggy Antrobus, *The Global Women's Movement: Origins, Issues and Strategies*, Bangladsh: The university Press Ltd, 2013
- Prijono, Onny S. & A.M.W. Pranarka (eds.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. 1996
- Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Universitas Sumatera Utara. 2008
- Rini Rinawati, “*Partisipasi Wanita Dalam Pembangunan: Kajian Gender mengenai Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Partisipatif melalui Pemberdayaan Masyarakat*”, *Jurnal Mimbar*, Volume XX No. 3 Juli – September 2004

- Rizki Kusumadewi Saputri; Fathul Himam, “*Mindset Wanita Pengusaha Sukses*”. <https://journal.ugm.ac.id>, Published 8 August 2015.
- Rohil Zilfa, “*Studi Komparatif Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan Islam di Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, dan Indonesia*, Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 5(2), Vol. 5 No. 2 (2017) , <https://doi.org/10.15642/jpai.2017.5.2.264-287>
- Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Saputri, R. K., & Himam, F. *Mindset Wanita Pengusaha Sukses*. Jurnal. Psikologi V.42, No. 2. 2015
- Sartono Kartodirjo, et el, *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977
- Sekaren, *Research Method for Business: a Skill Building Approach*, New York: John Wiley and Sons, Inc., 1992
- Silmi Nurul Utami, *Pengembangan Usaha: Pengertian, Jenis, Aspek, dan Strateginya*, diakses dari *Kompas.com*, tanggal 16 Agustus 2021
- Slamat Skasono. *Administrasi Kepegawaian*. Jogjakarta: Kanisius, 2003
- Sri Cahyaning Umi Salama, “Babak Baru BMT di Indonesia”, diakses dari [www.medcom.id](http://www.medcom.id),
- Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010
- Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, Jakarta: UNJ Press, 2005
- Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010

- Stephanus Hamy; Debbie S Suryawan, *Chic Mengolah Wastra Indonesia: Batik Jawa Barat*, Jakarta : Gramedia, 2009
- Suad Joseph (ed.), *Encyclopedia of Women in Islamic Cultures*, Leiden; Boston, Mass.: Brill, 2003-2007
- Sudarsono ; *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. 2003
- Sudjangi (ed), *Kajian Agama dan Masyarakat: 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990*, Jakarta Departemen Agama RI, 1992
- Sumaryadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama. 2005
- Supriyanto, et el, *Indonesia Lintasan Sejarah Budaya Sumatera Selatan*, Palembang: Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tk-I Sumatera Selatan-UNSRI, tt
- Suzanne April Brenner, *The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java, USA*: Princenton University Press, 1998. Sebagai perbandingan Shatifan, N. *Gender Needs in Indonesia*, , Laporan Identifikasi Proyek AusAID, Canberra, 2001.
- Tania Sentia, “5 Perempuan Indonesia yang Sukses Jadi Pebisnis”, diakses dari [www.liputan6.com/](http://www.liputan6.com/) tanggal 30 Agustus 2021
- Taufik Abdillah. *Islam dan masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Teguh Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah*, Pusat Kajian Otonomi. Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang, 2001
- Tim Risalah Gusti (peny), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

- Tina Sardadi dan Amy Wira Budy, *Muslimah Berbusana Nusantra*, Jakarta: Gramedia, 2009
- UNDP, *Human Development Report 1995*, (New York and Oxford: Oxford University Press, 1995
- UNDP, *Human Development Report: Cultural Liberty in Today's Diverse World*, New York: UNDP, 2004
- Volker Nienhaus, "*Islamic Economic, Finance and Banking, Theory and Practice in Islamic Banking and Finance*, edited by Butterworth Editorial Staff, London: Butterworth, 1986
- Wahid Abdul Mustafa,. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Diva Press. 2004
- Wahyu Tjiptaningsih, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon)*, Reformasi : Jurnal Ilmiah Administrasi, Nomor 1 Jilid 2 Maret 2017
- Walter J. Schultz, *The Moral Conditions Of Economic Efficiency*, London: Cambridge University Press, 2001
- Wasis, Sugeng Yuli Irianto, *Ilmu Pengetahuan Alam*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008
- Widodo, et el, *Pedoman Akuntansi Syari'ah: Panduan Praktis Operasional Bait al Mal wa al-Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999
- World Bank, *World Bank World Tables*, Oxford: Oxford University Press, 1999
- Yass, *Cerita rakyat dari Sumatra Selatan*, Jakarta: Gramedia Widiasarna, 1993
- Yaya. *Akuntansi Perbankan. Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2009



Yessi Harnani, Hastuti Marlina, dan Elmia Kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi*, Jogjakarta: Depublish, 2019  
Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004  
Zuhaidah Ma'rifah, *Ayo Mengenal Indonesia* :

## GLOSARIUM

***Baitul Mal Wa Tamwil*** adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syari'ah yang menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

***Baitut tamwil*** yang diartikan dengan rumah pengembangan harta yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, sementara ***Baitul maal*** yang artinya rumah harta untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptmalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya

**Balai Usaha Mandiri Terpadu** adalah lembaga usaha ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu melayani nasabah usaha kecil-bawah berdasarkan sistem bagi hasil, dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungannya sendiri.

**Gender** merupakan salah satu isu kritis dalam kehidupan organisasi. Identitas dengan kualitas maskulin maupun feminim tertentu dapat berpengaruh terhadap kehidupan social yang dialaminya, termasuk pengalaman organisasional

**New Normal** adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19

**New Normal Life** adalah Perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19.

**Partisipasi** adalah keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil hasil pembangunan.

**Patriarki** adalah sistem struktur dan praktek sosial budaya yang menempatkan kaum kaum laki-laki mendominasi, mengeksploitasi kaum perempuan

**Patriarki domestik** Menitikberatkan kerja dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk stereotip dianggap kodrat perempuan yang tidak dapat ditawar

**Patriarki Publik** Penekanan pada sistem pembentukan ditempat kerja dan dalam pemerintahan

**PBB** : Perserikatan bangsa-Bangsa

**Produktif** merupakan sikap yang konsisten untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, tidak ada konsep untuk menganggur dan kehilangan perjuangan untuk berusaha

**Qardul Hasan** (artinya orang tersebut hanya mengembalikan dana pinjaman saja)

**Sektor finansial** yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung.

## INDEKS

### A

*adaptif*, 29  
aktualisasi, 5, 82  
**antusiasme**, 19  
argumentasi, 99

### B

*Baitul Mal Wa Tamwil*, 1, 15,  
16, 30, 32, 33, 47, 48, 111,  
115, 148, 152, 153  
berkeadilan, 29  
BMT, 2, 15, 16, 17, 21, 22,  
30, 31, 32, 47, 48, 49, 50,  
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  
115, 116, 117, 118, 119,  
120, 127, 135, 140, 144,  
145, 146, 147, 148, 149,  
152, 154, 157, 159, 161,  
162, 164, 166, 167, 169,  
171

### C

CEO, 22, 23

### D

deskriptif, 32  
diskriminasi, 7, 8, 39, 67, 80  
diskriminatif, 6, 58

### E

efektif, 63, 69, 70

efektifitas, 42  
Efisiensi, 23, 24, 25, 26, 30,  
42, 47, 69, 164  
ekonomi Islam, 29  
*Era New Normal Life*, 2, 16,  
30, 33, 44, 127  
etimologi, 35, 37, 40

### F

feminis, 6, 38, 65, 67  
Filosofis, 39, 107  
*fundamental research*, 29

### G

gender, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 17,  
19, 20, 21, 22, 23, 29, 30,  
31, 33, 58, 60, 62, 63, 64,  
74, 80, 81, 127, 128, 129,  
130, 132, 133, 134, 135,  
136, 154, 160  
**globalisasi**, 45, 46, 64, 69

### I

induktif, 29  
inovasi, 69, 94, 113, 119, 144  
instrumen, 6

### K

kalangan feminis, 65  
karakteristik, 63, 98, 109  
keadilan, 29  
kesejahteraan, 26  
komparatif, 43

komprehensif, 22, 41, 120, 135  
konseptual, 30, 33, 40, 43  
kontribusi, 53, 119, 120  
konstruksi, 4, 7, 9, 10, 22, 37, 39, 54, 79, 125, 127, 149  
kontemporer, 9  
kontribusi, 10, 14, 49, 70, 71, 92, 113, 114  
kualitatif, 32  
kuantitatif, 28

## M

manajerial, 60, 62, 63, 64  
manejemen, 1  
*maqā> sʿid shari> 'ah*, 26, 30  
*maqashid*, 26, 30  
maslahat, 26  
**mayoritas**, 2, 10, 19, 23, 31, 51, 87, 115, 117, 118, 122  
merekonstruksi, 27  
Metodologi, 29, 156, 168  
mikro produktif, 1  
mikro Syari'ah, 1

## N

new normal, 2, 9, 16, 29, 30, 32, 33, 44, 45, 46, 132, 133, 136, 137, 138, 140, 141

## P

Palembang, 1, 9, 16, 17, 21, 24, 28, 30, 31, 33, 72, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,

96, 97, 98, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 122, 123, 127, 129, 130, 131, 138, 142, 143, 144, 148, 150, 153, 163, 164, 166, 170  
pandemic COVID-19, 111, 113, 130, 136, 139, 140, 144  
patriarkhi, 4  
PBB, 6

**perempuan**, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 97, 99, 100, 101, 105, 110, 111, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157

perspektif, 60, 62, 65, 76

## R

ranah domestik, 5, 8, 134  
reinterpretasi, 5  
relatif, 10, 51, 62, 64, 75, 117, 119  
relevansi, 69  
religiusitas, 159  
responden, 132, 138, 147, 149, 152

Responden, 17, 30, 31, 32,  
77, 101, 102, 108, 109,  
110, 127, 132, 133, 134,  
135, 138, 139, 140, 141,  
143, 144, 145, 146, 147,  
148, 150, 151

## **S**

Sektor finansial, 53, 118  
selektif, 3  
signifikan, 2, 15, 23, 51, 64,  
71, 74, 113, 122, 133, 136,  
138  
*social distancing*, 111  
*struktur given*, 11

substantif, 36

## **T**

teoritis, 40, 43

## **U**

UKM, 2, 15, 42, 51, 94, 96,  
112, 121, 122, 123, 166

## **Z**

ZIS, 51, 53, 117